

TRANSFORMASI ORGANISASI PENGELOLA PENDIDIKAN TINGGI KEPARIWISATAAN



LAPORAN HASIL PENELITIAN INSTITUSI 2021

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF / BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK

Jalan Raden Pугuh No.1, Puyung, Jonggat, Praya
Lombok Tengah

**LAPORAN PENELITIAN INSTITUSI
TRANSFORMASI ORGANISASI PENGELOLA PENDIDIKAN
TINGGI KEPARIWISATAAN**



Disusun Oleh:

Dr. Farid Said, M.Pd.

Prof. Dr. Haedar Aqib, M.Si.

Herry Rahmat Widjaya, M.Par

Dr. Jujuk Ferdianto, M.Pd.

Rizda Batubara, M.Pd

Surayyal Hizmi, M.Sc.

**POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Raden Puguh No.1, Puyung, Jonggat, Praya

Lombok Tengah 83261

ABSTRAK

Penelitian ini berusaha menghadirkan berbagai bentuk solusi terkait fenomena keberadaan perguruan tinggi pada kementerian lain (PTKL). Issu yang mendasari penelitian ini berawal dari sebuah kajian terkait PTKL yang dianggap memiliki anggaran jauh melebihi Kmendikbudristek, konsekuensi dari hal itu PTKL harus menerima mahasiswa program kedinasa sesuai dengan tupoksinya. Fokus penelitian ini terkait dengan a) mengkonstruksi *Road map* Pendidikan vokasi Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata Kemenparekraf; b) menyusun Strategi antisipasi yang efisien pasca terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan PT oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah NonKementerian; dan c) mendesain model kebijakan kolaborasi Tata kelola kelembagaan dalam membentuk SDM Kepariwisata yang unggul berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan model *Participatory Action Research* (PAR) (Kemmis & Teggart, 2010), hal ini terkait dengan tema penelitian, jenis dan sumber data terkait dengan pengguna (*user*) lulusan dan Lembaga Negara Setingkat Kementerian yang mengelola perguruan tinggi (PTKL). Walaupun demikian untuk memudahkan implementasinya mengkombinasikan dengan studi feomenologi yang terjadi di beberapa subyek terteliti. Hasil dari penelitian ini terkait dengan a) Roadmap Perguruan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata; b) Harmonisasi Pelaksanaan Tata Kelola Perguruan Tinggi Bidang Pariwisata; c) Telaah analisis regulasi PTKL Bidang Pariwisata Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Kata Kunci: Roadmap pendidikan vokasi, harmonisasi tata kelola PTKL

PENELITIAN INSTITUSI

IDENTITAS

1. Ketua Peneliti

2. Anggota Peneliti, Sebutkan nama dan gelar akademik serta bidang

Nama	Dr. Farid Said, M.Pd.
Email	farglobal@ymail.com
ID Sinta	6723384
N I D N/NIDK	382 30767 6401
Jab. Fungsional / Struktural	Lektor Kepala
Bidang Keahlian	Kebijakan Kepariwisata
Program Studi	Usaha Perjalanan Wisata

keahlian (Maks. 4 Orang)

No	Nama dan gelar Akademik	Bidang Keahlian
1	Herry Rahmat Widjaya, M.Par	Pariwisata
2	Prof. Dr. Haedar Aqib, M.Si.	Kebijakan Publik
2	Dr. Jujuk Ferdianto, M.Pd.	Teknologi Pembelajaran
3	Rizda Batubara, M.Pd	Sastra Perancis
4	Surayal Hizmi, M.Sc.	Lingkungan, Manajemen Sumber Daya Alam

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Hasil Penelitian Institusi Politeknik Pariwisata Lombok Kementerian Pariwisata
Republik Indonesia dandisetujui /disyahkan pada tanggal Desember 2021

Menyetujui

Kepala P3M

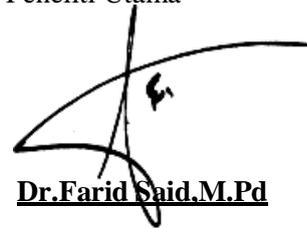


H.Lalu Ratmaja,S.Pd.,M.Pd

NIP. 1966 1231 198803 1 286

Mataram, Desember 2021

Peneliti Utama



Dr.Farid Said.M.Pd

NIP. 1964 0723 199203 1 002

Mengetahui

Direktur Politeknik Pariwisata Lombok



Dr. H. Hamsu Hanafi, MM

NIP.1961 1010 199203 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PENGAJUAN USULAN PENELITIAN INSTITUSI	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK.....	ii
PENELITIAN INSTITUSI.....	iii
IDENTITAS.....	iii
BAB I.....	5
PENDAHULUAN	5
1. Latar Belakang	5
2. Fokus Penelitian.....	5
3. Tujuan Penelitian	5
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
1. Grand Teori Pelaksanaan Kebijakan	5
2. Analisis model kebijakan kolaborasi tata kelola kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Bidang Kepariwisata	5
3. Rancangan Skema Program pendidikan dan Strategi Keberlanjutan Program	5
4. <i>Enabling</i> Program Pendidikan Kepariwisata Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).....	5
BAB III.....	5
METODE PENELITIAN	5
1. Desain Penelitian.....	5
2. Jenis dan Sumber Data.....	5
3. Lokasi dan Waktu Penelitian	5
4. Teknik Pengumpulan Data.....	5
5. Instrumen Penelitian (<i>terlampir</i>)	5
6. Teknik Analisis Data.....	5
7. Jenis dan Sumber data	5

8. Tehnik pengumpulan data.....	5
BAB IV	5
ANALISIS HASIL PENELITIAN	5
Roadmap Perguruan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata	5
a. Pendidikan Vokasi di Kemdikbud dan Ristek	5
b. Pendidikan Vokasi di Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL) (digambarkan dari hasil benchmarking di Poltekes, Unhan, PPP Bogor, STIA LAN, PPI Curug, PKN STAN).....	5
4.3. Telaah analisis regulasi PTKL Bidang Pariwisata Berdasarkan Peraturan Perundang undangan. 1 Masalah Regulasi Kelembagaan Kemnedikbud Ristek dengan PTKL (Pembahasan KPK). 2. Model Kolaborasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL) Bidang Kepariwisataaan. 3.Siklus Implementasi Model Kolaborasi	
 BAB V ; PENUTUP	
A. Kesimpulan	5
B. Saran	5
DAFTAR PUSTAKA	5
<i>Lampiran 1. Hasil Wawancara di Politeknik Kesehatan</i>	<i>5</i>
<i>Poltekes NTB 2.m4a.....</i>	<i>5</i>
<i>Lampiran 2: Hasil Wawancara di STIA LAN Jakarta.....</i>	<i>5</i>
<i>Anish_STIA LAN Jakarta.m4a.....</i>	<i>5</i>
<i>Lampiran 3: Hasil Wawancara di STAN Jakarta.....</i>	<i>5</i>
<i>Aura_STAN2_rev1</i>	<i>5</i>
<i>Lampiran 4 Hasil FGD di Politeknik Pertanian Bogor</i>	<i>5</i>
<i>Politeknik Pertanian Bogor</i>	<i>5</i>
<i>Iin_Poltek Pertanian Bogor 3.m4a</i>	<i>5</i>
<i>Lampiran 5 Hasil FGD di Universitas Pertahanan Bogor.....</i>	<i>5</i>
UNHAN 1	5
Irsyad_UNHAN 2.m4a.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perguruan tinggi di bawah kementerian lain (PTKL) pada awalnya merupakan pendidikan tinggi kedinasan (PTK) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di instansi pemerintah. Lulusan PTK dialokasikan ke tiap-tiap Kementerian Lembaga sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Dalam perkembangannya, PTKL tidak hanya mendidik calon pegawai negeri dan pegawai negeri sipil, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan yang tidak bersifat kedinasan atau dengan kata lain lulusannya dikembalikan ke masyarakat umum. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektornya selain itu penyelenggaraan PTKL juga disebutkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu PTKL yang konsentrasi bidang kepariwisataan dari 6 Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata (PTNP) di Indonesia adalah Politeknik Pariwisata Lombok. Porsi peran yang besar pada aspek penyiapan Sumber Daya Manusia Bidang Kepariwisata (SDMBK), sampai saat ini mendominasi dari seluruh destinasi dan daya dukung destinasi. Keterlibatan langsung dalam penyediaan SDMBK pada industri kepariwisataan menjadi orientasi sejak awal berdirinya di semua PTNP, mulai dari travel, konsultan pengembangan kawasan pariwisata, BUMN pengelola destinasi prioritas, maupun sektor industri formal maupun non formal menjadi bidang garapannya.

Pembentukan SDMBK berkualitas jelas memerlukan sebuah proses khusus yang dilakukan pada 6 PTNP di Indonesia (Bandung, Bali, Medan, Makassar, Lombok, dan Palembang) berorientasi vokasi dan murni industri. Hal ini seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional RIPPARNAS membahas 4 aspek pembangunan kepariwisataan diantaranya adalah Aspek Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata, sedangkan penguatan Sumber daya manusia pariwisata disebut dalam Peraturan Pemerintah No 52 tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Kedua kebijakan diatas sebagai dasar pemberian porsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengembangkan sumber daya manusia bidang pariwisata agar mampu bersaing dengan sumber daya manusia tingkat internasional.

Konflik kepentingan antar lembaga kementerian dalam merancang kebijakan kelembagaan Pariwisata, seperti penyelenggara pendidikan yang menangani seluruh sistem pendidikan khususnya pendidikan vokasi dalam pengelolaannya terjadi kontraproduktif dengan bidang pariwisata yang sudah diberikan porsi kurang lebih 50 tahun untuk mengelola Pendidikan kepariwisataan menghasilkan berbagai perangkat standar Internasional dan sudah diakui oleh pengguna stakeholder pariwisata tingkat nasional maupun internasional. Adanya perubahan kebijakan yang tidak proporsional, peralihan porsi penyelenggaraan dan pengelolaan sistem pendidikan vokasi bidang pariwisata akan sangat menghambat perkembangan kepariwisataan khususnya dari aspek kualitas sumber daya manusia, apabila kebijakan ini tidak mempertimbangkan 8 prinsip

prinsip Tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menurut UNDP (United Nation Development Programme, 2002), yaitu (1) partisipasi, (2) kepastian hukum, (3) transparansi, (4) tanggung jawab, (5) berorientasi pada kesepakatan, (6) keadilan, (7) efektifitas dan efesiensi, (8) akuntabilitas, (9) visi strategik.

Tarik menariknya kepentingan antara lembaga kementerian dengan kepentingan politik tidak seimbang dalam menetapkan kebijakan maka akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Kepariwisata adalah bagian dari urusan pemerintahan yang tidak bisa lepas dengan regulasi kebijakan-kebijakan publik, atau bagian dari proses administrasi publik yang dikerjakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dimensi Kebijakan merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang efektif dan dibutuhkan serangkaian prinsip-prinsip rasionalitas dan politis (Keban, 2014 : 53).

Berdasarkan Undang-undang Kepariwisata No. 10 tahun 2009 menjadi dasar hukum melembagakan organisasi kepariwisataan di Indonesia melalui dibangunnya Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata (PTNP) di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Wujud perhatian pemerintah ini secara politis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan membuka lapangan kerja melalui sektor pariwisata. Namun, keputusan yang sudah diambil oleh DPR untuk membuat UU Pariwisata belum rasional dari segi muatan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh bidang pariwisata dengan anggaran yang tidak memadai.

Perlu diambil langkah-langkah kongkrit untuk menyelesaikan masalah ini. Optimalisasi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang lebih efektif, dengan membuat suatu kebijakan untuk mendorong berbagai sektor dalam rangka memajukan kepariwisataan di Indonesia secara nasional, melalui Inpres No 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, yang isinya Presiden menginstruksikan langkah keterpaduan dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata kepada 17 Menteri, dan Kepala Badan, Kapolri serta para Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Implementasi kebijakan di atas belum berjalan optimal, terkendala karena sumber daya aparatur pemerintah dan Pemerintah daerah belum memiliki kompetensi, kualifikasi pendidikan serta pengalaman empiris dibidang kepariwisataan, sehingga berdampak pada hasil program pembangunan kepariwisataan yang belum menyentuh kepentingan masyarakat dan keinginan wisatawan, terlihat pada pengelolaan daya tarik wisata yang masih dikelola pemerintah dan pemerintah daerah, belum tertata dengan baik didaerah tujuan wisata masih kurangnya sosialisasi tentang tanggung jawab menjaga kualitas daya tarik wisata, juga dipengaruhi karena kurangnya kekuatan politik (*political power*) pemerintah untuk mendorong pembangunan kepariwisataan sebagai salah satu prioritas pembangunan, sudah ada seperti undang-undang, peraturan pemerintah, Inpres, Renstra, Perda dilaksanakan untuk menanggapi (*responsiveness*) keinginan masyarakatnya, karena pembangunan kepariwisataan akan membawa dampak langsung, tidak langsung dan ikutan terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, yang kesemuanya tergantung sejauh

mana kualitas standar kompetensi pelaku pariwisata baik disektor industri pariwisata maupun sektor pemerintah yang dikelola oleh Lembaga Pendidikan Kepariwisataan yang kredibel.

2. Fokus Penelitian

Beberapa harapan di atas untuk mengembangkan Strategi Transformasi Kebijakan Program Pendidikan Kepariwisataan Bagi ASN, sebagai kajian peninjauan untuk mereposisi SDMBK Politeknik Pariwisata Lombok. Kajian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif. Hal itu dapat dirumuskan fokus penelitiannya sebagai berikut:

- a. Mengkonstruksi *Road map* Pendidikan vokasi Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata Kemenparekraf
- b. Menyusun Strategi antisipasi yang efisien pasca terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan PT oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah NonKementerian.
- c. Mendesain model kebijakan kolaborasi Tata kelola kelembagaan dalam membentuk SDM Kepariwisataan yang unggul berkelanjutan

3. Tujuan Penelitian

Beberapa harapan di atas untuk mengembangkan Strategi Transformasi Kebijakan Program Pendidikan Kepariwisataan Bagi ASN, sebagai kajian peninjauan untuk mereposisi SDMBK Politeknik Pariwisata Lombok. Kajian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan

kuantitatif atau mix methods. Hal itu dapat dirumuskan tujuan penelitiannya sebagai berikut:

- a. Menghasilkan *road map* pendidikan vokasi Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata di lingkungan Kemenparekraf.
- b. Menghasilkan alternatif strategi yang efisien dalam pengelolaan Perguruan Tinggi pasca terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan PT oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.
- c. Terpolanya model kebijakan kolaborasi Tata kelola organisasi dalam membentuk SDM Kepariwisata yang unggul berkelanjutan;

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Grand Teori Pelaksanaan Kebijakan

Pada tahun 1927, Willoghby menerbitkan buku yang berjudul *Principles of Public Administration*. Buku inilah yang menjadi trend baru dari perkembangan bidang administrasi publik sekaligus membuktikan bahwa prinsip-prinsip itu ada dan dapat dipelajari. Prinsip-prinsip administrasi negara tersebut adalah adanya suatu kenyataan bahwa administrasi negara bisa terjadi pada semua tatanan administrasi tanpa memperdulikan kebudayaan, fungsi, lingkungan, misi, atau kerangka institusi. Itulah sebabnya paradigma ini disebut juga sebagai paradigma prinsip-prinsip administrasi (Yusuf, 2015).

Tokoh-tokoh terkenal dari paradigma ini selain Willoghby adalah Gullick dan Urwick, yang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai focus administrasi negara. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam apa yang disebut sebagai POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*) yang menurut mereka dapat diterapkan dimana saja, atau bersifat universal. Sedangkan lokus administrasi negara tidak pernah diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja termasuk organisasi pemerintah (Islami, 2007).

Berbeda dengan paradigma Willoghby maupun Gullick dan Urwick, pandangan administrasi Negara klasik yang dicetuskan oleh Wilson, Goodnow,

dan White, secara esensi memisahkan antara proses politik dan administrasi negara, dimana menganggap bahwa administrasi negara merupakan kegiatan suatu pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaan dan kebijakan.

Paradigma lain menyatakan bahwa prinsip-prinsip administrasi negara bersifat universal dalam bentuk organisasi dan lingkungan sosial budaya. Antara tahun 1950-1970an paradigma ini berubah, dengan tidak mendikotomikan administrasi dengan politik. Perubahan ini didasarkan pada asumsi bahwa mempelajari studi administrasi negara adalah sebagian dari ilmu politik, yang difokuskan pada proses penyusunan kebijakan dengan kekuatan sosial politik diluar birokrasi, sedangkan administrasi negara pada saat penyusunan kebijakan dipengaruhi oleh kekuatan birokrasi yang tidak lepas dari sistim politik yang berlaku (Kevin, 2009). Lebih jauh ilmu administrasi negara dengan ilmu politik dikembangkan bersamaan secara harmonis. Pada periodetersebut juga muncul pendapat baru meninjau bahwa administrasi negara tidak terbatas pada kajian kebijakan tetapi bersentuhan bahkan berhubungan dengan berbagai ilmu seperti pada ilmu kepariwisataan dan teknik-teknik manajemen modern, yang mengakomodir aspirasi masyarakat dan bahkan dapat mengatur hal-hal yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran pemerintah dalam memposisikan keberadaannya sebagai fasilitator dan inisiator tidaklah dapat dipisahkan dengan kualifikasi pelaksana. Hal ini dimulai dari pejabat-pejabat yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan publik yang demokratis, mampu membaca sistem ekonomi yang menjamin upaya mengisi lapangan kerja agar pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk

menunjang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Manager publik harus tanggap dengan perubahan perkembangan yang berdampak kepada perubahan sistem administrasi negara yang melakukan penyesuaian-penyesuaian ditunjang dengan pimpinan yang berkualitas, responsive dan adaptif terhadap perubahan yang begitu cepat. Memanfaatkan para kelompok-kelompok pemikir (*think tank*) dari beragam interdisipliner (Fredereckson, 1994).

Tugas dan tanggung jawab pemerintah dibidang pariwisata selain promosi, pengembangan pariwisata yang tidak kalah penting adalah pengembangan Sumber daya manusia dan pengawasan yang dituangkan dalam suatu kebijakan tanpa menghambat inisiatif swasta, karena penyelenggaraan kepariwisataan menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial budaya, politik maupun lingkungan hidup (Said, 2011).

Kebijakan pembangunan destinasi wisata dengan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) memang sangat penting untuk menunjang pembangunan pariwisata. Namun, kebijakan ini belum didukung dengan kebijakan kolaboratif melalui program skema pendidikan yang sesuai kebutuhan secara menyeluruh, bersinergi antara pemerintah Kementerian Parekraf, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Pemerintah Daerah Dinas terkait. Perumusan jejaring kebijakan dibidang pariwisata sudah saatnya dilakukan karena kompleksitasnya disiplin ilmu kepariwisataan membuat perencanaan pariwisata tidak dapat berkembang cepat dibandingkan dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya. Perspektif jejaring kebijakan adalah hal yang baru dimana tingkat kolaborasi satu aktor dengan lainnya, instansi

dan stakeholder bahkan keterlibatan tingkat lokal, nasional dan internasional harus memiliki pemahaman yang sama dalam satu bahasa yang dirumuskan dalam bentuk analisis kebijakan diikuti dengan evaluasi implementasi jejaring kebijakan dibidang pariwisata.

Pelaksanaan kebijakan, menurut Edwards III mengandung tempat variabel utama yang berhubungan satu dengan lainnya, yakni: pertama, komunikasi peranan komunikasi adalah inti dari koordinasi dan sosialisasi, implementator harus mengetahui apa yang harus dilaksanakan terhadap tujuan dan sasaran kebijakan kepada, kelompok sasaran, apabila hal ini tidak diketahui maka akan terjadi resistensi. Kedua, kemampuan sumber daya manusia dan ketersediaan finansial, meskipun dikatakan oleh Edward bahwa sumber daya ini penting, namun dalam konsep kepariwisataan masih perlu ditambah dengan sumber daya alam yang akan dikelola sebagai daya tarik wisata. Ketiga disposisi, adalah etika yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis sebagai pelaksana kebijakan. Apabila salah satu tidak dimiliki implementator, maka pelaksanaan kebijakan tidak berjalan efektif. Namun, hal ini belum cukup apabila implementator belum memiliki tujuh prinsip hidup dalam ESQ (*EmotionalSpiritual Quotien*) yakni: kejujuran, visioner, komitmen, tanggung jawab, disiplin, kerjasama dan percaya diri. Keempat struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan masih yang masih belum memiliki standar operasional persedur seperti yang ada diswasta, yang akan menjadi pedoman bagi setiap individu birokrat, struktur birokrat yang terlalu panjang akan mempengaruhi hasil kerja yang diharapkan, ditambah lagi dengan kerumitan kompleksnya dalam

pengurusan perizinan (Farid, 2011). Mengkaji dari Edward III, pelaksanaan kebijakan di lingkungan PTKL khususnya di bawah Kemenparekraf akan efektif jika memperhatikan keempat variabel utama tersebut.

2. Analisis model kebijakan kolaborasi tata kelola kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Bidang Kepariwisata

Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL) yang tumbuh berkembang tanpa pengendalian kebijakan menjadi perhatian publik. Berdasarkan data yang diperoleh dari database pendidikan tinggi di Indonesia (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi/PD Dikti, Kemristekdikti/Kemdikbud), dari 20 KL/LPNK, jumlah PTKL mencapai 179 (tidak termasuk data perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pertahanan dan Polri serta belum memperhitungkan PTKL baru setelah tahun 2018) (Wijayanti & Selawati, 2020). Keberadaan dari PTKL pada awal pembentukan seharusnya hanya menyiapkan SDM sesuai kebutuhan internal namun dari waktu ke waktu keberadaan PTKL berperan dalam mendidik dan menyiapkan SDM untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat industri termasuk PTKL di bawah Kemenparekraf yang memiliki 6 perguruan tinggi dengan jumlah 38 Prodi dibidang pariwisata dan hospitality, yang bahkan di antaranya sudah berjalan sejak 58 tahun lalu. Dewasa ini PTKL menjadi sorotan KPK terkait pelurusan kebijakan, dimana berdasarkan temuan, KPK menyatakan bahwa penyelenggara pendidikan sesuai Undang Undang Pendidikan No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, sedangkan PTKL dapat mengelola pendidikan dengan terbatas pada kebutuhan internal. Hal ini terus berjalan tanpa regulasi dan model

tata kelola kelembagaan pendidikan yang selaras dengan kebijakan yang sudah ada. Eksistensi perguruan tinggi dibawah Kemenparekraf sebagai contoh yang sudah begitu kuat dan mengakar bahkan sudah mengasilkkan luaran yang menjadi pimpinan pada perusahaan perusahaan besar pariwisata dan hospitaliti di Indonesia dan luar negeri.

Terkait dengan temuan KPK melalui sebuah analisisnya, bahwa PTKL yang menyelenggarakan pendidikan bukan untuk kebutuhan internal seperti PTKL Kemenparekraf maka dianggap inefisiensi dalam penerapan pengelolaan anggaran negara (Wijayanti&Selawati, 2020). Tiga pilihan kebijakan yang diajukan oleh Kemendikbud dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian PTKL/LPNK yakni: 1) Tetap beroperasi, tetapi dialihkan menjadi PTN dibawah Kemendikbud dan K/L dapat turut membina sesuai kebutuhan; 2) Program studinya digabungkan dengan PTN yang ada; dan 3) Program studinya dilakukan *phasingout*, tidak menerima mahasiswa baru hingga semua mahasiswanya lulus. Dari 3 pilihan diatas, peneliti lebih fokus akan merekonstruksi pilihan pertama menjadi dasar pembahasan kajian penelitian ini untuk mendapatkan model kebijakan kolaborasi tata kelola kelembagaan Pendidikan Tinggi kepariwisataan dilingkungan Kemenparekraf.

Kebijakan kolaborasi kelembagaan pendidikan merupakan salah satu solusi dapat diwujudkan apabila pemangku kepentingan yang terlibat mendapatkan hasil yang saling menguntungkan. Lembaga pendidikan PTKL dewasa ini menghadapi tantangan yang dapat membuat pengelolannya dipaksa

harus berfikir inovatif untuk dapat *survive* dalam menerapkan kebijakan baru yang akan keluar dan harus diimplementasikan.

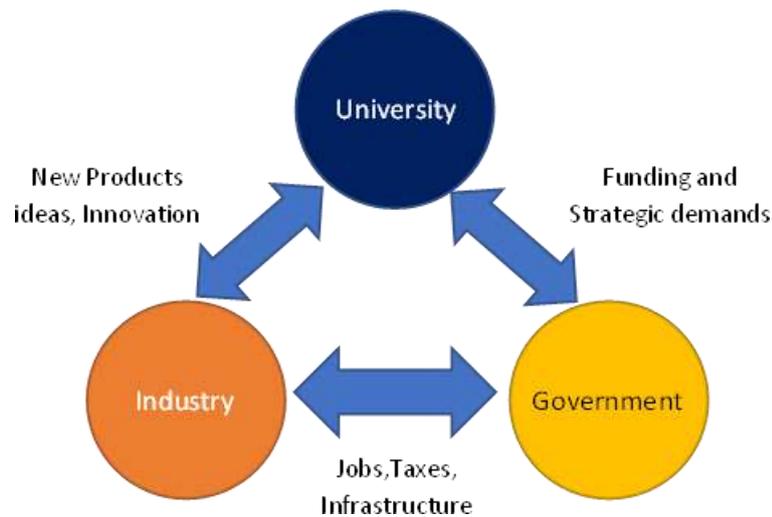
Kebijakan kolaborasi kelembagaan antara perguruan tinggi, pemerintah dan industri juga tidak kalah penting menjadi bahan evaluasi baik luarannya bekerja sebagai regulator dipemerintah dan pemerintah daerah maupun yang bekerja di Industri. Selain penatakelolaan kelembagaannya, aspek yang krusial adalah solusi untuk tetap mempertahankan kualitas masukan, proses, *input* dan *outcome*-nya sebagai suatu yang sistemik dalam sebuah Perguruan Tinggi.

Penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa tata kelola kolaboratif telah diadopsi dalam hampir seluruh dokumen pembangunan di Indonesia namun dalam kenyataannya masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Penelitian ini merekonstruksi kondisi yang ada berdasar pada pembelajaran maupun studi empiris melalui observasi ke PTKL di Indonesia. Kemudian menyusun dan memberikan alternatif pilihan sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola kolaboratif kelembagaan pendidikan kepariwisataan dibawah Kemenparekraf.

Model kebijakan kolaboratif kelembagaan pendidikan kepariwisataan didasarkan pada pendapat dan teori *Triple Helix* oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (1998, 2000) dan Leydesdorff dan Meyer (2006) menggagas model *Triple Helix* yang didasarkan pada asumsi bahwa industri, universitas, dan pemerintah semakin saling bergantung. Ini menyiratkan bahwa bidang penyelenggara pendidikan dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek bersama penyelenggara pendidikan bidang kepariwisataan yakni Kementerian

Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersilang pendapat ini harus dicari solusi dan evolusi bersama. Model ini dapat dilihat sebagai *heuristik* yang harus diteliti untuk secara sistematis memperhitungkan ketiga bidang ketika mempelajari dinamika produksi dan inovasi pengetahuan. Menurut Etzkowitz dan Leydesdorff (1998), *TripleHelix* tidak memiliki pesan deskriptif yang seragam, tetapi lebih merujuk pada program penelitian yang telah menghasilkan berbagai klaim deskriptif.

Adapun model *Triple Helix* oleh Etzkowitz dan Leydesdorff dapat dilihat pada gambar dibawah :



Secara umum kolaborasi dapat dipahami sebagai hubungan antarorganisasi yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui saling menguntungkan untuk bersama mencapai tujuan, saling berbagi informasi, sumberdaya, manfaat, dan bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan secara bersama dalam menyelesaikan berbagai masalah. Kolaborasi sebagai pilihan karena pada dasarnya organisasi tidak dapat bekerja sendiri sehingga

dengan berkolaborasi diperoleh manfaat lebih besar dari perpaduan sumberdaya pemangku kepentingan disertai dengan pengaturan penganggaran yang lebih efisien.

Work paper oleh Eppel (2013), menyatakan bahwa transformasi hubungan dari pengakuan keberadaan bersama (*co-existence*), kemudian melakukan komunikasi (*communication*), kerjasama (*cooperation*), koordinasi (*co-ordination*) hingga sampai pada kolaborasi. Agranoff dan McGuire (2003) mengungkapkan bahwa para pihak berkolaborasi karena adanya elemen kohesifitas yaitu (i) Adanya saling ketergantungan dan Saling Percaya (ii) Tujuan yang sama; (iii) Perubahan Cara Pandang dan Komitmen, adanya kerangka berpikir, persepsi, dan cara bekerja yang serupa; (iv) Kepemimpinan dan Kemampuan Memandu, mampu menerapkan prinsip arahan minimal sebagai pengganti perintah dan kendali (Febrian, 2016).

Tahun 2005 Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden No 16 Tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan dalam rangka keterpaduan pembangunan kebudayaan dan pariwisata dalam kerangka pelibatan jajaran Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, para kepala Lembaga Negara RI, Kepala Kepolisian RI, Gubernur, Bupati dan Walikota. Instruksi ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 64 Tahun 2014 tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepariwisataan. Penjelasan dari koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepariwisataan adalah upaya strategis yang dilaksanakan pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian.

Keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan pada tataran kebijakanprogram dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataantermasuk didalamnya kelembagaan pendidikan, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional yang mencakup 4 aspek pembangunan yakni: (i) Aspek pembangunan Destinasi Pariwisata, (ii) Aspek pembangunan Pemasaran Pariwisata, (iii) Aspek pembangunann Industri pariwisata dan (iv) Aspek pembangunan Kelembagaan pariwisata.

3. Rancangan Skema Program pendidikan dan Strategi Keberlanjutan Program

Dalam penelitian ini akan dibahas tentang model skema program pendidikan kepariwisataan bagi ASN selain Program Diploma reguler yang sudah berjalan. Adapun program yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Program Magister terapan Pariwisata (S2)
- b. Program Sarjana terapan Pariwisata
- c. Program Profesi keahlian Pariwisata dan ekonomi kreatif
- d. Program Diklat teknis Kepariwisataan dan ekonomi kreatif

Keempat model skema di atas akan dianalisis sesuai kebutuhan pasar ASN pada bagian masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu:

- a. Program Magister terapan Pariwisata (S2) akan menjawab kebutuhan sumber daya manusia aparatur sipil negara pada bagian manejerial level yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota khusus bidang kepariwisataan, dalam rangka peningkatan

sumber daya manusia yang masih berkualifikasi sarjana ditingkatkan menjadi Magister terapan Pariwisata S2 dengan program studi Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata sesuai nomenklatur yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti No : 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.

- b. Program Sarjana Terapan Pariwisata (DIV) untuk mengisi aparatur Sipil negara yang akan bekerja pada bagian level pelaksana di SKPD baik tingkat Provinsi maupun kabupaten/Kota dibidang kepariwisataan, dalam rangka meningkatkan kinerja ASN dibidang kepariwisataan. Adapun program studi yang relevan dengan kebutuhan ASN pada SKPD bidang kepariwisataan sebagai berikut : Prodi Destinasi Pariwisata, Prodi Pengelolaan Akomodasi dan Usaha Perjalanan Wisata sesuai nomenklatur yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti No : 257/M/KPT/2017 Tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.
- c. Program profesi keahlian pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan program pendidikan satu tahun. Pendidikan profesi dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No : 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

Program ini untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi bagi ASN yang sudah bekerja minimal 1 tahun baik Sarjana Terapan maupun Magister

Pariwisata serta sarjana/ magister tidak sebidang tapi relevan dengan pekerjaan yang sudah dikerjakan selama 1 tahun pada bagian yang mengurus kepariwisataan pada satuan kerja perangkat daerah.

Adapun program profesi keahlian pariwisata ekonomi kreatif dibagi menjadi 4 keahlian khusus yakni: perencanaan pariwisata, tata kelola destinasi, pemasaran pariwisata dan Ekonomi kreatif dengan sumber peserta dari SKPD Dinas Pariwisata dan BAPPEDA. Program profesi keahlian hospitaliti terbagi 3 keahlian khusus yakni: pengelolaan Hotel, pengelolaan Makanan dan minuman serta Usaha Perjalanan Wisata dengan sumber peserta dari ASN guru-guru SMK Pariwisata.

- d. Program DIKLAT teknis Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif . Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas ASN dan dapat dilaksanakan secara berjenjang dengan 70-120 Jam pelajaran. Peserta diklat adalah ASN dari berbagai latar belakang kualifikasi pendidikan.

4. *Enabling* Program Pendidikan Kepariwisataan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Enabling merupakan proses pertama dalam pemberdayaan masyarakat yang untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Sumber Daya Manusia Bidang Kepariwisataan (SDMBK) merupakan faktor yang paling menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyebutkan permasalahan utama birokrasi

meliputi SDM aparatur, organisasi, peraturan perundang-undangan, kewenangan, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja. Permasalahan SDM aparatur sebagai pengelola organisasi instansi pemerintah yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi perlu mendapat pemecahan masalah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam konteks SDM aparatur, permasalahan yang dihadapi meliputi alokasi dalam hal kuantitas, kualitas dan distribusi PNS menurut teritorial (daerah) tidak seimbang, serta tingkat produktivitas PNS masih rendah. Selain itu, manajemen SDM aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan perlu dikembangkannya kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara dengan hak mengembangkan kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural minimal 20 (dua puluh) jam pelajaran per tahun dalam rangka peningkatan kinerja. Berlandaskan dengan peraturan hukum yang ada maka, SDM aparatur perlu dikembangkan kompetensinya untuk peningkatan kuantitas dan produktivitas dalam kerja.

Ditinjau dari sector pariwisata, SDM pariwisata merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pariwisata suatu negara dan kualitas SDM yang mumpuni perlu diperhatikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, memuat ketentuan tentang SDM pariwisata. SDM

pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, permasalahan SDM pariwisata yang ditemukan mencakup SDM pariwisata di tingkat pemerintah (SDM aparatur); dan SDM pariwisata di dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan tentang SDM tersebut juga memuat arah kebijakan pembangunan SDM pariwisata di tingkat pemerintah diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pariwisata. Hal tersebut tertuang dalam strategi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas yang meliputi: 1) meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai; 2) meningkatkan kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan 3) meningkatkan kualitas SDM pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan. Sedangkan arah kebijakan pembangunan SDM pariwisata di dunia usaha (industri) dan masyarakat diwujudkan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi pariwisata; meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Ditinjau dari tingkatannya, permasalahan SDM pariwisata mencakup tingkat pemerintah yaitu SDM aparatur, dunia usaha (industri) dan masyarakat pariwisata. Dengan demikian dapat disusun rumusan permasalahan, bagaimana pengembangan kompetensi SDM pariwisata? Sehubungan dengan latar belakang permasalahan tersebut, dipandang perlu melakukan kajian kebijakan pengembangan kompetensi SDM sektor pariwisata pada era reformasi birokrasi,

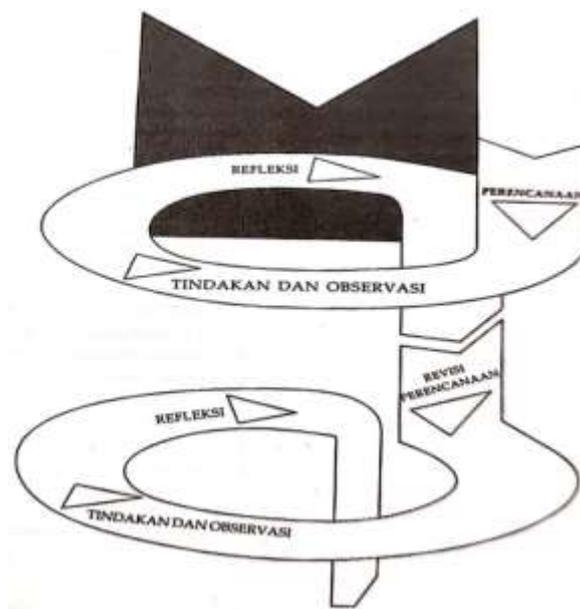
yang hasilnya dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pembangunan SDM pariwisata secara efisien dan efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan model *Participatory Action Research* (PAR) (Kemmis & Teggart, 2010), hal ini terkait dengan tema penelitian, jenis dan sumber data terkait dengan pengguna (*user*) lulusan dan Lembaga Negara Setingkat Kementrian yang mengelola perguruan tinggi (PTKL). Walaupun demikian untuk memudahkan implementasinya mengkombinasikan dengan studi fenomenologi yang terjadi di beberapa subyek terteliti. Desain penelitian ini tergambar sebagai berikut:



Diadaptasikan dari Model Lewin (1985)

Berdasarkan gambar di atas, diawali dari perencanaan, hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tahap Merencanakan Perubahan:

Melaksanakan kegiatan pra penelitian, yaitu: mengumpulkan bahan berdasarkan 1) Kajian KPK terkait PTKL; 2) Mengkaji pernyataan dari setiap PTKL (baik dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertahanan via zoom meeting). Tim peneliti mengikuti setiap tahapan rapat yang dilaksanakan oleh Kemenparekraf bersama kementerian lainnya yang menghadirkan Kemendikbudristek. Pada tahap ini peneliti menyusun perencanaan tindakan dengan prototype model harmonisasi yang sudah ditemukan peneliti berdasarkan kajian pendahuluan

Tahapan Melakukan dan Mengamati Proses Berikut Konsekuensi Perubahan:

Peneliti melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dan penyebaran angket terkait prototype model kampus transformasi, pada user seperti Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan Asosiasi industri bidang kepariwisataan, keduanya berada di setiap daerah sasaran penelitian.

Tahapan Mengkaji Proses

Peneliti melakukan benchmarking pada PTKL seperti Universitas Pertahanan, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Politeknik Penerbangan Curug, Politeknik Kesehatan Mataram, STIA LAN, STAN. Tujuannya adalah terkait dengan tata kelola manajemen sumber daya

manusia, program, anggaran, dan strategi pengembangan kampus, hal itu berdasarakan prototype model kampus transformasi.

Tahapan Merencanakan Ulang

Pada tahapan ini peneliti melakukan revisi dari masukan hasil benchmarking di PTKL sasaran penelitian. Demikian juga peneliti memperhatikan hasil rapat harmonisasi antar kementerian yang pemngelola pendidikan tinggi.

Tahapan Melakukan dan Mengamati Kembali

Pada tahapan ini peneliti bersama tim melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait hasil penyempurnaan Prototype Model dengan menghadirkan unsur OPD, Asosiasi Usaha bidang Keparwisataaan, serta melakukan zoom meeting dengan PTKL lain seperti pada tahap sebelumnya.

Tahapan Mengkaji Kembali dan seterusnya

Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan output dan outcome terkait dengan Prototype Model, serta peran dan fungsi PTKL. Pengkajian terhadap hasil riset ini senantiasa mengalami perkembangan sesuai situasi dan kondisi kebijakan yang diambil oleh Kementerian dan keputusan Presiden terkait RPP PTKL.

2. Jenis dan Sumber Data

Memfaatkan pendekatan kualitatif terkait dengan *scope spacial* penelitian dengan berbagai macam data kualitatif pada multi situs. Populasi penelitian ini adalah beberapa Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL) sebidang sesuai dengan beban tanggungjawab setiap kementerian yang memiliki perguruan tinggi. Selain itu unsur pengguna lulusan di Pegawai Dinas Pariwisata

yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat. Data primer penelitian mengenai data kebutuhan SDMBK, melalui penyusunan Roadmap Pendidikan vokasi Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata Kemenparekraf, Strategi antisipasi yang efisien pasca terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan model kebijakan kolaborasi Tata kelola kelembagaan dalam membentuk SDM Kepariwisata yang unggul berkelanjutan.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dapat ditentukan, diantaranya adalah seluruh Pegawai Dinas Pariwisata yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat. Kajian ini menmgambil data yang sudah diperoleh dibuktikan, diperdalam, diperkuat dan diperluas dengan mempertimbangkan sumber data dalam penelitian ini, adalah:

- a. Provinsi NTB (10 Kab/Kota)
- b. Provinsi Kaltim (1 Kota/ 1 Kabupaten)
- c. Provinsi Kalimantan Tengah (1 Kota/ 1 Kabupaten)
- d. PTKL (Universitas Pertahanan, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Politeknik Penerbangan Curug, STIA LAN, STAN, Politeknik Kesehatan Mataram).

Waktu dan tahapan kegiatan penelitian:

No	Jenis Kegiatan	Bulan 2021						
		Apri	Mei	Juni	Juli	Agu	Sept	Okt

		1				st		
1	Penyusunan Proposal Penelitian							
2	Pertemuan Tim							
3	Pelaksanaan Seminar Penelitian							
4	Menyusun Instrumen Penelitian							
5	Pengumpulan Data							
6	Kompilasi /Kondensasi Data							
8	Analisis Data							
9	Penyusunan Laporan Akhir							
10	Penyusunan draft naskah jurnal Sinta 2 dan Q4 serta buku							
10	Seminar Laporan Hasil Penelitian Institusi							
11	Penggandaan dan Pengiriman							

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan cara bertahap, yaitu melalui tahap pengamatan (*Observation*), Wawancara mendalam (*Indeepth interview*) terhadap informan kunci dan melakukan *Focus Group Discusion* bersama pelaku organisasi yang diteliti, yaitu Pegawai Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas Pariwisata. Data primer diperoleh secara kualitatif dilakukan di provinsi wilayah kerja Politeknik Pariwisata Lombok, diantaranya Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan sesuai dengan fokus penelitian. Terdapat beberapa tahapan dalam proses pemngumpulan data, diantaranya:

- a. Identifikasi kebutuhan di setiap kabupaten/ kota di Provinsi baik OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dan Indsutri Bidang Kepariwisataaan sasaran penelitian, melalui proses pengamatan/ obdservasi dengan

penyebaran pertanyaan melalui *google form* yang dikirim ke subyek terteliti.

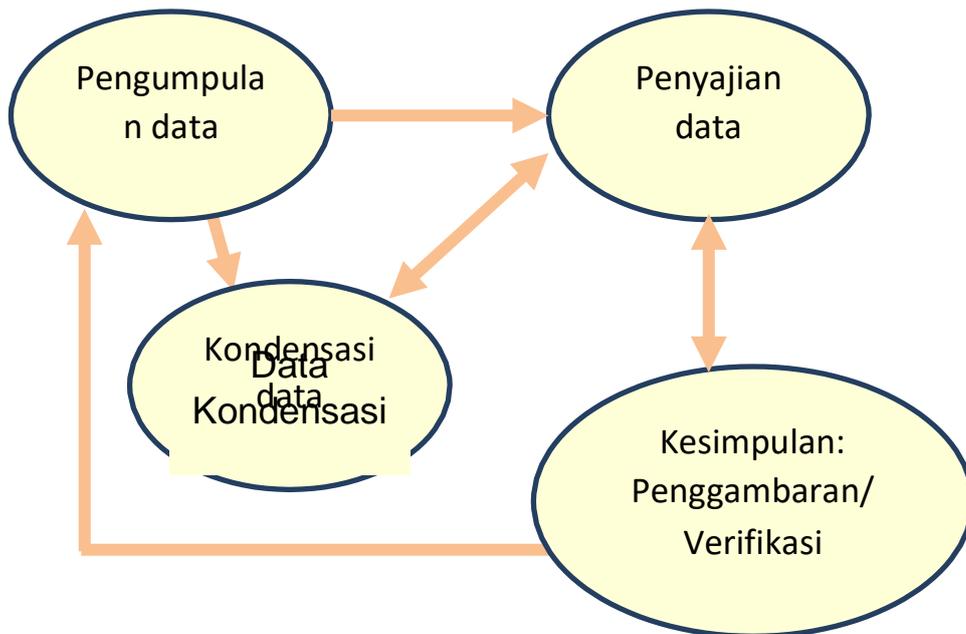
- b. Mengembangkan (*development*) *prototype* dan naskah akademik strategi transformasi pendidikan tinggi di Kementrian Lain, sesuai dengan Tugas dan Fungsi Politeknik Pariwisata Lombok/ PTNP di 5 Provinsi lainnya untuk mendapatkan masukan dari PTKL (STIA LAN, UNHAN, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, STAN, Politeknik Penerbangan Curug, dan Politeknik Kesehatan Mataram).
- c. Meminta review kajian terdahulu terkait historisitas kebijakan di PTNP, yaitu: 1) Putu Laksaguna (Kepala Badan SDMDan Kelembagaan periode ,,,,,,,) dan 2) Dr. Rian Nugroho (Staf Ahli Kebijakan Publik di masa Menteri Arif Yahya).
- d. Melakukan FGD dengan kabupaten/ kota yang melibatkan OPD dan industry melalui asosiasinya di daerah, sasaran penelitian untuk mendapatkan masukan terkait transformasi pendidikan kepariwisataan dan menemukan pola sinergitas serta menyusun strategi harmonisasi kebijakan terkait implementasi pendidikan kepariwisataan di PTNP yang diselenggarakan Kemenparekraf.

5. Instrumen Penelitian (*terlampir*)

6. Teknik Analisis Data

Untuk teknik analisis data peneliti mengacu pada pendapat Miles dan Huberman (2007), bahwa penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sehingga data sampai pada titik jenuh sesuai

dengan Model *Participatory Action Research* (PAR). Proses penelitian ini berbentuk siklus meliputi pengumpulan data, display, reduksi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, seperti terlihat pada gambar berikut:



Analisa Data Model Interaktif Diadopsi dari Miles dan Huberman (2007: 20).

Sebagaimana telah dinyatakan di atas tentang keterkaitan antara pengumpulan dan analisis data, maka gambar tersebut memperlihatkan sifat interaktif pengumpulan data dengan analisis data. Pengumpulan data sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data, pada saat pengumpulan data, peneliti dengan sendirinya terlibat melakukan perbandingan-perbandingan untuk memperkaya data bagi tujuan konseptualisasi dan kategorisasi.

Mereduksi data mencakup kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahnya ke dalam suatu konsep, kategori,

atau tema. Dengan kata lain mereduksi adalah memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, sehingga data yang direduksi memberikan gambaran lebih jelas dan mempermudah peneliti dan pembaca untuk mencermati alur hasil penelitian (Miles dan Huberman, 2007: 16). Penelitian ini menggunakan beberapa reduksi data, diantaranya:

1. Reduksi Fenomenologis

Reduksi fenomenologis peneliti melakukan penghayatan faktual, melakukan strategi pemurnian, agar meminimalisir peneliti muncul prasangka berhadapan dengan objek terteliti yang murni. Selama melakukan reduksi fenomenologis, peneliti berupaya (1) melepaskan diri dari segala bentuk atribut seperti adat istiadat, jabatan, agama, dan pandangan ilmu pengetahuan, (2) menghindarkan diri dari prasangka terkait ego sektoral asal peneliti/ institusi, dan (3) menghindarkan diri dari prasangka teoretis terkait pembenaran pada aspek teoritis yang dijadikan acuan dalam penelitian.

2. Reduksi Eidetis

Reduksi eidetis peneliti gunakan bertujuan untuk mengungkap struktur dasar dari satu fenomena murni atau yang telah dimurnikan dan merupakan prasyarat fenomenologi yang hendak menjadi ilmu sehingga melampaui apa yang bersifat aksidental atau eksistensial

3. Reduksi Transendental

Pada reduksi transendental, peneliti berupaya melakukan pemurnian fenomena. Segala tindakan peneliti yang tidak terkait dengan kesadaran murni harus dibatasi. Dengan reduksi ini, fenomenologis dalam arti sadar dan menemukan kesadaran subjek sebagai kesadaran intensional yang terarah pada fenomena murni. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dengan reduksi fenomenologis dan reduksi eidetis, karena peneliti melakukan pengamatan dan penghayatan factual terkait keberadaan OPD Pariwisata di kabupaten/ kota/ provinsi sasaran penelitian dan situasi di PTKL.

7. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL) sebidang sesuai dengan beban tanggungjawab setiap kementerian yang memiliki perguruan tinggi. Selain itu unsur pengguna lulusan di Pegawai Dinas Pariwisata yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat. Data primer penelitian mengenai data kebutuhan SDMBK, melalui penyusunan *Roadmap* Pendidikan vokasi Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata Kemenparekraf, Strategi antisipasi yang efisien pasca terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan model kebijakan kolaborasi Tata kelola kelembagaan dalam membentuk SDM Kepariwisata yang unggul berkelanjutan.

Sehingga data penelitian ini dapat ditentukan, diantaranya adalah seluruh Pegawai Dinas Pariwisata yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat. Kajian ini mengambil data yang sudah diperoleh dibuktikan, diperdalam, diperkuat dan diperluas dengan mempertimbangkan sumber data dalam penelitian ini, adalah:

- e. Provinsi NTB (10 Kab/Kota)
- f. Provinsi Kaltim (1 Kota/ 1 Kabupaten)
- g. Provinsi Kalimantan Tengah (1 Kota/ 1 Kabupaten)

Sumber data pada penelitian ini berdasarkan beberapa kajian empiris terkait kebijakan, diantaranya adalah:

- a. Data empiris terkait kebutuhan (*need assessment*) dari industry pariwisata, kebijakan Kemenparekraf, dan Kemendikbud Ristek.
- b. Study eksplorasi di Provinsi NTB, Kaltim, dan Kalteng (*need assessment*)
- c. Eksistensi Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata (PTNP)
- d. Eksistensi Perguruan Tinggi Kementrian Lain (PTKL).

8. Tehnik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi serta jenis data yang diinginkan sesuai dengan focus kajian dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Studi Literatur, melakukan kajian empiris dari hasil penelitian terkait dengan situasi dan kondisi OPD dan PTKL sesuai dengan fokus penelitian.

- b. Wawancara, dilakukan untuk menggali data secara detail dilakukan walaupun tidak secara terstruktur, pengembangan daftar pertanyaan berlangsung secara terus menerus sesuai dengan kecukupan data (*snowball throwing*), sebagai penciri penelitian kualitatif.
- c. Observasi, dilakukan sesuai dengan pemetaan sasaran data, seperti melakukan pengamatan langsung ke OPD dan PTKL
- d. *Focus Group Discussion* (FGD), dilakukan untuk mendapatkan masukan secara langsung dari OPD, PTKL, dan Asosiasi Profesi. Hal itu untuk mendapatkan masukan terkait dengan Prototype Model Kampus Transformasi.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Roadmap Perguruan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata

Perguruan tinggi vokasi memiliki peran sangat strategis dalam menyiapkan generasi muda untuk memiliki pengetahuan, keterampilan dan karakter yang unggul sehingga menjadi tenaga kerja yang siap terjun di dunia industri atau usaha bahkan wiraswastawan. Perguruan tinggi vokasi dalam menyelenggarakan pendidikannya berlandaskan kepada regulasi pendidikan Indonesia. Demikian pula, dalam mendisain dan mengimplementasikan kurikulum, perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku di Indonesia agar senantiasa relevan dengan konteks Nasional Indonesia, namun berwawasan global (Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016).

Pendidikan vokasi, memiliki peran penting dalam pengembangan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Lulusan pendidikan tinggi vokasi selain dituntut dapat bekerja dengan kompeten namun juga harus dapat berperan sebagai “agen pejuang kedaulatan” yang memiliki kemampuan *entrepreneurial*. Pada jenjang pendidikan tinggi vokasi lulusannya juga harus menjadi “*trend center*” dalam menjawab berbagai aspek tantangan bangsa (Slamet, 2009).

Beberapa roadmap dan dimensi tujuan pendidikan vokasi serta kecenderungan yang muncul dalam proses melakukan pengamatan di institusi sasaran riset (PTKL) serta sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Slamet, (Slamet, 2009) tergambar sebagai berikut, diantaranya:

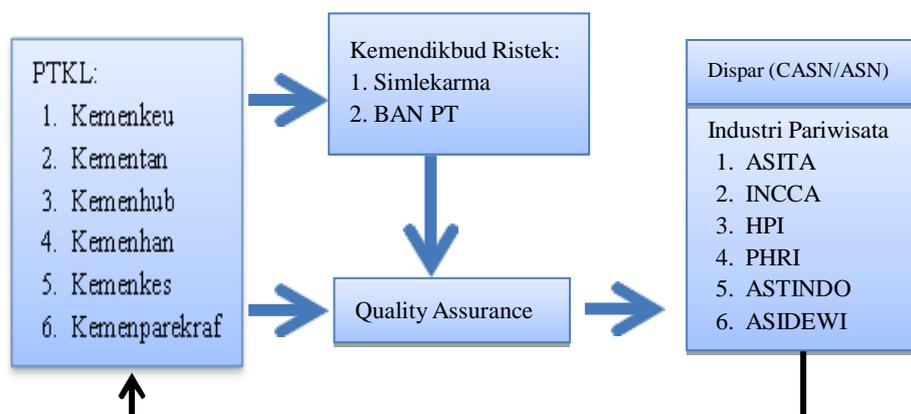
1. Mengembangkan kualitas dasar peserta didik yang meliputi kualitas daya pikir, daya qolbu, dan daya fisik dapat dirincikan sebagai berikut:
 - a. Pengembangan kualitas daya pikir meliputi cara berfikir analitis, deduktif, induktif, ilmiah, kritis, kreatif, nalar, lateral, dan berfikir sistem.
 - b. Pengembangan daya qolbu meliputi, antara lain iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rasa kasih sayang, kesopansantunan, integritas, kejujuran dan kebersihan, respek terhadap orang lain, beradab, bermartabat, bertanggung jawab, toleransi terhadap perbedaan, kedisiplinan, kerajinan, beretika, berestetika, dan masih banyak dimensi-dimensi qolbu yang lain.
 - c. Pengembangan daya fisik meliputi kesehatan, ketahanan, kestaminaan, dan bahkan keterampilan.
2. Mengembangkan kualitas instrumental/fungsional/penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, serta olahraga yang meliputi:
 - a. Penguasaan monodisiplin,
 - b. Penguasaan multi-disiplin,
 - c. Penguasaan antar disiplin,
 - d. Penguasaan lintas disiplin, baik disiplin ilmu lunak (sosiologi, sejarah, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya) maupun disiplin ilmu keras (matematika, fisika, kimia, biologi dan astronomi) beserta terapannya, yaitu teknologi konstruksi, manufaktur, transportasi, telekomunikasi, teknologi bio, teknologi energi, dan teknologi bahan).

- e. Penguasaan seni meliputi seni tari, seni musik, seni suara, seni kriya, seni rupa beserta kombinasinya.
3. Memperkuat jati diri (karakter) sebagai bangsa Indonesia yang mencintai tanah air melalui 4 pilar kehidupan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, tetap setia dan menjaga keutuhan NKRI. Setia terhadap NKRI diindikasikan seperti (1) memahami, menyadari, menjadikan hati nurani, mewajibkan hati nurani, mencintai dan bertindak nyata dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI; (2) mampu menangkal jika terjadi benturan antar nilai akibat globalisasi yang melanda dan merongrong keutuhan NKRI; dan (3) melestarikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan sekaligus terbuka terhadap gesekan-gesekan dengan kemajuan negara-negara lain.
 4. Menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia yang diuraikan sebagai: (1) menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia melalui wadah-wadah kolektif yang telah ada (Perserikatan Bangsa-Bangsa dan cabang-cabangnya); (2) menjaga pembangunan dunia yang berkelanjutan dari perspektif lingkungan, ekonomi, dan sosio-kultural; dan (3) secara reaktif, aktif, dan proaktif menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia, baik dari perspektif ekonomi, politik, lingkungan hidup, maupun sosio-kultural.

Sedangkan prinsip-prinsip pembelajaran vokasi berorientasi pada pelaksanaan praktikum di tempat yang nyata di dunia industri. Efektifitas dan efisiensi pembelajaran vokasi dikemukakan Harris, Stones dan Moore (2006)

dalam pelaksanaan TAFE (*Technical and Further Education*) di Australia (<http://www.ncver.edu.au>). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembelajar vokasi telah yang efektif dan efisien telah menjawab kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Program-program pendidikan vokasi dikembangkan berdasarkan kebutuhan industri (dunia usaha). Lulusannya memiliki kualitas tinggi yang memperoleh keuntungan langsung adalah industri, karena pada saat rekrutmen awal industri tidak memerlukan biaya awal untuk memberikan dana pendidikan pelatihan (Dardiri, 2011).

Apabila melihat dari roadmap di masing-masing PTKL dapat digambarkan sebagai berikut:



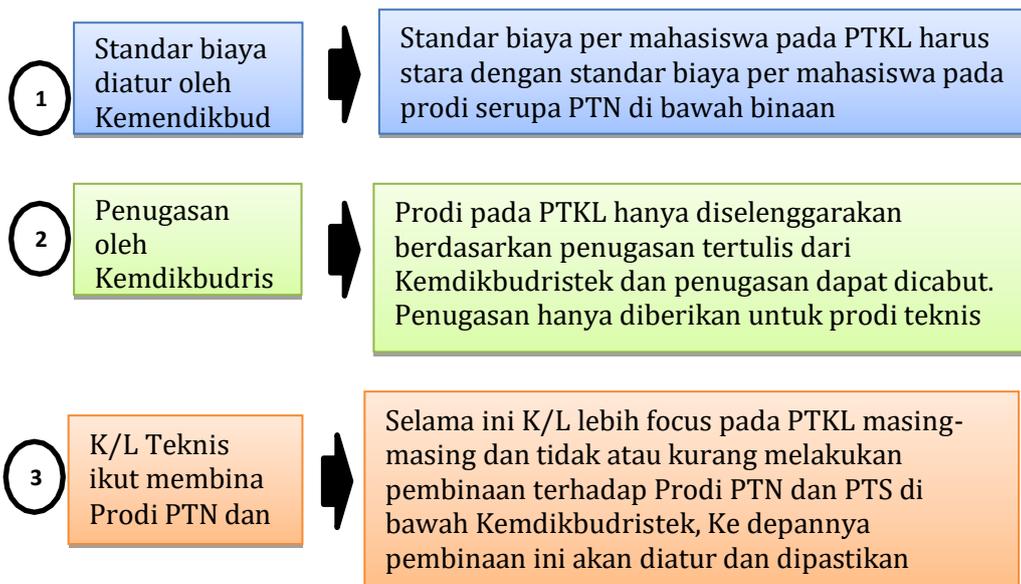
Perluasan mandat tersebut berimplikasi pada beberapa aspek, diantaranya: penyesuaian program pendidikan (program studi), sistem kurikulum, pola dan metode pembelajaran, riset yang diselenggarakan, peran dalam masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Beberapa aspek dimaksud harus dipersiapkan dengan baik dan menyeluruh oleh penyelenggara pendidikan tinggi vokasi.

Kurikulum merupakan *softskill* yang menjadi pijakan dan arah dalam mengimplementasikan program yang terdiri dari seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus dan berbasis vokasi (penerapan teknologi tepat guna). Kurikulum pada pendidikan tinggi vokasi memiliki ciri khas terkait dengan implementasi antara teori dan praktik dengan perbandingan 70% praktik dan 30% teori (Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016).

Output dari implementasi pendidikan tinggi vokasi bidang kepariwisataan (PTNP)

Kebijakan RPP PTKL dan LPNK

Persyaratan Kemdikbudristek untuk penyelenggaraan PTKL non-Kedinasan



Praktinya dalam pembelajaran vokasional Abad XXI sudah saatnya dirancang, dikembangkan dan dilaksanakan untuk merespon era disrupsi. Kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan era disrupsi. Era disrupsi membutuhkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, memecahkan masalah-masalah yang semakin kompleks melalui *project-based learning*, *problem-based learning*, *inquiry*, *discovery*, dan *cooperative-learning*. Pembelajaran yang memberi pengalaman nyata terhadap penguasaan kompetensi-kompetensi yang efektif digunakan dimasa depan dan penunjang pengembangan karir profesi saja yang dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang memiliki nilai investasi masa depan (Sudira, 2018).

Semua kurikulum di semua jenjang D3 maupun D4 di PTKL menerapkan 70% praktik yang berorientasi pada aspek tujuan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementrian dan bahkan melebihi standar yang dipersyaratkan oleh Kemdikbudristek dengan masing-masing menetapkan Indikator Kinerja Tambahan (IKT). Salah satunya di Kemenparekraf, menetapkan standard pencapaian yang melebihi SN Dikti yang tujuan utamanya telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisata dan menetapkan penunjuk implementasi program vokasinya melalui kurikulum (RI, 2009).

Harmonisasi Pelaksanaan Tata Kelola Perguruan Tinggi Bidang Pariwisata

a. Pendidikan Vokasi di Kemdikbud dan Ristek

Akselerasi peningkatan kualitas pendidikan vokasi perlu dilakukan dengan pertimbangan aspek yang dapat meningkatkan kualitas sekolah vokasi sekaligus dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja khususnya pada jenjang operasional pelaksana, namun disayangkan, data BPS menunjukkan masyarakat berpendidikan SMK menyumbang angka pengangguran tertinggi sebesar 11,2 persen per Agustus 2018 (BPS, 2019). Data diatas sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa perguruan tinggi vokasi memiliki fungsi yang sama dengan perguruan tinggi non-vokasi sebagai penyalur ilmu untuk masyarakat (Herawati & Ulum, 2020).

Perguruan Tinggi vokasi yang unggul mampu berupaya melakukan langkah-langkah kongkrit dalam penguatan konsep *link and match* yang belum mampu diterapkan sepenuhnya di perguruan tinggi non-vokasi. Data perguruan tinggi sebagai acuan pembandingan antara jumlah Politeknik dengan Universitas di Indonesia dikutip dari sumber Iktisar data pendidikan 2018 dilingkungan Kemdikbud Ristek yakni: Politeknik 199 terdiri dari 43 Negeri dan 156 Swasta, jumlah mahasiswa 239.282 terdiri dari 156.461 Negeri dan 89.821 Swasta. Dibandingkan dengan data Universitas 563 terdiri dari 63 Negeri dan 500 Swasta, jumlah mahasiswa 1.038.811 terdiri dari 481.611 dan 557.200. Data ini menunjukkan bahwa perbandingan perguruan tinggi vokasi dan perguruan tinggi non-vokasi sangat jauh berbeda begitu pula jumlah mahasiswanya. Jikadiasumsikan, 40 persen luaran universitas masuk ke dunia kerja dengan minim keterampilan, maka akan menghasilkan *produk high cost*.

Hasil riset McKinsley Global Institute (MGI) memaparkan bahwa sampai dengan tahun 2030 Indonesia akan menjadi barometer ekonomi dunia dengan kebutuhan 113 juta tenaga kerja terampil. Sedangkan tenaga kerja terampil yang tersedia baru 57 Juta (*Antara April, 2017*). Diperkuat oleh Menaker M.Hanif Dhakiri, selain kekurangan tenaga kerja terampil, mayoritas angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan non-vokasi. Sumber daya manusia yang terampil merupakan aset utama bagi perusahaan karena aset SDM merupakan penggerak model pembaruan strategik dan inovasi baik sebagai penelitian laboratorium, melakukan pola rekonstruksi maupun pembaruan keterampilan kompetensi terkhusus keterampilan digital sebagai salah satu tuntun perusahaan di era industri 4.0.

Perguruan Tinggi Kementerian Lain khususnya bidang Kepariwisata sejak 90-an sudah mempersiapkan lembaga pendidikan bidang keahlian tertentu baik untuk memenuhi kebutuhan internal Kementerian Lembaga/Instansi yang bersangkutan maupun industri dengan sumber daya yang sangat memadai guna mencetak sumber daya manusia yang memiliki sikap kerja, keterampilan dan pengetahuan sesuai standar industri baik skala nasional maupun Internasional. Antisipasi dari PTKL sebagai pengelola Perguruan Tinggi cukup menghasilkan buah yang positif dimana luarannya dapat kita lihat sekarang sudah bekerja menduduki level pimpinan menengah keatas diprusahaan didalam maupun luar negeri khususnya bidang Kepariwisata. Harmonisasi eksistensi peran pengelolaan perguruan tinggi dalam membantu Kemendikbud Ristek sebagai penyelenggara Perguruan Tinggi menjawab tantangan untuk dapat mengisi

angkatan kerja terampil yang memiliki kompetensi baik standar nasional maupun standar Internasional yang sudah dipersiapkan oleh masing masing PTKL sesuai program studi keahlian masing masing.

b. Pendidikan Vokasi di Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL)(digambarkan dari hasil benchmarking di Poltekes, Unhan, PPP Bogor, STIA LAN, PPI Curug, PKN STAN)

a. Kurikulum

1. Politeknik Kesehatan provinsi NTB

Dalam pelaksanaan pendidikan, Politeknik Kesehatan (Poltekes) provinsi NTB yang ada di bawah Kementerian Kesehatan mengedepankan *Centre of Excellence/* keunggulan dari perguruan tingginya yakni dalam kajian dan penanganan *Stunting* sehingga menjadi daya tarik dalam bersaing dengan perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristekdikti. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kebutuhan dan pentingnya pengadaan pendidikan yang ada di bawah Kementerian Kesehatan yang berbeda dengan pelaksanaan pendidikan kesehatan di bawah naungan Kemendikbudristekdikti. Selain itu, Politekes provinsi NTB lebih menekankan keluarannya/ lulusan yang sudah siap bekerja di pusat pelayanan masyarakat. Dimana dalam program pendidikannya, dalam pelaksanaan Komunitas Kegiatan Mahasiswa (KKM), difokuskan dan dilakukan pada pusat pelayanan masyarakat yakni melalui PUSKESMAS yang ada di seluruh provinsi NTB.

Mengacu pada opsi ke-3 dari RPP PTKL untuk bergabung dengan perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristekdikti seperti UNRAM, menjadi suatu kendala terkait dengan penerapan kurikulum atau pun pelaksanaan pendidikan yang ada. Hal ini dikarenakan parameter dan regulasi yang berbeda antara kedua perguruan tinggi terkait dengan pendidikan kesehatan, khususnya untuk analis dan program kebidanan.

2. Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor

Pelaksanaan pembelajaran di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor menerapkan program praktik dengan komposisi 70% sedangkan teori sebanyak 30%. Dalam penyusunan mata kuliah pada masing-masing program studi, berpedoman pada SKKNI dan disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan di lapangan yang merupakan kondisi real di bidang pertanian. Seperti halnya PTKL lainnya pelaksanaan dan keberadaan dari PPP Bogor ini didasarkan oleh kebutuhan atas sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pertanian sehingga dapat memenuhi target ketahanan pangan nasional melalui program pertanian serta dapat mendukung kualifikasi dan jenjang karir bagi ASN. Demi mengakomodir kedua kebutuhan ini, maka PPP Bogor membuka 2 jalur penerimaan yakni jalur khusus ASN dan jalur umum. Dengan adanya jalur umum, maka masyarakat dari golongan ekonomi ke bawah yang berasal dari keluarga buruh tani atau pun petani dapat berkesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Terkait dengan

keterlibatan Kemendikbudristekdikti dalam pelaksanaan pendidikan di PPP Bogor adalah pengembangan kurikulum dan jenjang karir dosen. Dimana Kemendikbudristekdikti ikut dalam penyusunan pedoman dan aturan-aturan yang diterapkan dalam system pendidikan di PPP Bandung.

3. PKN STAN

Seperti halnya PTKL lain, pelaksanaan pendidikan pada PKN STAN berdasarkan dari rasi 70% praktik dan 30% teori yang cakupannya dituangkan dalam RPS sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Mata kuliah praktikum ditujukan untuk mata kuliah inti, magang, dan sertifikasi bagi lulusan. Beberapa program pendidikan yang dilaksanakan PKM STAN menyesuaikan dengan permintaan atau kebutuhan dari Pemda, yakni melalui program diklat, kelas khusus, latihan atau bimbingan terknis yang mana merupakan BLU dengan penarikan sesuai aturan keuangan negara.

Selain program BLU, terdapat pula program pembibitan, dimana pada pola pembibitan bertujuan untuk mendidik calon yang berasal dari SMA, dimana pemerintah daerah memilih calon dari daerahnya masing-masing yang kemudian direkomendasikan untuk mengikuti seleksi masuk PKM STAN. Dalam hal ini pemerintah daerah berperan dalam mengusulkan formasi atau jumlah SDM yang direkomendasikan atau diminta untuk mengikuti perkuliahan di PKM STAN. Setelah usulan diterima, maka

PKM STAN menyiapkan pola pendidikan yang sesuai untuk program tersebut.

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Politeknik Kesehatan provinsi NTB

Terkait dengan jenjang karir, lulusan Poltekes masih menjadi prioritas di beberapa dinas kesehatan atau pun institusi kesehatan lainnya. Dalam pemilihan tenaga kerja, industri di bawah pemerintah maupun swasta lebih memilih lulusan dari Poltekes dibandingkan dari perguruan tinggi swasta. Hal ini tidak terlepas dari keahlian dan pengalaman kerja dari mahasiswa yang sebelumnya telah ditempatkan di beberapa instansi kesehatan atau pelayanan masyarakat. Dalam pemenuhan SDM sendiri, dirasakan Poltekes cukup mengakomodir kebutuhan dunia kerja, hal ini ditunjukkan oleh keberadaan dari Poltekes yang berjumlah 38 tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan 504 program studi yang dibackup penuh oleh Kementerian Kesehatan.

Poltekes di provinsi NTB sendiri, telah memiliki program profesi *Nurse*, yang mencakup program paket Diploma 4 selama 4 tahun dan profesi selama 1 tahun. Khusus untuk profesi memiliki program studi yang terpisah dengan program studi lainnya. Hal ini demi mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran dan manajerial di dalam program pendidikan tersebut.

2. Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor

Sebagian besar lulusan dari PPP Bogor telah memiliki pekerjaan, dan khusus ASN memiliki jenjang karir dan kualifikasi yang lebih baik dari sebelumnya. Berdasarkan hasil tracer study, menunjukkan bahwa alumni dapat memperoleh pekerjaan kurang dari 3 tahun setelah mereka lulus dari PPP Bogor. Sementara untuk kualitas dosen, ditinjau dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, penelitian terapan dan PKM yang dilakukan berupa pembinaan desa mitra dan pendampingan program Kementerian Pertanian. Banyak dari publikasi yang telah diterbitkan oleh dosen – dosen pada jurnal nasional maupun internasional bereputasi. Selain itu, beberapa modul mata kuliah praktik yang digunakan merupakan hasil pengembangan atau penelitian dosen.

3. PKN STAN

Dalam pelaksanaan pendidikan di PKN STAN, perekrutan dilakukan melalui 3 jalur yakni jalur regular (umum) dengan merekrut mahasiswa lulusan SMA yang kemudian ditempatkan di kementerian keuangan atau instansi keuangan di kementerian lain atau pemda setelah menyelesaikan pendidikan di PKN STAN. Program kedua adalah program tugas belajar, dimana ASN yang bekerja di instansi pemerintahan melanjutkan kembali pendidikannya misalnya dari jenjang pendidikan D3 ke D4, yang kemudian kembali ke unit tempat mereka bekerja setelah menyelesaikan pendidikan di PKN STAN. Kedua program tersebut menggunakan dana APBN.

Sedangkan program terakhir adalah program ketiga merupakan program yang bersumber dari BLU dengan tarif sesuai ketentuan kementerian keuangan. Kegiatan dalam program ke-3 ini berupa kelas khusus PEMDA, diklat, pelatihan atau pun bimbingan teknis dengan materi menyesuaikan pada kebutuhan yang diharapkan oleh pemda atau unit pemerintahan tersebut.

Kontribusi alumni di unit penempatan dinilai memuaskan alumni ditempatkan di instansi Pemerintah baik di pusat maupun daerah Terkait dengan lulusan, Institusi utama penerima mahasiswa PKN STAN adalah Kementerian Keuangan lalu sejak tahun 2016, dibuka penempatan ke K/L dan Pemda. Terkait dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pelaksanaan pendidikan di PKN STAN dilakukan dalam bentuk pendidikan reguler, bahan ajar oleh disusun dan dikembangkan dosen PKN STAN. Output dari pelaksanaan penelitian umumnya dalam bentuk jurnal Substansi dan InfoArtha serta konferensi inernasional ICOPSA Tahun 2019, sedangkan pengabdian masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Mahasiswa ke Desa di Banten dan Bogor, serta UMKM seluruh Indonesia.

c. Tata Kelola Bidang Akademik dan Umum

1. Politeknik Kesehatan provinsi NTB

Terkait dengan tenaga pengajar dan dosen di Poltekes provinsi NTB, dalam pelaksanaannya telah melakukan kesepakatan bersama dengan Kemendikbud ristekdikti yang dituangkan dalam SK alih bina. Dimana dalam pelaksanaan pendidikan dan akreditasi dan SDM dosen menjadi

urusan dan tanggung jawab sepenuhnya dari Kemendikbudristekdikti sedangkan operasional pendidikan ditanggung dan diatur oleh Kementerian Kesehatan. Seluruh asset dari poltekes merupakan PMBP dengan pertimbangan kondisi masyarakat sekitar yang berasal dari kalangan ekonomi ke bawah. Poltekes yang ada di bawah kementerian Kesehatan sendiri memiliki asosiasi yang mengakomodir dan menjadi perwakilan dalam mempertahankan kondisi perguruan tinggi yang merupakan penyelenggara pendidikan di luar Kemendikbudristekdikti.

2. Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor

Dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan PPP Bogor, pelaksanaan kegiatannya telah disertai dengan roadmap yang diarahkan pada:

- 1) Peningkatan kualitas lulusan dengan *employability* dan *entrepreneurship* sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan swasta
- 2) Peningkatan produktivitas penelitian terapan dan publikasi
- 3) Peningkatan Kebermanfaatan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4) Penguatan Sistem Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama ke arah *Good University Governance*
- 5) Peningkatan, Penguatan Kapasitas, dan Rekognisi Tenaga Pendidik Berbasis Pendidikan Terapan.
- 6) Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Tenaga Kependidikan
- 7) Peningkatan Sumber Daya Anggaran Berbasis Tridharma Perguruan Tinggi

- 8) Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana modern berbasis teknologi informasi

3. PKN STAN

Berbeda halnya dengan PPP Bogor maupun PTKL lainnya. Roadmap pengembangan dan tata kelola di PKN STAN difokuskan dalam 3 aspek utama yakni Pengembangan infrastruktur, kurikulum, dan SDM. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kualitas SDM yang sesuai dengan standar/kualifikasi yang dibutuhkan di pemerintahan. Dalam tata kelola perguruan tinggi, PKN STAN bekerja sama dengan PAN RB dalam penyediaan kebutuhan SDM di bidang keuangan yang siap bekerja di unit pemerintahan yang ada.

Telaah analisis regulasi PTKL Bidang Pariwisata Berdasarkan Peraturan Perundang undangan

1. Masalah Regulasi Kelembagaan Kemnedikbud Ristek dengan PTKL (Pembahasan KPK)

Regulasi Relevansi dengan Pendidikan PTKL	Permasalahan Regulasi PTKL	Regulasi Relevansi dengan Peng. SDM Kepariwisataaan	Permasalahan Regulasi Kelembagaan SDM Bidang Kepariwisataaan
UU 20. Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	<p>Ps. 29</p> <p>1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen;</p> <p>2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen;</p> <p>3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal;</p> <p>4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.</p>	UU No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan	<p>Pelatihan Sumber Daya Manusia</p> <p>Pasal 52 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Standardisasi dan Sertifikasi</p> <p>Pasal 53 1)Tenaga kerja di bidangkepariwisataan memiliki standar kompetensi. 2)Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. 3)Sertifikasikompetensi dilakukan oleh lembagasertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan</p>

			ketentuan peraturan perundang-undangan.
PP No.14 Tahun 2010 tentang Pendidikan kedinasan	<p>Sebagai turunan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengatur lebih lebih detail tentang pendidikan kedinasan sesuai dengan yang tercantum dalam UU Sisdiknas yaitu Pendidikan kedinasan bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta Didik dalam bidang keahlian tertentu agar mampu meningkatkan kinerja pelaksana tugas pada KL dan LPNK. Program ini hanya menerima peserta Didik pegawai negeri atau calon Pegawai Negeri</p> <p>Ps. 18 dalam PP ini menyebutkan pendirian satuan pendidikan kedinasan berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan proyeksi tenaga ahli dalam bidang keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh KL/LPNK</p>	PP No 50 Tahun 2011 Tentang RIPPARNAS	<p>Pasal 60 Pembangunan SDM Pariwisata , meliputi:</p> <p><i>a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah; dan</i></p> <p><i>b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.</i></p> <p>Pasal 64 Strategi untuk Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, meliputi:</p> <p><i>a.meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata;</i></p> <p><i>b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan; dan</i></p> <p><i>c.meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi.</i></p>
UU No.12 Tahun 2012 tentang	Pasal 95: Mengamanatkan penyusunan Peraturan	PP No 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi	Pasal 15 (1) Harmonisasi dan pengakuan

<p>Pendidikan Tinggi</p>	<p>Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain (PTKL) sejak saat itulah istilah Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) bergeser menjadi PTKL;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per penelitian dibuat akhir tahun 2018 PP dimaksud belum ada dan pendirian PTKL bar uterus berlanjut. 	<p>Usaha dan Sertifikasi Kompetensi</p>	<p>Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d yang dilakukan antar kelembagaan dan/atau antar negara baik bersifat bilateral maupun multilateral harus ditujukan untuk membangun pengakuan terhadap Kompetensi pemegang Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata.</p> <p>(2)Harmonisasi dan pengakuan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisatasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.</p>
<p>PP No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p>	<p>Pasal 1 Ketentuan Umum : Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi oleh Menteri untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.</p> <p>Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi oleh Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.</p>	<p>Peraturan Presiden RI No 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataa</p>	<p>Pasal 11 Hubungan kerja Tim Koordinasi Kepariwisataa bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing masing kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan kepariwisataa</p>

	<p>Otonomi Perguruan Tinggi Pasal 22</p> <p>(1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.</p> <p>(2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi: PTN,PTN Badan Hukum; dan PTS.</p> <p>(3) Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: pendidikan,penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. otonomi di bidang nonakademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: organisasi, keuangan . keuangan,kemahasiswaan,ketenagaan dan sarana prasarana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
--	--	--	--

Sumber : di adopsi dari Jurnal KPK dan Regulasi relevan dengan SDM Pariwisata 2021

Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) yang selanjutnya disebut PTKL (Perguruan Tinggi Kementerian Lain) baik Kementerian Lembaga maupun Lembaga Pemerintah non Kementerian pada awalnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal Kementerian Lembaga/Instansi yang bersangkutan (Selawati,2020).Menelaah regulasi diatas dan dikaitkan dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang tata kelola PTKL, fungsi PTKL sudah bergeser, namun disatu sisi, tidak mempertimbangkan sisi lain dari pergeseran arah fungsi PTKL di Indonesia mengikuti irama kemajuan dan kebutuhan pasar pengguna yang berlangsung sebelum regulasi *UU No 20 tahun 2003* tentang Sistem Pendidikan Nasional.Hampir semua PTKL membuka program studi untuk kebutuhan masyarakat industri selain yang dibutuhkan internal kementerian.Pihak industri menuntut dibukanya program studi sesuai kebutuhan industri dilingkungan kementeriannya dimanahubungan koordinasinya sangat dekat dibanding penyelenggara pendidikan di Indonesia.Hal ini untuk menjawab tantangan daya saing kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dalam mengisi angkatan kerja yang sangat mendesak didukung ijin pembukaan oleh penyelenggara Pendidikan Nasional dan di akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Berdasarkan permasalahan relevansi regulasi diatas, PTKL dibawah Kemenparekraf sudah banyak melahirkan alumni berprestasi baik bekerja di Industri pariwisata dalam maupun luar negeri, banyak pula alumninya yang bekerja sebagai birokrat di Kemenpaekraf dan tersebar di perguruan Tinggi pariwisata di Jawa dan Bali semenjak kehadiran Sekolah Tinggi Pariwisata

Bandung (berdasarkan Keputusan Presiden No 101 Tahun 1993) yang membuka program Diploma IV Perhotelan, Perjalanan Wisata dan Destinasi Pariwisata.

Kontribusi lain terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui devisa negara, kesemua ini didukung dengan sikap, keterampilan dan pengetahuan SDM yang memiliki kompetensi baik berstandar nasional maupun standar Internasional. Meskipun dalam regulasi UU No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata telah mengatur tentang pelatihan Kompetensi kerja Kepariwisata pada pasal 52 dan 53 hal ini belum cukup karena diperkuat dengan Perpres No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi kerja yang menuntut bahwa semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja pariwisata harus memiliki kemampuan, kompetensi sampai dengan level 9 atau setara dengan Doktoral jalur akademik dan doktor tarapan di jalur vokasi, hal ini memperkuat Kementerian Pariwisata dimasa itu untuk membuka program jalur Perguruan Tinggi vokasi.

Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2010 tentang pendidikan kedinasan sudah tidak relevan pelaksanaannya dimasa sekarang karena tidak dapat diterapkan kepada semua kementerian Negara yang memiliki kekuatan fungsi organisasi birokrasi berbeda, yang juga mampu melaksanakan pelayanan publik pada pendidikan bidang keahlian tertentu. Fungsi birokrasi dibidang pendidikan hendaknya tidak didekotomikan pengelolaannya karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat untuk mendapatkan hasil hasil pelayanan publik yang efektif dan efisien, sejalan pendapat bahwa tantangan besar yang dihadapi birokrasi adalah bagaimana mereka mampu melaksanakan kegiatan secara efisien dan efektif (Cordella & Tempini, 2015).

Dalam Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata mengamanatkan pada Pasal 60 bahwa Pembangunan SDM Pariwisata, meliputi: *SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah; dan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat*. Hal ini juga diperkuat pada RENSTRA Kemenparekraf Tahun 2020 -2024 bahwa Pendidikan dan pelatihan vokasi yang dilakukan akan mampu menghasilkan SDM yang siap bekerja sesuai bidang keahliannya.

Dalam UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 95: Mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain (PTKL) sejak saat itulah istilah Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) bergeser menjadi PTKL. Ada beberapa aspek pertimbangan tidak mudah Rancangan PP PTKL menjadi Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Kementerian Lain ini diundangkan yakni : a) Pengelolaan akademik, b) pengelolaan SDM, c) Pengelolaan sarana dan prasarana, dan d) pengelolaan anggaran. Hal ini dikarenakan pengelolaan perguruan tinggi negeri jalur vokasi yang sudah ada masih belum mampu menjawab tantangan daya saing tenaga kerja regional ASEAN khususnya bidang pariwisata. Pendapat ini diperkuat oleh pengurus Asosiasi profesi General manager Sulawesi Selatan, Bapak Joko Budi, yang menyatakan bahwa Hotel Aston Makassar menerima alumni dari perguruan tinggi negeri yang berbeda namun kenyataan dilapangan masih dapat diandalkan kompetensinya adalah alumni dari Perguruan Tinggi dibawah Kemenparekraf.

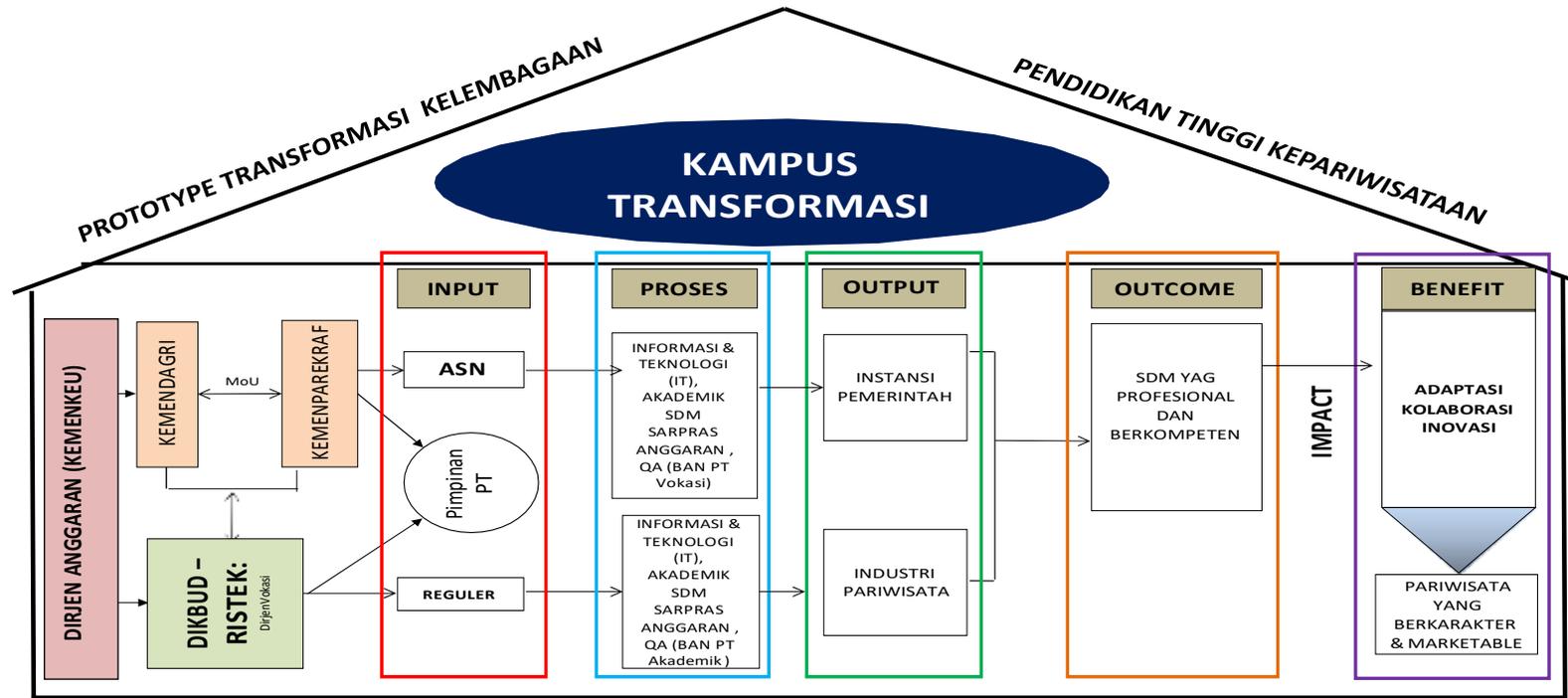
Selanjutnya PP No 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Pasal 15, Harmonisasi dan Pengakuan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d yang dilakukan antar kelembagaan dan/atau antar negara baik bersifat bilateral maupun multilateral harus ditujukan untuk membangun pengakuan terhadap Kompetensi pemegang Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata. Sejalan pengakuan industri pariwisata bahwa luaran Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata PTNP sudah mampu menjawab standar kompetensi kerja nasional SKKNI bahkan sudah dapat pengakuan dari regional ASEAN, dibuktikan dengan dilakukannya sertifikasi skema akupasi ASEAN oleh LSP Pariwisata pihak ketiga.

Berdasarkan gambaran regulasi PP No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dalam ketentuan umum menyebutkan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi oleh Menteri untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Fungsi diatas sudah dilakukan oleh Kemendikbud Ristek sebagai salah satu fungsinya yakni memimpin dan mengoordinasikan dua hal yakni Pertama adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, kemudian kedua penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).Hal ini tertuang dalam pasal 1 Perpres Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dalam ketentuan umum dijelaskan pula bahwa pengelolaan pendidikan dapat pula dilakukan oleh pemerintah dan Lembaga lain dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang perlu dikerjakan bersama dengan model kolaborasi terstruktur. PP No 4 Tahun 2014 Pasal 1 Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi oleh Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kementerian Lain sebagai fungsi pengorganisasian dapat pula mengelola Perguruan Tinggi untuk kebutuhan pemerintah, pemerintah daerah dan Industri Pariwisata dalam bidang keahlian tertentu agar mampu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pariwisata.

Sehingga secara khusus hasil penelitian dapat tergambar dalam bentuk prototype yang memberikan ruang bertransformasi dalam pengelolaan pendidikan antara Kemendikbudristek dan Kemenaker atau PTKL sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam mencerdaskan anak bangsa.

Prototype Kampus Transformasi



Penjelasan Prototype:

Gambar Prototype Kampus Perubahan Kolaborasi Kemendikbud Ristek dengan PTKL diatas sebuah temuan sederhana yang

dapat dijadikan alternatif pilihan dalam kisruh penyelenggaraan pendidikan oleh Kemendikbud Ristek dan pengelolaan pendidikan oleh PTKL. Peneliti menggunakan pendekatan analisis Input sampai dengan benefit, dimana sebuah Perguruan Tinggi tidak dapat dikelola oleh satu lembaga dengan luas jangkauan geografis dan bentuk disiplin ilmu yang sangat variatif baik jalur Akademik, Perofesi maupun Vokasi dengan program studi khusus. Solusi dengan satu sumber anggaran dapat disediakan oleh negara dengan tujuan yang sama yakni mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Kemendikbud Ristek dapat berkolaborasi dengan PTKL dalam merekrut baik ASN maupun masyarakat umum untuk mendapatkan pendidikan yang sama melalui suatu proses manajemen pendidikan yang sudah berjalan dengan ketersediaan sumber daya manusia, Sarana dan prasaran, proses akademik (kurikulum) Merdeka Belajar Kampus Merdeka , anggaran dan sistim tehnologi pembelajaran yang mampu menjawab era industri 4.0, apabila semua ketersediaan indikator diatas berjalan dengan baik khususnya ketersediaan anggaran yang lebih untuk menghasilkan output yang siap kerja khususnya bidang vokasi yang sangat berbeda dengan pendidikan jalur Akademik. Hasil output baik tenaga terampil bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat umum mampu mendapatkan pekerjaan yang cepat dengan hasil outcome SDM yang profesional dan berkompeten. Sehingga negara kita dapat menghasilkan benefit manusia manusia yang inovatif, adpatif dan kolaboratif dalam

membangun Negara dan Bangsa khususnya bidang kepariwisataan yang akan berdampak kepada berkurangnya pengangguran.

Kemendikbud ristek berperan besar dalam membuat roadmap pendidikan jalur vokasi yang bersifat khusus yang akan dibuka oleh PTKL sekaligus sebagai alat kontrol penjaminan mutu Perguruan Tinggi dengan membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi bidang Vokasi yang bersifat khusus bagi program studi yang ada di PTKL.

1. Kamus Transformasi, merupakan kampus yang mengharmonisasi kebijakan Pendidikan antara Kemdnuikbudristek dengan Kemenparekraf. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang kerja kementerian.
2. Input, terdapat unsur ASN (pengembangan kompetensi sesuai tugas OPD) dan Regular (mahasiswa yang berasal dari input SMA/MA/SMK). Tata Kelolanya PTKL dan Kemendikbudristek quality assurance (QA)
3. Proses, meliputi sesuai dengan kurikulum PTKL dan Kemdikbudristek
4. Output, Instansi pemerintah beorientasi pemenuhan kompetensi ASN di OPD bidang kepariwisataan atau Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Outcome, Kampus transformasi menghasilkan SDM bidang kepariwisataan yang berkompeten

6. Benefit, Kampus transformasi membangun destinasi melalui OPD dan industri kepariwisataan yang relevan dan sustainable.

2. Model Kolaborasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL) Bidang Kepariwisata

Model kolaborasi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi dapat menjadi bagian dari perwujudan pelaksanaan harmonisasi pengelolaan Perguruan Tinggi Vokasi yang bertujuan untuk meningkatkan luaran sesuai kebutuhan industri atau dengan kata lain bahwa perguruan tinggi yang dikelola bersama dengan dasar teori yang dalam model Triple Helix oleh Etzkowitz dan Leydesdorff dapat menunjukkan hasil yang lebih baik dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai. Mekanisme kolaboratif yang efektif dan didukung alokasi sumber daya dari banyak pemain yang berbeda di seluruh pemerintah, sektor swasta dan nirlaba, pemimpin masyarakat dan lainnya diperlukan (Henton, Melville, Amsler, and Kopell 2005)

Namun disayangkan bahwa kriteria penilaian Perguruan Tinggi Vokasi dalam kriteria penilaian BAN PT disamakan dengan Perguruan Tinggi non Vokasi yang memiliki spesifikasi yang berbeda, meskipun demikian BAN PT sudah merubah Kriteria penilaian Akreditasi dari 7 instrumen kriteria menjadi 9 kriteria sejak tanggal 1 April 2019 dimana kriteria 7 dibagi menjadi Penelitian dan Pengabdian masyarakat dan tambahan kriteria lainnya yakni hasil luaran atau capaian Tridarma Perguruan

Tinggi. Tujuan dan fungsi utama perguruan tinggi non vokasi dan vokasi menyalurkan ilmu untuk masyarakat, namun Perguruan Tinggi Non Vokasi mencetak intelektual sebagai pemikir yang mampu memecahkan masalah, sedangkan Perguruan Tinggi Vokasi mencetak insan yang memiliki sikap kerja, keterampilan dan pengetahuan yang mampu diterapkan/diaplikasikan saat selesai studi dalam satu kelompok akupasi. Di Indonesia belum ada Badan Akreditasi Perguruan Tinggi bidang teknis Perguruan Tinggi Kementerian Lain seperti bidang Pariwisata yang mampu menilai secara spesifik dengan menggunakan instrumen kriteria khusus bidang vokasi. Ketika masalah multipandang dan resisten terhadap definisi teori, maka tata kelola kolaboratif adalah pendekatan yang dapat memungkinkan dalam berbagai perspektif, termasuk penolakan masalah, untuk dibawa dalam mendapatkan solusi (Eppel 03 : 2013)

Mengadaptasi berbagai model kolaboratif pemerintahan, maka peneliti merumuskan Prototype model kolaborasi yang menjadi temuan dalam penelitian yang sekaligus dapat menjadi arah kebijakan pelaksanaan guna menata kembali Perguruan Tinggi Vokasi pada kementerian lain yang berkolaborasi dengan penyelenggara pendidikan Nasional dengan tujuan yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana pendapat bahwa Konsep manajemen publik kolaboratif digunakan dalam menjelaskan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, kolaborasi antara berbagai organisasi di

seluruh lini yurisdiksi dan sektoral, dan kerja sama dengan warga negara swasta dan asosiasi lingkungan (*Kapucu 02 : 2010*)

Temuan prototype sebagaimana pada gambar Nodibawah dapat digambarkan sebuah transformasi tata kelola perguruan Tinggi vokasi yang ideal setidaknya dapat mengakomodir baik kepentingan masyarakat maupun untuk kelembagaan sebagai penyelenggara dan pengelola pendidikan tinggi sesuai yang diamanatkan dalam PP No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Konsep manajemen publik kolaboratif sebagai proses membantu dan mengelola pengaturan multi-organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak mudah diselesaikan oleh organisasi saja.

3. Siklus Implementasi Model Kolaborasi

Adapun pelaksanaan Alternatif Transformasi Pengelolaan PTKL Bidang Pariwisata:

1) Kampus Pendidikan Kedinasan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sebuah perguruan tinggi vokasi harus mampu mendidik tenaga terampil yang mampu bekerja sesuai kompetensi jabatan peserta didik khususnya Aparatur Sipil Negara yang akan memegang jabatan sebagai regulator dan fasilitator di instansi pemerintah. Adapun penetapan jabatan ASN dilakukan melalui mekanisme langkah langkah dalam perencanaan Sumber

Daya Manusia, adapun analisis jabatan dan design adalah suatu proses yang mempelajari pola pola aktivitas untuk menentukan tugas,kewjiban dan tanggung jawab yang diperlukan oleh masing masing jabatan (Hanggraeni 27 :2012) Adapun Tujuan analisis jabatan untuk mengumpulkan informasi informasi tentang aktifitas kerja, peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan standar kinerja. Lembaga Pendidikan dan pelatihan bagi ASN sesuai PP No 101 tahun 2000 adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi dengan keperibadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi bekerja sebagai jabatan fungsional ataupun struktural berbeda dengan pendidikan keterampilan yang didapatkan oleh mahasiswa yang akan bekerja sebagai tenaga kerja terampil di Industri Tujuan Pendidikannya sama namun metode dan model pembelajarannya berbeda.

Pendidikan dan pelatihan vokasi yang sudah ada akan mampu menghasilkan SDM yang siap bekerja sesuai bidang keahliannya.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi persyaratan jabatan, namun saat ini tidak demikian lagi adanya, kemampuan ASN bekerja harus dibekali dengan keterampilan

manajerial, kemampuan skill operasional dan sikap integritas tinggi agar terjadi keseimbangan antara kemampuan ASN sebagai pelayan masyarakat dan fasilitator dengan kompetensi yang dimiliki konsumen yang dilayani.

Perguruan Tinggi Vokasi bidang pariwisata melakukan proses belajar mengajar menyesuaikan kriteria yang telah ditetapkan

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditunjang dengan Tatakelola pendidikan tinggi yang bermutu

memiliki SDM yang handal sesuai kompetensi, fasilitas praktik berbasis digital. Daming sebagai Guru Mutu internasional mengungkapkan bahwa kemampuan SDM harus terus ditingkatkan agar mutu kinerja tetap terjamin, dalam jabatan merupakan bagian dari sistem pemberdayaan SDM, (Tampubolong 43 : 2001).

Sumber daya manusia ASN yang unggul dapat terwujud apabila dikelola oleh perguruan tinggi yang bermutu, perguruan tinggi yang bermutu akan menghasilkan luaran yang unggul, namun ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan apabila Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) menjadi yang bermutu. Tidak benar yang bermutu itu mahal karena menurut Daming Tokoh manajemen mutu dunia mengatakan bukan yang bermutu yang mahal, namun justru yang tidak bermutu

yang mahal karena barangnya cepat rusak tenaga dan waktu terbuang percuma sehingga apabila ditotalkan akan menjadi mahal. Apabila mutu sistem dan proses sudah baik maka produk pasti baik (Stompubolong 43 : 2001) . PTK dapat dibedakan menjadi dua yakni : Perguruan Tinggi Kedinasan Ikatan Dinas dan Perguruan Tinggi Kedinasan non ikatan dinas Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) ikatan dinas memiliki beberapa keunggulan ketika kuliah pada umumnya dibebaskan dari biaya kuliah dan ketika lulus dapat langsung menjadi ASN, namun kekurangannya jika tidak mencapai nilai maksimal atau tidak memenuhi ikatan dinas maka akan mengembalikan semua dana selama pendidikan. Sistem ini yang menjadikan Perguruan Tinggi Kedinasan PTK menjadi lembaga pendidikan yang eksklusif dan alumninya biasa berkelompok bekerja pada instansi tertentu, bidang tertentu dan level jabatan tertentu sehingga keluar sedikit dari objektivitas sesuai standar kriteria kinerja yang sudah ditetapkan dan permainan nepotisme tak terhindarkan.

2) Kampus Transformasi peserta didik ASN + masyarakat Industri

Paradigma Perguruan Tinggi terus mengalami perubahan mengikuti Era industri 4.0, seiring pertumbuhan dan peningkatan kebutuhan industri pariwisata akan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dibidang pariwisata baik sumber peserta didik

dari ASN maupun masyarakat pada umumnya yang melakukan kuliahnya dikampus transformasi dengan tujuan untuk menerapkan progam yang lebih efektif dan efisien dalam tata kelola Perguruan Tinggi.

Dikotomi perguruan tinggi hendaknya sudah dihindari. Kemerdekaan belajar individu untuk menghasilkan manusia unggul hendaknya keluar dari kampus transformasi yang lebih memfokuskan manusia trampil yang merdeka belajarnya dijamin oleh pemerintah dan Undang Undang ketimbang keluaran dari perguruan tinggi yang melembaga hanya menghasilkan luaran Aparatur Sipil Negara semata sehingga terjadi penyekatan kemerdekaan belajar bagi masyarakat.

Perguruan tinggi yang mendidik input dua sumber peserta didik dari ASN maupun masyarakat akan lebih kompetitif bagi peserta didik untuk memilih karena lokasi kampusnya juga tersebar diseluruh penjuru republik Indonesia, tidak terpusat seperti kondisi yang ada sekarang sebagian besar Sekolah Kedinasan berpusat di Jawa, hal ini tidak sesuai prinsip prinsip Demokrasi pendidikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kolaborasi aktor (Hexa-helix) dalam mendekonstruksi road map pendidikan vokasi Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata di lingkungan Kemenparekraf.
2. Revitalisasi fungsi strategi kelembagaan dalam mendukung daya saing pengelolaan Perguruan Tinggi pasca terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan PT oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.
3. Rekonstruksi purwa-rupa model transformasi organisasi dalam mendukung aransemen kelembagaan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan vokasi PTNP di Indonesia

B. Saran

1. Perlu penguatan kolaborasi aktor (Hexa-helix) dalam mendekonstruksi road map pendidikan vokasi Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata di lingkungan Kemenparekraf.
2. Revitalisasi fungsi strategi kelembagaan dalam mendukung daya saing pengelolaan Perguruan Tinggi pasca terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan PT oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian perlu dipadukan dengan konsep 4R lainnya
3. Perlunya replikasi purwa-rupa model transformasi organisasi dalam mendukung aransemen kelembagaan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan vokasi PTNP di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Dardiri, A. (2011). Diversifikasi kompetensi lulusan pendidikan dan latihan vokasi untuk lebih kompetitif. *Teknologi Dan Kejuruan*, 34(1), 91–104.
- Erlin Damayanti, Mochammad Saleh Soeaidy, H. R. (2011). No Title. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 464–470
- Fàbregues, S., Molina-Azorin, J. F., & Fетters, M. D. (2021). Virtual Special Issue on “Quality in Mixed Methods Research.” *Journal of Mixed Methods Research*, 15(2), 146–151. <https://doi.org/10.1177/15586898211001974>
- Islamy, I. M. (2007). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cet. Ke Enambelas, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- John W. Creswell. (2013). *Research Design_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches-SAGE Publications (2013).pdf* (p. 273).
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*, Yogyakarta, Gava Media.
- Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (2016). *Penyusunan Kurikulum Pendidikan Vokasi*. 166.
- Peraturan Presiden RI No : 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan
- Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggiundang-undang Nomor
- Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional
- Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Kompetensi
- RI, K. (2009). No TitleUndang-undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. *Undang Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*, 57, 3.
- Said, F.(2011). Disertasi : *Implementasi Kebijakan : Suatu Studi Kebijakan Wisata Bahari Di Sulawesi Selatan*. Pasca Sarjana S3 Universitas Negeri
- Slamet, P. H. (2009). Peran pendidikan vokasi dalam pembangunan ekonomi. *Cakrawala Pendidikan*, xxx(2), 189–203. http://scholar.google.co.id/scholar_url?url=http%3A%2F%2F1ppmp.uny.ac.id%2Fsites%2F1ppmp.uny.ac.id%2Ffiles%2F2%2520Slamet%2520PH.pdf&hl=id&sa=T&oi=ggp&ct=res&cd=0&d=12706274777225940229&ei=J-FlXouSJY3KyQTnwpngCQ&scisig=AAGBfm075Lkbr0IlsUHAp81RXaxXi

HN5Rg&n

Smith, B. K., & Larimier, W. C. (2009). *The Public Policy Theory Primer*. Westview Press. Makassar.

Sudira, P. (2018). Metodologi Pembelajaran Vocational: Inovasi, Teori dan Praksis. In *UNY Press*.

Tashakkori, A. (1377). *Foundations of Mixed Methods Research_ Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioral Sciences-Sage Publications*.

Thomas A. Dan Birkland. (2005). *An Interduction to The Policy Process (theory, concept, and models of Public Policy Making*. M.E. Sharpe New York.

Undang-Undang RI No 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional

Undang Undang No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Yusuf , A.H. (2015). *Administrasi Negara*

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara di Politeknik Kesehatan

Poltekes NTB 2.m4a

[00:00:12] Saya sudah terima suratnya kami juga kemarin dapat sosialisasi, jadi kami kemarin kebetulan Direktur Jakarta, Direktur Jakarta dua kemarin juga datang kebetulan beliau sekretaris atc Asosiasi Poltekkes Kementerian Kesehatan kebetulan beliau yang membahas tentang RPP kan kita memang Poltekkes ini 38, ini menjadi angkatan di seluruh Indonesia sedangkan pada keputusan terakhirnya kan masih dari Diknas ya Jadi saya lihat ini dari rekomendasi terakhir Menteri Kesehatan masih mempertahankan ya kita menunggu saja sampai proses terakhir kemudian ada tiga opsi waktu itu opsinya adalah di Menteri Pendidikan kedinasan Tapi saya pernah 2004 pernah bertanya waktu itu kami ini akhirnya memang dari pendidikan kedinasan dari SPK kemudian SPPN kemudian SPAG Saya pernah bertanya waktu itu peraturan dihapusnya pendidikan kedinasan ini kapan Terakhir 2020 di Jakarta dua waktu itu maksud saya ini lulusan kami ini harus berlelah-lelah mencari kerjaan itu persoalannya kalau seandainya bisa sebagian diangkat mungkin lain persoalan dan staf ahlinya itu mencatat konsultasikan kemudian baru muncul RPP saya terima dari staf dua hari kemudian rapat di PPSDM semua kita direktur ikut semua rapat hadir jadi memang kalau pendidikan kedinasan ini kan kalau dipapar sangat banyak Kementerian yang terkait, yang terkait dengan program melaksanakan pendidikan ini yang memang dibuat kementerian pendidikan kan kalau ini dikembalikan banyak sekali malah Kalau kami memang ahli bina itu sudah kami lakukan kan seJak 4 tahun yang lalu pembayarannya dari restek kemudian proses akreditasi juga diknas selama ini sudah ahli Bina waktu itu termasuk ahli Bina yang dari Pemda ke Poltekkes tapi Lombok Timur itu, Kalau saya pribadi hanya menggeser mahasiswa kita ingin menyelamatkan mahasiswa mengubah status ternyata Lombok Timur itu hanya 1 dosennya yang ASN 70-an itu alih status aja hanya 1 orang yang kontrak hadir ratusan aset yang ada ingin menyelamatkan hanya dua angkatan gitu kalau saya sih lebih baik saya sih dikonsentrasikan SMK gitu SMK apa misalnya SMK Pariwisata bisa di anu lagi dengan Politeknik pariwisata kemudian kalau kesehatan bisa dengan Poltekkes mana sehingga bisa ada kelanjutan kelanjutannya rugi side saya bilang bagian asetnya hektaran tanah itu iya rugi kalau saya senang saja ambil tanah itu atau lama-lama kita begitu kita ambil itu lama-lama Pemda bilang Poltekkes Mataram pindah ke Lombok Timur ini kan jadi lirik sekolah-sekolah pusat ini kan besok-besok bilang untuk perluasan wilayah kota provinsi katanya nah ini cocok ini Poltekkes pariwisata ini menarik tapi kan enak memang kalau pariwisata ini kan memang pemda yang tempatnya anu tanah kan yang jadi masih dibantu malah kita ini mau diambil nggak enak kalau pariwisata dikasih kalau itu kan

tanah dia memang termasuk yang Utara kebun kapas itu Iya PTP bersama Pak Bupati ada temen lah jadi proses-proses kita ini akhirnya kemarin keputusan terakhir hanya menerima tanah jadi itu yang kita mungkin kalau saya sih mengajak teman-teman di Poltekkes ini kita menunjukkan kan kalau kita di bawah Kementerian melaksanakan pelayanan kita menunjukkan perhatian terhadap pendidikan ini ada manfaatnya bagi masyarakat makanya kami KKN ya kembali kepada tugas pelayanan Kalau kami KKN misalnya untuk semester terakhir kita masuk ke puskesmas Jadi turunnya ke masyarakat itu lewat Puskesmas jadi saya kemarin Pak Haris sudah menyampaikan itu saya bilang mungkin ada yang bisa kita lakukan kerjasama kalau kita lihat ini kan jadi kalau kita dari segi isi saja kan bisa masuk ke perhotelan Kita kan di bawahnya Hotel ke Senggigi kemudian makanan itu ke tempat masaknya Garuda gitu kan kenapa tidak ke Poltekkes pariwisata saja dispar nya yang ada

[00:08:41] Kita punya Prodi seni kuliner

[00:09:27] Jadi mungkin kalau saya ya saya berterima kasih ada tim dari pariwisata bisa kita bersama karena memang banyak pekerjaan yang mungkin yang bisa bersama-sama ya kalau saya katakan senasib supaya kita sama-sama jadi saya kira mediasi dari Pak Haris ini saya memang sudah lama sudah ketemu Bu rida di pesawat waktu dari Jawa Makassar rame rame waktu itu sempat bicara pernah nyambung lagi paling tidak informasi kita bisa saling berbagi kalau memang di Poltekkes ini atau ada Politeknik itu kita bisa di berbagi cerita kepada yang berminat mungkin kalau disini ada yang bertanya ini begitu juga jadi bisa juga kita mungkin MOU ya kita acarkan jadi ini kan gitu kita bersama-sama pertemuan disini atau untuk MOU Tridharma perguruan tinggi Kalau ini mungkin mana di sana bisa kita ini, kegiatan untuk jurusan yang lain ada yang bisa itu yang mungkin kita perlu kerja sama saya terima kasih kepada bapak-bapak semua untuk kehadiran ini Itu mungkin pembukaan dari saya mohon maaf jika terlambat daripada mau melepas itu saya pikir atau lari dari sana dulu Jadi alhamdulillah rupanya memang jodoh kalau lama-lama paling tidak Walaupun sekali datang orientasinya lama berarti merasa oh sudah lama di sini inilah kalau kita bisa silaturahmi jadi merasa tidak bertamu kan berarti sudah bisa jalan kerjasamanya itu mungkin dari kami

[00:12:40] Terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami ada 2 misi ini pak misi pertama untuk silaturahmi untuk memperkenalkan kan Poltekpar Lombok di bawah kementerian pariwisata ekonomi kreatif namun tentu memang lahannya memang milik dari hibah dari Pemda Provinsi dan bangunannya memang anggaran kementerian pariwisata misi ke-2 yaitu memang untuk menjawab RPP ini kita membuat tim penelitian untuk mencari kira-kira bukan menentang dari RPP ini tetapi solusi kira-kira kalau RPP ini keluar apa kira-kira misi dari kita sudah pasti masing-masing Kementerian ini akan bertahan Pak Termasuk kementerian pariwisata juga tapi kita sebagai ilmuwan coba kita kaji kira-kira apa solusi solusi kalau Ini memang bekerja Nah itu saya bersama saya kebetulan sebagai ketua tim peneliti Pak Jujuk sebagai SPM kita nah niat kami adalah satu kira-kira kalau masalah kerjasama itu insya Allah kalau kita sendiri cuma pertanyaan saya apakah di Poltekes ini sudah ada laboratoriumnya di sini lab gizi ya ada makanan yang dibuat itu perlu sekali ada teman-teman kadang kala membuat penelitian produk Itu sangat bagus sekali saya pikir memang saling bersambung lah kita lakukan kedepan Insya Allah dalam maju ke depan Insya Allah sehingga teman-teman penelitian produk minuman itu kita bisa buat uji lab nya di situ kira-kira itu itu masalah ini nanti Kita membuat kerjasama juga nah fokus kita punya ini adalah sebenarnya ada dua atau tiga pertanyaan pertama kalau sehingga kami mendapatkan input Pak Anggaplah Kementerian dan kita ini semua bekerja udah yakin Saya dari sesmen kemarin kan kita punya menteri baru juga ada perubahan penelitian tapi bu sesmen yang paling tau persis bahwa beliau akan mempertahankan ini kami punya hanya 6 pak yang pertama stp bali apa ya poltekpar Bali kemudian Bandung paling lama 56 tahun kemudian ada Medan Makassar dan Palembang nah ini masing-masing ini tentu mau mempertahankan kalau hanya opsi pertama yaitu menerima PNS kedinasan saja rasanya seperti mubazir dengan bangunan yang begitu megah di Lombok tengah itu lalu menerima PNS maksimal bahasanya tidak lebih dari dua kelas itu perkiraan kita itu hal tidak mungkin kalau menurut temuan KPK itu bahwa kita ini ada tumpang tindih kewenangan dan termasuk dalamnya hasil temuannya pemborosan saya juga bingung pemborosan nya dimana sebab kita sebagai ilmuwan coba cari pengertian pemborosan nya itu di mana Nah tetapi inilah temuan karena memang KPK sasarannya masalah anggaran masalah anggaran kalau sudah salah arah tujuan anggarannya nya dianggap sudah pemborosan penyalahgunaan kan gitu tetapi tentu Kementerian Diknas Sebagai penyelenggara pendidikan di Republik ini menerima temuan ini dari KPK sehingga mereka yang membuat merancang RPP ini kalau 3 opsi yang ditawarkan itu rasanya sih Ih ada kurang lebih 176 perguruan tinggi Pak ptkl ada hasil penelitian KPK dari 176 yang kira-kira 157 yang betul betul memang masih menerima umum yang sepul ini hanya menerima PNS saja seperti kelompoknya IPDN lah Sedangkan yang 157 ini menerima

umum ya ada yang menerima 10% ada yang setengahnya bahkan ada yang menerima full poltekpar Lombok Menerima full kira-kira kalau ini akan dialihkan dengan opsi kedua yaitu pengaduan kepada Diknas dikebut Restek sekarang ini Itu opsi kedua Pertanyaannya Apakah iya karena adanya Dirjen vokasi ini memang mohon maaf saja kelihatannya kebakaran jenggot bahwa pendidikan vokasi SMK saja sudah diurus apa kira-kira kalau sudah dialihkan Anggaplah kita beralih ke Diknas Apa iya bisa terkontrol quality control nya ini masih bisa terjamin Dengan kualitas yang ada Saya kira sama-sama lah kita ini pariwisata juga mempunyai quality control yang kuat Bahkan sudah standar Internasional Atau kah bisa sampai detail itu bisa menjamin ya kan sehingga kami mencoba untuk meneliti hal ini penelitian ini tentunya kami mohon dukungannya dari perguruan tinggi lain yang diluar diknas ini sehingga kita punya opsi nanti kalau Kementerian juga akhirnya angkat tangan karena ini tuntutan KPK dan tuntutan undang-undang nomor 12 tahun 2012 bahwa satu-satunya penyelenggara di Republik ini adalah kementerian pendidikan tetapi RPP ini silahkan keluar menjadi RPP tidak masalah tetapi kita harus punya opsi tawar-menawar bukan berarti karena kita mau menguasai pendidikan ini tetapi Biarkanlah kementerian pendidikan kan dan kebudayaan estek ini sebagai penyelenggara tetapi kita sebagai pengelola yang selama ini sudah jalan apa bedanya seperti apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa pengalihan tugas akreditasi kementerian pendidikan Yang mengatur bukan kita memang temuan KPK ini banyak ptkl yang 157 ini banyak yang belum terakreditasi hanya kurang lebih 30-40 persen yang terakreditasi ini juga yang menjadi masalah sebenarnya bagi Diknas akhirnya dia juga bergerak Oh benar tidak boleh seperti ini gitu jadi akhirnya yang korban juga kita kita yang terakreditasi ini yang akhirnya Kena juga sehingga ada tawaran tawaran yang kita coba Temukan dalam hasil penelitian yang ini bagaimana sih kedepannya Kalau akhirnya mudah-mudahan tidak semoga tidak Kalau akhirnya kembali ke Diknas tidak mungkin kita berdiri sendiri hanya menerima PNS Pak tidak mungkin dengan aset yang begitu besar justru tidak lebih efisien justru pemborosan Terbalik ya kan kalau dipaksakan hanya dalam kedinasan hanya PNS saja pasti pemborosan sehingga kira-kira tawaran-tawaran yang kami akan temukan dalam penelitian ini salah satunya adalah biarkan lembaga ini bekerja menerima dua program studi menerima PNS menerima umum juga tetapi selama ini memang sumber anggaran satu pak dari kementerian pariwisata begitu juga pada Kementerian Kesehatan kalau tetap begitu kelihatannya KPK ini tetap mengejar yang harusnya anggaran 20% ini harusnya masuk ke kementerian pendidikan itu yang disebut pemborosan itu tapi bukan dianggap korupsi tapi pemborosan karena bukan peruntukannya sehingga kalau saya usulan kita ini adalah satu bahwa Lembaga ini tetap Utuh seperti terpelihara dia punya kualitas tetapi menerima 2 kelompok peserta didik baik PNS maupun umum tetapi dengan

dua sumber anggaran karena memang ini banyak saya coba konsultasi Kebetulan saya ada di administrasi publik kalau satu direktur mengelola dua sumber anggaran tetapi dalam rangka efisiensi dalam kondisi seperti memang berat ini masalah anggaran ini perasaan ini bisa bisa dimungkinkan juga jadi menerima umum 75% menerima dari PNS hanya 25% anggaran juga begitu sumber dari Kementerian Pendidikan 75% anggaran kedinasan dari Menteri Kesehatan atau menteri KL 25% jadi menerima juga masing-masing sesuai dengan prosedur sumber anggaran sesuai dengan porsi memang beratnya pengelolannya, pengelolaan yang berat tetapi aset tetap tidak berubah SDM hanya tinggal memilih mau ke kementerian pariwisata atau ke Kementerian Diknas tinggal memilih tapi tetap ada disini asetnya tidak berubah atau juga ini adalah APBN sumber anggaran yang satu dari DJA Dari Dirjen anggaran tinggal Dirjen saja membagi anggaran karena kementerian pariwisata hanya menerima PNS cukup 25% dari 1 miliar anggaran mungkin begitu kementerian pendidikan karena dia menerima 75% umum maka jadi kelihatan porsi anggarannya bisa terbagi atau mungkin ada opsi-opsi lain yang kira-kira terpikirkan oleh bapak-bapak dari Kementerian Kesehatan khususnya Poltekkes sehingga opsi ini kita coba perkuat untuk kita ajukan menjadi satu hasil penelitian karya ilmiah yang kita akan hak kita menjadi usulan namanya juga kita usulan Pak orang akademis itu hanya usulan saja Pak Lain persoalan sampai gitu kira-kira Pak hasil kedepannya ini sambil berjalan mungkin ada tanggapan atau Pak Juju ada yang mau di tambahkan silakan

[00:25:09] Mungkin sedikit Pak ya kami pak dari poltekpar Lombok ini sudah melakukan berbagai macam ke depan terkait dengan masalah selain pertama di sini kita melakukan besemaking di beberapa Untuk melihat format yang sudah dibuat di masing-masing PTKL di bawah Kementerian lain minimal kami memadukan Pak dari Hasil temuan Kami nanti kira-kira kita akan uji cobakan atau kita akan membuat pola usulan pada kementerian pendidikan sebab seperti yang disampaikan Pak Arif tadi Salah satunya kami yang full kedinasan dengan yang semi kedinasan yang seperti kita kan dulu pak ya Setia LAN dia menggunakan kedinasan juga ada dan juga menerima dari umum Nah kita mencari pola Pak minimal dari apa yang kita dari hasil basemaking ini kita membuat suatu bentuk produk yang usulan itu dari Kementerian sehingga nanti hak jawab kita dari Kementrian itu sudah terpolakan pak ada roadmap kita yang sudah kita rancang sesuai dengan yang kita baca di rpp-nya pak inilah Pak yang paling kita diskusi dari pihak Politeknik Perindustrian Itu malah yang keras Pak bahkan dari Kementerian Pertanian Sudah berapa SMK kami yang diambil sama Kemendikbud tidak terjamin Tidak bisa masuk pasaran dia malah dirubah menjadi

berbagai macam platform nya bukan pertanian lagi dia masuk RPL jadi seperti itu elektro ke komputer sehingga platform awal Di pertanian sudah hilang itu kemarin waktu rapat di semua Kementerian itu kami tidak berani ngomong cuma saya berani merekam saja Pak itu diprakarsai sama Kampus Bang jadi semua kampus Bang itu SDM kumpul Pak melakukan virtual disitu saya mendengarkan keluhan dari masing-masing kalau Kementerian Pertahanan kami tidak bisa walaupun kami membuka kedokteran kedokteran kami beda dengan Kedokteran Umum kedokteran kami kedokteran militer kalau mau apa Kami punya nuansa sendiri Makanya kemarin kalau kita lihat dari beberapa pendapat atau opsi dari Kementrian Kementrian ini memang benar juga Pak karena kalau kita di pembangunan destinasi pembangunan di tingkat perhotelan dan sebagainya itu kan support nya dari kami untuk SDM Pak sehingga kalau itu Nanti dipotong seperti RPP yang sekarang berarti supporting untuk sdm-nya sudah tidak ada lagi Makanya kemarin ada beberapa Kementerian yang memang paling keras pertanian Pak Sudah berapa sekolah kami yang diambil sama Kemendikbud hasilnya apa, Dulu namanya ada namanya sekolah menengah pertanian itu sampai Tidak berdaya bahkan lahannya diambil alih sehingga Itu yang kemarin orang Kementerian Pertanian Kementerian Kelautan juga begitu Pak sama Jadi intinya kita ini sebenarnya membangun untuk generasi bangsa kita ini sehingga dari beberapa solusi-solusi itu kami dengan Pak Farid dengan tim mengusulkan tentang untuk mengharmonisasikan jangan sampai Katakanlah Okelah penyelenggara Kemendikbud tetapi kita punya konsep harmonisasi di sini pak bagaimana kita menyelaraskan dari apa yang diinginkan oleh Kemendikbud kalau dikatakan pemborosan Pak kalau kita murni seperti modelnya lulusan pariwisata Pak di Unram dengan ada yang di kita jauh beda Pak Jadi industri malah Justru lebih menerima kita ketimbang menerima dari perguruan tinggi perguruan tinggi yang Mohon maaf Pak bandingkan dengan STP Pak dengan STP Mataram Perguruan Tinggi Pariwisata dengan kami jauh Pak jadi mereka industri malah justru Kami punya feedback Pak Dari kami di SBM Pak ada feedback dari industri yang kami kumpulkan dari semua ptnp rata-rata memang daya dukung ya kuat terhadap industri itu adalah di ptkl kita Pak Jadi di Kementerian Kelautan pun begitu Pak dari PTKL yang ada di kelautan kemudian sampai ada yang di industri rata-rata begitu Kementerian yang ada di industri rata-rata begitu kesiapan untuk di pasar kerja nah ini yang kami sedang mencari pola Pak Insya Allah besok sya ke Jakarta Pak untuk mencari masukan-masukan juga Pak nanti 7 Perguruan tinggi Pak kami mencari masukan-masukan Kami coba mencari harmonisasi nya Pak Mungkin itu Pak

[00:31:41] Baik Kalau saya melihat sih saya kemarin berseloroh ya Nadim selesai kan selesai persoalan Hasibuan sudah ngomong Jangan menambahkan di medsos bahasa isyaratnya sudah mulai orang sudah mulai konsentrasi menjadi presiden tapi biasa mengalihkan ke pendidikan lebih cepat merespon kalau saya sederhana saja kalau kita bicara di orang politik beda lagi kebanyakan bapak-bapak kalau menjadikan RPP suaranya berapa yang hilang Benar Iya katanya gitu ya ya jangan sampai hilang suaranya gitu Jadi kalau saya memang ini sudah sering seperti ini pertama mungkin karena kalau pariwisata baru di sini ya kita ini yang sudah lama saja sudah di robek-robek jalan tengah nah ini sebelah ini sebelah gitu Ini punya pusat dulu ya sudah diambil ini malah ini mau ditukar sama Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan di sana itu salah bicara cuma pak gubernur bilang tolong nanti pak direktur kalau bangun jangan sampai bentuk rumah sakit Dan Dinkes nya bilang Dia bukan usulkan ini bisa tidak Dinas Kesehatan itu disatukan maksudnya di dekat dinkes ini yang Utara sama Selatan Tapi dipikir oleh pak gubernur disatukan dia dengan rumah sakit coba ukur di sana supaya Poltek kesana Ini kesini tapi Menteri Kesehatan menyampaikan Coba dikomunikasikan sama direktur Poltekkes kan tidak mungkin menteri disuruh konsultasikan kalau dia katakan ambil sudah selesaikan Kalau bahasa diplomasinya kan tolak menolak Tapi kencang kepala dinasnya sampai datang ke sini bagus ruangan ini mangkanya saya sampai di DPRD di Pak Ruslan namanya di DPR provinsi saya sampai pernah protes pariwisata Kok bisa dikasih Kenapa kami diambil saya bilang gitu Tolong dong sama-sama dikasih gitu Ini kan dulu tanah Kementerian nah terakhir ini makanya kita ini bisa balik ini ternyata rumah sakit jiwa itu masih punya pusat sehingga maka diukur Saya ingin ambil ini disana masih punya daerah yang di Karang Jangkong Termasuk itu yang punya Rumah Sakit Islam itu Sudah dipertanyakan karena itu punya Kementerian Kesehatan dulu dari Kanwil Dikes itu terus semua sampai Karang jangkong rumah-rumah dokter itu itu punya Pusat Kementerian Kesehatan termasuk BKKBN terus rumah dinas sampai Utara pom bensin termasuk ini juga mau jadi Rumah Sakit tidak jadi di sana lagi termasuk gedung di selatan Grand apa namanya itu analis dan gizi jadi laboratorium provinsi di lampu merah di dekat sekolah Balai laboratorium yang dulu itu punya analis sama gizi karena Perubahan status Kementerian menjadi Dinas Kesehatan diambil semua cuman Kementerian Kesehatan yang tidak mengurus aset-aset nya ini kalau Hutangnya dia urus itu yang terjadi kalau saya sih biasa dengan isu ini muncul karena sampai hari ini banyak di Kementerian kita aja masih PLT semua kita dirjen-dirjennya malah lembaganya sudah dihapus badan ppsdm berubah menjadi Dirjen tenaga kesehatan, tapi tidak salah juga karena saya bilang pertama teman-teman sudah mulai bergerak untuk jadi Institut kalau menjadi Institut saya tidak pamit dari Kementerian, pertama minta pamit kedua berubah menjadi BLU Saya tidak berubah menjadi Blu nah ini berubah jadi

blu ini jelas jadi pemborosan Memang harusnya kalau saya sempat tanya saya mau blu tapi chord bisnis apa yang saya lakukan Saya mau bangun klinik rumah sakit besar begini pusat bila pos imunisasi bagaimana saya mau buka pos imunisasi kalau begitu imunisasi spesialis semua yang didirikan kita mau ngajar nyuntik kapan kan tidak mungkin ini halaman sudah 1 halaman ini pemborosan ini rumah sakit sebelah ini ini Kita di pagar ini oh ini pun sudah mulai di depan itu itu sudah stop dia saya bilang saya sebenarnya bisa ngambil itu sebenarnya duluan kan saya dapat rumah sakit atau anda dapat Poltekkes kalau kita lari kadang-kadang kita masuk di politik saya juga bergabung di terakhir ini tim bersama Luhut lah Kita coba-coba Dikes Suruh ngomongin RPP pendekatan-pendekatan personal perlu Pak harus ada memang personal-personal yang bergerak seperti itu kita mau menolak kayak gimana teman itu yang Kemenag itu sama Menkes tanah kita sudah diambil oleh Puskesmas Bunda menkes nya Menkesnya yang kasih, Itu yang kalau saya lihat yang masalah kalau saya tonton saja orang-orang ini kan orang semua kita ini lebih banyak membahas dulu kapal selam 402 tenggelam kita masih bahas yang pegang-pegang di bawah itu jadi ini memang kadang-kadang menteri-menteri ini menjadi mencari tren-tren baru isu mau jatuh lagi polingnya mirip artis, memang saya pribadi waktu orang membahas ini kalau saya ajukan solusi ini selesai persoalannya

[00:40:16] Kami 504 prodi Di seluruh Indonesia

[00:40:25] Coba kalau hitung-hitung dengan karena kita belum bertemu ini coba ini dengan isu ini nanti bersuara 2024 kan sudah di depan mata uang negara sama kok Nah sekarang kecuali Sekarang Okelah pemborosan di dalam itu tapi manfaat kalau kita melihat kesehatan memang Poltekkes kita ini saya mau hadiahkan bersaing bersaing bersaing Dia mungkin tidak lulus itu karena bersaing dengan sesamanya kalau sama-sama misal dari sini dibutuhkan 3 yang 1 ini ya tidak lulus tidak usah jauh-jauh swasta saja kalau belum habis kita ini baru

[00:41:13] Kemarin kan berapi-api bener Pak jadi kan terkait dengan pariwisata kemarin berapi-api benar ketika saya masuk di BAK sama di direktur duanya ngobrol-ngobrol di situ ternyata gini Pak Unram aja makin bingung ini Pak ngurus punya gedung ini kalau dia suruh ngolah poltekpar Bagaimana urusannya lagi, karena salah satunya masuk ke Unram kemudian saya berika ini loh porsi

anggaran kami Porsi anggaran kami segini mampu nggak Bapak memberikan porsi yang seperti ini dia udah melihat dari perawatan asetnya pak perlu dilihat

[00:41:59] Memang berat dia kalau 8 itu ya memang kalau saya sih bagus opsinya sebenarnya Pak ini yang tidak dikerjakan sebenarnya jadi paling tidak kepentingan pendidikan kedinasan memang boleh alih jenjang atau kemudian paling tidak ada formasi yang tidak kita berikan untuk itu apakah 10 terbaik atau 3 terbaik ada lah kalau ada sekecil apapun dia laksanakan itu harusnya tetap dia berikan formasi itu kalau saya sih tidak harus semua misalnya Kalau yang umum terbaik 123 lah paling tidak setiap Prodi yang ada diberikan kesempatan jadi ada yang memang instruksi yang seperti itu diberikan laksanakan kalau semua di manapun tapi kan sekarang pelayanan ataupun pariwisata kan memang 75% harusnya swasta yang bergerak tapi sekarang kebutuhan swasta Apa harus menunggu yang swasta yang mengelola kan tidak, dengan adanya subsidi pemerintah Jelas Politeknik di bawah pemerintah ini bayarnya lebih murah Karena pembiayaan yang lain penggajian semua diatur pemerintah kalau kita menghitung di situ memang mahal anak di sini kalau kita hitung dari anggaran 200 juta per orang kalau kita buat sekarang sekolah dengan biaya 200 juta Mana mungkin dia bayar SPP setahun tapi kita sudah bersubsidi kepada mereka ini 200 juta cukup besar diuntungkan dengan 200 juta tidak dipakai artinya bukan pemborosan selagi kita mampu membiayai mereka sampai menjadi kualitas kalau hitung dengan swasta kalau misal dibandingkan misalnya bayar gaji bayar semua kita hitung total rkk kita pertahun itu bisa sekian m kalau kita bagi jumlah mahasiswa kita pesan sama dosennya Janganlah niat lebih banyak memecat orang jangan dibodoh-bodohi karena adanya mereka kita bisa mengelola pendidikan ini Paling tidak menyenangkan kalau mahasiswa sudah menyenangkan dia akan kebakaran jenggot kalau dibubarkan kampusnya tenang-tenang saja cuma itu saja yang kita kritik mereka ini kan tapi 2024 ini kayaknya kita akan hilang lagi sudah mulai dekat Pilkada Pilpres inikan sudah mulai ada nampang di medsos sudah mulai nih saling tembak ada yang calon disebut-sebut tidak diajak rapat

[00:44:55] Memang isu yang paling ngeri itu adalah Contoh di kami pak misalnya kami kan jurusan bidan perawat analisa sama gizi nah Katakanlah opsi seperti bergabung dengan Unram itu salah satu opsi Pak dari 3 opsi itu ngeri-ngeri juga kan Unram kan sudah punya parameter sendiri dengan regulasi baru misalnya dia belum punya fakultas perawatan oke perawat diakomodir fakultas gizi Ok diakomodir lantas Bagaimana analisis dengan bidan itu baru satu belum lagi kita berbicara dosen belum bicara tentang tenaga keanggotaan dan seterusnya tentu

kan kalau opsi itu Nah kalau kami syukurnya tadi disampaikan Pak Dir kami sudah punya SK ahli bina jadi Jadi ada komitmen dengan Kemenristek dengan Kementerian Kesehatan bahwa untuk berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia manajemen keuangan itu dikelola oleh Kementerian kesehatan Sementara regulasi mengenai akreditasi sertifikasi dosen itu domainnya dari itu kita sudah ada kesepakatan yang kedua itu yang kedua kemudian kalau opsi ketiga kedinasan ini justru Menurut saya lebih mengkhawatirkan lagi karena kita ini sudah terlanjur punya kapal besar Pak di dalamnya ada kami sudah 200 lebih tenaga Kalau sekolah kedinasan saja saya bayangkan nya kan nanti yang formulasinya dari PNS atau dari pegawai sangat terbatas lantaran jumlah dosen jumlah tenaga Jumlah infrastruktur yang Sekian banyak ini untuk apa ini kan menjadi persoalan juga Pak Kami juga kemarin ada audiensi asosiasi Poltekkes tersebut menyampaikan beberapa opsi bahkan yang bikin kami juga khawatir itu itu tapi mendengar penjelasan Pak Dir kemarin kan Kementerian Kesehatan sudah jelas-jelas menolak saya baca juga dari Kementerian Pariwisata sudah jelas kali menolak itu jadi ada 5 poin nah poin yang kelima itu yang membuat Kami senang jadi belum bisa menerima RPP ini dan harus diadakan pembahasan ulang Oleh karena itu karena Pak direktur bersama teman-teman seluruh direktur ya membuat suatu konsep ya konsepnya kami berharap seperti formasi lama karena sudah ada sk-nya Jadi tetap ahli Bina saja jadi tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan kemarin artinya kami tetap Independence regulasi seperti yang disepakati itu tetap berjalan Justru itu kalau menurut kami itu aman sehingga posisi kami baik dosen tenaga kontraknya ya kan infrastrukturnya dan saya berpikir juga Kementerian Kesehatan Berfikir 1000 kali pak karena aset yang begitu besar tentu tidak mudah Belum lagi sisi kepegawaiannya yang yang PNS segala macam bagaimana hitungannya saya percaya omongan Pak dir Itu ditunda artinya Dia paling cepat 3 atau 4 tahun belum tentu itu apalagi kalau ada pendekatan-pendekatan personal Asosiasi dari kami dari Sudah melakukan itu tentu nanti dari visi misi itu ini Jangan dianggap kecil pak salah satu saya lebih percaya daripada kalau menteri itu apa istilahnya tadi Pak Dir yang penasehat atau apa istilahnya staf ahli saya lebih percaya menteri ngomong staf ahli makanya pendekatan personal tadi ya percaya ini kalau menurut hemat kami kami juga merajut ya salah satunya kami Ketimbang bergabung dengan universitas negeri habislah kita pecah kapal ini pecah atau mungkin opsi Katakanlah sekolah kedinasan ia bersiap-siap ajalah kita berpikir wah paling-paling yang diambil doktor aja S3 yang kompeten yang lainnya kemana kan lari keluar semua Jadi memang beberapa opsi ini sangat-sangat merisaukan kami semua bayangkan 8 Poltekkes Pak dari 33 provinsi Kami punya doktor di Poltekkes ini lebih dari 300 Profesor sudah 5 Prodi sudah 504 Masa Pak Dir mau bubarkan begitu belum bicara itu sudah infrastruktur ini kalau di overtunity nya ratusan T bagaimana ujuk-ujuk keluar RPP mau dirubah

[00:50:04] Mohon izin Pak kalau ini pak Kami kebetulan kemarin ada satu bentuk harus belajar Pak sama ibaratnya bapak-bapak ini yang sudah ada MOU dengan konsep Ahli Bina tadi itu yang pertama Yang kedua ini Pak kami ini pak untuk pengelolaan tenaga kontrak dosen-dosen yang non PNS Pak ya ini kami kemarin sedang membuat saya lagi usulkan ke kementerian, kementerian kami pak ya Karena untuk membuat jabatan fungsional itu harus dosen tetap Pak ya kalau pola di sini Bagaimana Pak

[00:50:47] Kalau untuk dosen tetap belumnya cuma mengajar itu Supaya diakui oleh akreditasi saja kita buat nomor NIDK Bagi yang Negeri sama yang yang ini kan yang kita sela sela artinya ada memang yang kita kontrak Yang tugasnya harus mengajar tapi gajinya kita bayar secara kontrak karena memang bekerja full Disini ini kita samakan kontrak dan kita beri mengajar tapi supaya dinilai oleh akreditasi saja jadi nama bersangkutan diakui secara akreditasi sebagai dosen masuk di pdpt kita masukkan di pdpt, tidak Pakai japung dia

[00:51:47] Persyaratannya 2 Pak ya kalau kita dosen internal itu kan NIDN kalau ini NIDK itu memang Kemenristek Dikti minta diinput itu mangkanya waktu awal kami minta dokumen-dokumennya jadi dia NIDK boleh dia dinas dimanapun gitu tapi dia untuk fungsional nya ga dapat terutama di kantornya nya sudah dapat dia sebagai PNS itu namanya sehingga dikatakan dia diberikan nomor induk dosen khusus Di samping memang kami juga ada tenaga kontrak Pak ya yang internal NIDK juga yang pegawai negeri aja yang memang fungsional secara ini dia berhak tidak mengusulkan untuk japung nya Pak kalau kita tidak bisa kalau Kementerian mungkin tidak bisa tapi dia itu institusi swasta iya, ya pendidikan memang swasta yang japung nya kalau dia di swasta mau japung mau urus japungnya boleh kalau kita kan sesuai Kementerian yang diakui secara SK Kementerian kalau mereka dipakai di kontrak

[00:52:59] Kalau di pengalaman kami saya juga kebetulan punya institusi pak mohon izin Pak ya Jadi kalau NIDK itu kami memang minta dulu datanya baru kami masukkan ke ke Dikti jadi di NIDK keluar Begitu keluar Jadi kami tidak gaji bulanan Pak tetapi kami masukkan sebagai tim mengajar di situ Jadi kami hitung SKS mengajarnya saja kalau syaratnya harus itu kan kalau di Yayasan atau swasta itu kalau yang dilakukan itu sehingga ada persyaratan kalau dosen spesialis

kebidanan ya kami minta kami kirim keluar NIDK nya berarti dia sudah di institusi kami tinggal kami berikan jadwal untuk mengajarnya dibayar sks nya sesuai dengan yang disepakati kalau di swasta benar Pak Dir tadi

[00:54:00] Izin Pak khususnya masalah program profesi kita punya program profesi

[00:54:04] Kami punya dua Pak ada dua kita untuk Nas untuk D4 keperawatan sudah Kemudian untuk bidan sudah ada nah kita sedang dorong ini gizi sama analisis tapi harus dia S2 yang memang diakui profesi Nah kalau memenuhi standar itu minimal seperti pendiri pendirian Prodi baru itu kan Prodi baru profesi sekarang kan kita belum disuruh buka Prodi baru karena persoalan RPP Emang juga ini bukan apa-apa sebenarnya kita ini kelewatan sebenarnya yang melaksanakan pendidikan di Kementerian khusus ini ini jadi sudah seenak-enaknya buat sekolah begitu buat Prodi gitu Jadi apa maunya dalam bayangan ke sana kan jangan apa ini jangan macam-macam gitu Jadi itu yang terjadi kalau saya mungkin kerja kami dalam beberapa apa dari mulai KKN saya kemarin langsung memasuki Puskesmas untuk meyakini mereka gitu nanti Terserah lah setelah Nanti orang tidak mungkin dia satu pihak dia mau lihat ini mau dibubarkan kan kan pasti dilihat masyarakatnya kan kalau Poltek pariwisata tinggal usul saja ke hotel-hotel itu kami punya ini punya ini terus aja jalannya itu itu mudah-mudahan kalau tahun ini kita meluluskan kira-kira 10 sampai 100 persen kalau habis 100% bagaimana dia mau ASN semua diambil swasta saja sudah habis dia Jadi penyerapan itu yang kita kalau sekarang itu kita balik dia mau ribut di Jakarta terserah lah mudah-mudahan mungkin Kalau pariwisata di sini sendiri menjadi kedinasan kan tidak 100 200 bapak kelola bisa ribuan di sini kan Mungkin satu yang lain sudah ternyata Mataram ini MotoGP ada macam-macam ada biar di sini ditetapkan gitu biar dia kedinasan tapi kalau 1000 yang dikelola sama juga gitu kan kan atau disandingkan dengan STPDN Sebelahnya kan gitu sama-sama pada pendidikan kedinasan Kalau saya tidak ada khawatir tinggal kita bagaimana profil kita ini ditampilkan diperkuat termasuk mahasiswa saya Makanya salah satu di sini walaupun lagi pariwisata dosen sama mahasiswa harus cantik Semua pengelola harus cantik dan dan gagah itu saja itu dulu nah Bupati tanya kok bisa cantik mahasiswa dan gagah Oh kalau tidak cantik dan gagah tidak akan saya pilih padahal orang Afrika yang hitam aja dulu kalau dia berhias pasti cantik itu dulu anda yang jadi pendidik di sini yang kuliah di sini harus cantik dan gagah jangan ragu-ragu untuk beli baju baru orang tunggu lebaran seminggu sudah lain bajunya jadi itu yang membuat ini ya wah saya mau lulusan ini apalagi pariwisata Ini kan

baru jadi chord bisnis yang seperti ini pariwisata kecantikan pariwisata ini kan bisa-bisa kalau saya sih mungkin cuma Saran saya lebih baik kita roadshow saja ja hotel yang ada ini dengan cat 2022 ini yang kita siapkan wisata ini menyediakan personil bayangkan yang mendampingi jadi guiding nya saja berapa macam negara kaya misalnya waktu saya ke Beijing itu kita Pertemuan perawat sedunia yang diambilkan perawat-perawat di ruangan bukan berapa yang di ruangan yang memang berpenampilan dan bisa bahasa berbagai negara mendampingi mendampingi mendampingi itu bisa saja nanti kita siapkan pendampingan misalnya mahasiswa terampil untuk tim wisatanya kita siapkan kita Sumbangkan mahasiswa tingkat terakhir anggap dia itu mendampingi rombongan rombongan itu sebagai kkn-nya kan gitu untuk menjelaskan destinasi wisata di sini Apa itu Oh kalau begini ini ngapain Kita mau bubar Terus mau buka katanya jadi banyak celah kita

[00:58:50] Lulusan kami semua rata-rata besar di industri Pak D3 Pak sama D4 baru dua kali tamatan belum ada ada tuntutan uji kompetensi Oh sudah ada sudah ada kita

[00:59:08] Saya mangkanya berdoa mudah-mudahan pendidikan kedinasan ini dipusatkan semua di Lombok ini Kalau satu-satunya di sini kan kan Mungkin tidak 100-200 kebutuhan 1 Indonesia baguslah

[00:59:32] Kami Kalau kebetulan untuk perawatnya ini profesinya ngambil dari karena kan dulu mengelola D4 keperawatan Nah sekarang sudah dirubah statusnya menjadi STR kep, sarjana terapan keperawatan Karena kami sudah kanalisasi begitu selesai dia langsung profesi harus tamat dengan profesi dia karena sekarang sudah tidak ada lagi menerima dengan sarjana terapan Jadi kalau perawat diterimanya NES jadi harus kita selesaikan dia NES Iya 5 tahun profesinya lanjut dia memang harus tamat di situ kalau bidan kami belum berani karena akreditasinya belum kami lakukan kan takutnya nanti tamat yang dari pegawai belum kita terima belum berani karena belum akreditasi B kalau sudah akreditasi baru kita terima dari profesi bidan

[01:00:33] Tapi ada juga yang masuk profesi itu dari luar PNS baru ambil profesi

[01:00:37] Kalau di STIKes Yarsi ada ada ada dia Kalau kami karena bidan kalau yang lain bisa yang di 3 bisa melanjutkan alih jenjang ada D3 langsung ke Nes ada yang D4 ikut Nes ada Untuk bidan karena memang, kita kan sekarang begitu izin untuk pendidikan profesi dia keluar satu izin dua Prodi, jadi Prodi sarjana terapan kebidanan dan profesi kan nol lagi dia ini kalau yang kemarin Diploma 4 Jadi begitu keluar menjadi sarjana terapan dan program profesi ini harus kita tarik lagi 2 tahun kalau dari nol tahun dia kan masih ada waktu 4 tahun jadi 2,3 tahun kita akreditasi tahun ke 4 sarjana nya saja sudah bisa menunggu untuk profesi Tapi kalau yang D3 ke ataupun D4 lanjut setahun ini dia sudah ini Sementara baru izin penyelenggaraan kita punya izin tidak bisa diakui, Prodi baru jadinya Pak dir membagi ada Kaprodi profesi ada Kaprodi sarjana terapan nya, jadi kita yang penting sekarang Pak kita berdoa saja Pak nadiem itu hilang jadi tidak usah lagi tanya kalau yang memang ada Filiasi yang ini terutama yang sudah BLU yang Nah itu kadang kadang merasa khawatir dengan ini jadi Sudah enak dengan chord bisnisnya nya kemudian tunjangannya sekian kalau kita masih bnpp Masih bnpp ya tinggal kita usulkan item mana yang belum kita isi si item nya ya tenang tenang Ya Pak karena bnpp yang paling aman dan juga masyarakat terjangkau jadi kayak kita ini terjangkau masyarakat sehingga saya ini mau diminta BLU Saya berat betul Kita besar penghasilan tapi kan disuruh kita peras masyarakat mencari makan kita jadi bapak bisa saja pergi mengajar besok jadi resepsionis di hotel kan harus mencari tambahan lagi ke situ kan kan itu masukkan institusi masyarakat juga berat bebannya dan yang lain sudah BLU ya kalau pariwisata Oh belum ada ada semua masih sama di Nusa dua satu ya Iya sekarang Politeknik pariwisata Bali Pak Iya itu kan menantu saya di belakang pariwisata itu ada perumahan di belakang memang ini perasaan teman-teman yang b l u yang sudah Institut Institut kalau saya sih kayak masih jauh orang kan masih urus begitu mau RPP Palestina

[01:04:07] Kemenhan sama Kementerian agama karena mereka payung Tidak bisa diganggu karena mereka sudah bahkan saya lihat di di di departemen agama itu ada Dirjen agama Islam bayangkan hampir 56 triliun pendidikan itu diambil oleh Kementerian Agama di samping mereka punya anggaran Sendiri Lagi Sementara kita ini dan seluruh Departemen lain hanya 28 T Pak Nah kan hebatnya Kementerian Agama saya dulu di Jakarta pernah ketemu sama ma Prof Arif namanya di dekan kedokteran UIN di Jakarta Jadi beliau bilang saya hambatan dulu waktu mengurus izin kok agama ditanya sama ristekdikti Dirjen kelembagaannya you kok pendidikan agama kok mau ngurus dokter mau ngeluarin dokter di mana Akhirnya dijelasin bahwa kami mendesain dokter nanti dokter yang flash kami sudah Wah ada MOU dengan Jepang bahwa Jepang minta

dokter itu ingin memang yang punya kekhususan nah begitu dia mencetak sarjana itu dia diminta sama Jepang akhirnya Jepang puas Pak akhirnya minta sekian ratus jatah lulusan UIN ini ini untuk tiap tahun tiap tahun dokter nya gitu mangkanya oleh kemenristek dikti diapresiasi Pak dikasih jatah khusus untuk UIN ini jadi saya pikir kalau Pariwisata mungkin punya kekhususan itu yang memang yang menjadi dasar juga lalu diperpanjang Kalau kami ada istilah di institusi kami ini ini pusat himpunan perguruan tinggi the center of Excellence jadi ada di samping sekian Prodi yang banyak ini apa keunggulannya Kalau kami masih orientasi si pada stunting karena Pak Dir kami punya visi misi memang stunting itu yang harus kami kawal sesuai pusat unggulan, jadi gitu Pak ya Banyak sekali masukan Kalau saya lebih baik Panggil menterinya kumpul jadi satu tolak gitu aja itu kata kuncinya jadi di itu yang di lakukan kita minta dia PLT kabadan untuk berdiskusi jadi itu mungkin langkah yang kita ini Jadi jangan sampai kita kendor kalau kita kendor yang penting tidak dikurangi hak kita RPP itu urusan dia kalau masalah terbalik tanda tangannya kan ada saja yang tergesa-gesa

[01:06:49] Ok mungkin cukup banyak sekali informasi kita dapatkan mungkin untuk MOU nya belakangan

PROFIL POLTEKKES KEMENKES MATARAM



A. VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Vokasi yang utama dalam pengembangan kompetensi SDM dengan multi disiplin ilmu yang Expert, Inovatif dan Interpreneur, berdaya guna dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan penurunan stunting bagi masyarakat sehat, produktif dan berkeadilan tahun 2022

B. MISI

1. Meningkatkan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yaitu Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Peningkatan Kompetensi SDM
2. Meningkatkan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan berdasarkan kuantitas dan kualitas
3. Mengembangkan program kewirausahaan dalam rangka mengidentifikasi peluang – peluang yang berpotensi memunculkan nilai ekonomi
4. Meningkatkan mitra kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri baik dosen dan Perguruan

C. LOKASI KAMPUS DAN LUAS LAHAN

1. Kampus A (Luas 32.427 m²) beralamat di Jl. Praburankasari Dasan Cermen Cakranegara sebagai tempat untuk Direktorat, Jurusan Gizi Prodi DIII dan DIV Gizi serta Jurusan Teknologi Laboratorium Medik Prodi DIII dan DIV.
2. Kampus B (Luas 27.343 m²) beralamat di Jl. Kesehatan V/10 Mataram sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan untuk Jurusan Keperawatan Prodi DIII dan DIV Keperawatan Mataram serta Jurusan Kebidanan Prodi DIII dan DIV Kebidanan.
3. Kampus C (Luas 13.345 m²) beralamat di Jl. Gatot Subroto Bima sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan Program Studi DIII Keperawatan Bima
4. Kampus C(Luas 4.343 m²) beralamat di Jl. Soekarno Hatta no. 3 Raba Bima sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan Program Studi DIV Keperawatan Bima

Web : poltekkes-mataram.ac.id

Email : poltekkes.mataram@yahoo.co.id

D. JURUSAN DAN PROGRAM STUDI

Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram sampai saat ini memiliki empat jurusan yang menyelenggarakan Program Studi Diploma III, Program Studi Diploma IV dan Program Profesi Ners, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jurusan Keperawatan
 - a. Program Studi Diploma III Keperawatan Mataram
 - b. Program Studi Diploma IV Keperawatan Mataram
 - c. Program Studi Diploma III Keperawatan Bima
 - d. Program Studi Diploma IV Keperawatan Bima

- e. Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan dan Program Profesi Ners
- 2. Jurusan Kebidanan
 - a. Program Studi Diploma III Kebidanan
 - b. Program Studi Diploma IV Kebidanan
- 3. Jurusan Gizi
 - a. Program Studi Diploma III Gizi
 - b. Program Studi Diploma IV Gizi dan Dietetik
- 4. Jurusan Analis Kesehatan
 - a. Program Studi Diploma III Teknologi Laboratorium Medis
 - b. Program Studi Diploma IV Teknologi Laboratorium Medis

E. AKREDITASI INSTITUSI

Berdasarkan keputusan BAN-PT No.83/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2018, Poltekkes Kemenkes Mataram terakreditasi dengan peringkat terakreditasi B.

F. AKREDITASI PROGRAM STUDI

Tabel 1. Daftar Akreditasi Program Studi

NO	NAMA PRODI	AKREDITASI BAN-PT/LAM-PTKes				MASA BERLAKU
		STRAT A	NILA I	NO SK	TANGGAL	
1	DIII Keperawatan Mataram	B	304	0308/LAM-PTkes/AKr/Dip/I/2016	31 Januari 2016	31 Januari 2021
2	DIV Keperawatan Mataram	B	302	0982/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2016	27 November 2016	27 November 2021
3	DIII Keperawatan Bima	B	330	0070/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2019	23 Februari 2019	22Februari 2024
4	DIV Keperawatan Bima	B	327	0067/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2019	23 Februari 2019	22Februari 2024
5	DIII Kebidanan Mataram	B	309	0334/LAM-PTkes/AKr/Dip/I/2016	31 Januari 2016	31 Januari 2021
6	DIV Kebidanan Mataram	B	319	0998/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2016	27 November 2016	27 November 2021
7	DIII Gizi Mataram	B	307	771/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/2015	10 Juli 2015	10 Juli 2020
8	DIV Gizi Mataram	B	303	0952/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2016	30 Oktober 2016	30 Oktober 2021
9	DIII Analisis Kesehatan Mataram	B	306	340/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2015	09 Mei 2015	09 Mei 2020
10	DIV Analisis Kesehatan	B	319	0891/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2016	30 Oktober 2016	30 Oktober 2020

G. Distribusi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Sumber Daya Manusia pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram tahun 2019 sebanyak 257 orang pegawai dengan rincian sebaran Pegawai Negeri Sipil sebanyak 173 orang dan tenaga kontrak atau honorer sebanyak 84 orang. Jumlah Dosen secara keseluruhan sebanyak 106 orang dengan sebaran 101 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 5 orang berstatus tenaga kontrak. Data sebaran Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Data Sebaran SDM Poltekkes Kemenkes Mataram Status Pegawai Negeri Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

NO.	UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN							KESEHATAN							NON KESEHATAN							JML
		≤ SMA	DIII	DIV	S1	S2	S3	JML	≤ SMA	DIII	DIV	S1	S2	S3	JML	≤ SMA	DIII	DIV	S1	S2	S3	JML	
1	Direktorat	19	8	0	14	1	0	42	0	1	0	3	1	0	5	19	7	0	11	0	0	37	42
2	Jurusan Keperawatan	10	2	2	2	37	0	53	0	1	2	1	26	0	30	10	1	0	1	11	0	23	53
3	Jurusan Kebidanan	1	0	4	1	24	0	30	0	0	4	1	24	0	29	1	0	0	0	0	0	1	30
4	Jurusan Gizi	1	1	1	1	17	1	22	0	1	1	1	17	1	21	1	0	0	0	0	0	1	22
5	Jurusan Analisis Kesehatan	0	2	0	2	22	0	26	0	1	0	2	22	0	25	0	1	0	0	0	0	1	26
		31	13	7	20	101	1	173	0	4	7	8	90	1	110	31	9	0	12	11	0	63	173

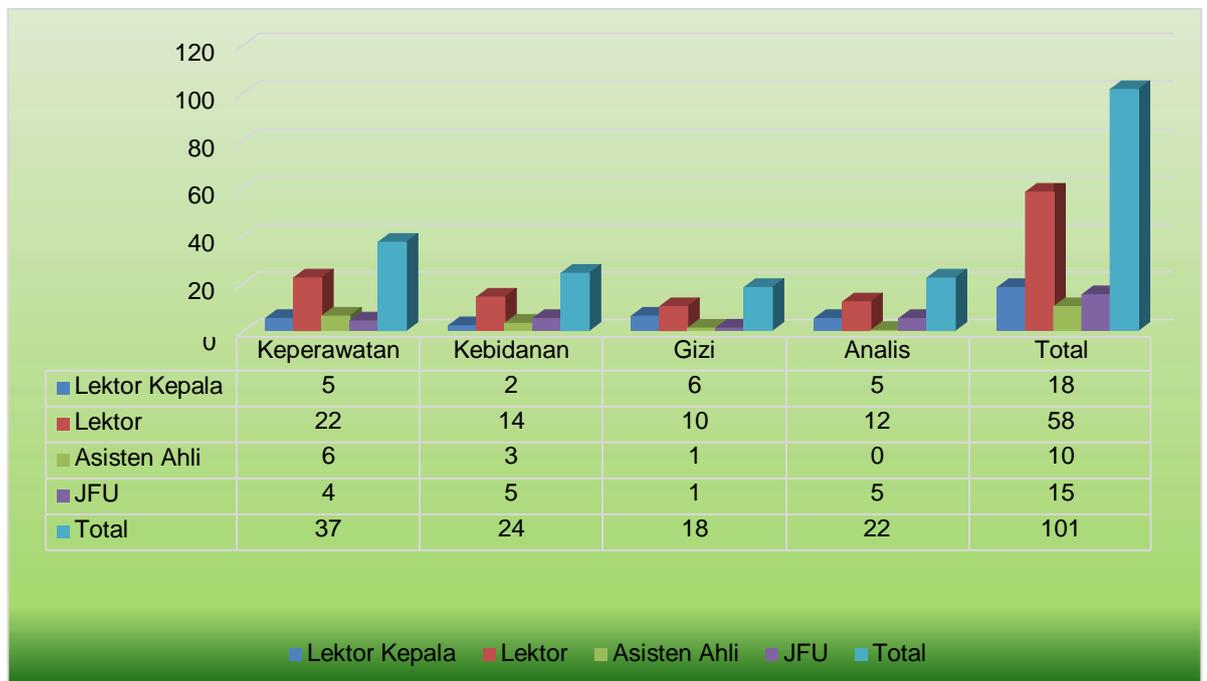
Tabel 3. Data Sebaran SDM Poltekkes Kemenkes Mataram Status Non Pegawai Negeri Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

NO.	UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN							KESEHATAN							NON KESEHATAN							JML
		≤SMA	DIII	DIV	S1	S2	S3	JML	≤SMA	DIII	DIV	S1	S2	S3	JML	≤SMA	DIII	DIV	S1	S2	S3	JML	
1	Direktorat	18	5		2	1	0	26	0	1	0	0	0	0	1	18	4	0	2	1	0	25	26
2	Jurusan Keperawatan	11	8	2	5	3	0	29	0	7	2	4	3	0	16	11	1	0	1	0	0	13	29
3	Jurusan Kebidanan	6	7	0	0	1	0	14	0	6	0	0	1	0	7	6	1	0	0	0	0	7	14
4	Jurusan Gizi	5	1	1	1	0	0	8	0	1	1	1	0	0	3	5	0	0	0	0	0	5	8
5	Jurusan Analisis Kesehatan	3	0	3	1	0	0	7	0	0	3	1	0	0	4	3	0	0	0	0	0	3	7
		43	21	6	9	5	0	84	0	15	6	6	4	0	31	43	6	0	3	1	0	53	84

Tabel 4. Data Sebaran SDM Tenaga Dosen Poltekkes Kemenkes Mataram Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

N O.	UNIT KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL										NON PEGAWAI NEGERI SIPIL										TOTAL SELUR UH DOSEN
		JENJANG PENDIDIKA N DOSEN			KESEHATA N			NON KESEHATA N			JM L	JENJANG PENDIDIKA N DOSEN			KESEHATA N			NON KESEHATA N			JM L	
		S2	S3	JM L	S2	S3	JM L	S2	S3	JM L		S2	S3	JM L	S2	S3	JM L	S2	S3	JM L		
1	Direktorat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jurusan Keperawatan	37	0	37	26	0	26	11	0	11	37	3	0	3	3	0	3	0	0	0	3	40
3	Jurusan Kebidanan	24	0	24	24	0	24	0	0	0	24	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	26
4	Jurusan Gizi	17	1	18	17	1	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
5	Jurusan Analisis Kesehatan	22	3	22	22	0	22	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
Jumlah		97	4	101	89	1	90	11	0	11	101	5	0	5	4	0	4	1	0	1	5	106

Sedangkan untuk Tenaga Dosen Fungsional Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2019 sebagai berikut :



Grafik 1. Pertelaahan Tenaga Dosen Fungsional pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2019

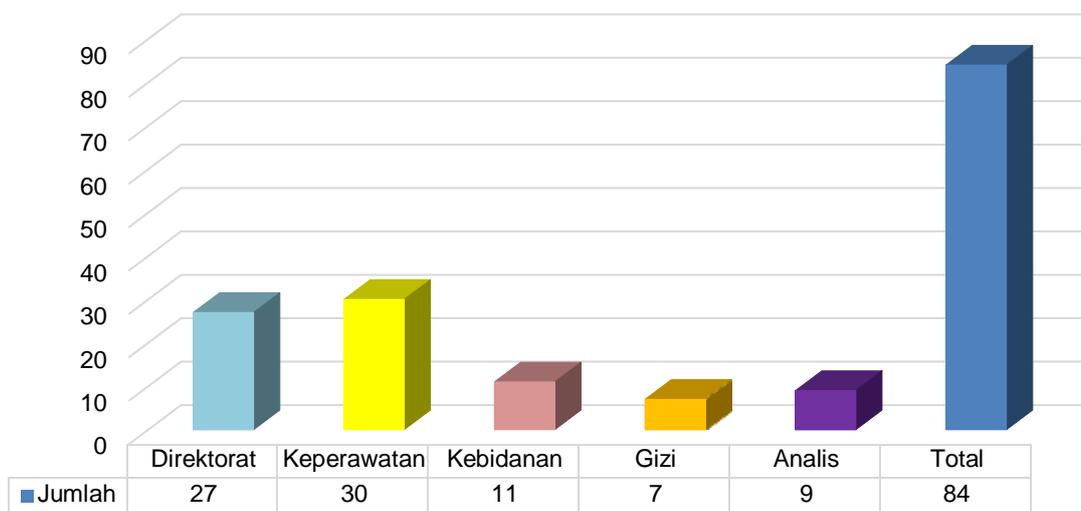
Pada Grafik 1 di atas terlihat bahwa proporsi dosen yang sudah fungsional di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram sebagian besar menduduki jabatan fungsional Lektor yaitu sebanyak 58 orang, diikuti oleh jabatan fungsional Lektor Kepala sebanyak 18 orang, kemudian asisten ahli sebanyak 10 orang dan sebanyak 15 orang menduduki jabatan fungsional dosen (JFU).

Dari grafik di atas juga dapat dilihat distribusi jumlah dosen yang fungsional di masing-masing jurusan, di mana terlihat bahwa proporsi tenaga pendidik yang sudah fungsional paling banyak di Jurusan Keperawatan yaitu 37 orang karena mengampu Empat prodi yaitu Prodi DIII Keperawatan Mataram, Prodi DIV Keperawatan Mataram, Prodi DIII Keperawatan Bima dan Prodi DIV Keperawatan Bima. Jurusan Kebidanan sebanyak 24 dosen, Jurusan Analis

Kesehatan sebanyak 22 dosen, Sedangkan paling sedikit di Jurusan Gizi Mataram yaitu 18 orang yang sudah fungsional.

Distribusi Tenaga Honorer berdasarkan penempatan bertugas di Poltekkes Kemenkes Mataram selama tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut :

:



Grafik 2. Pertelaahan Tenaga Honorer di Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2019

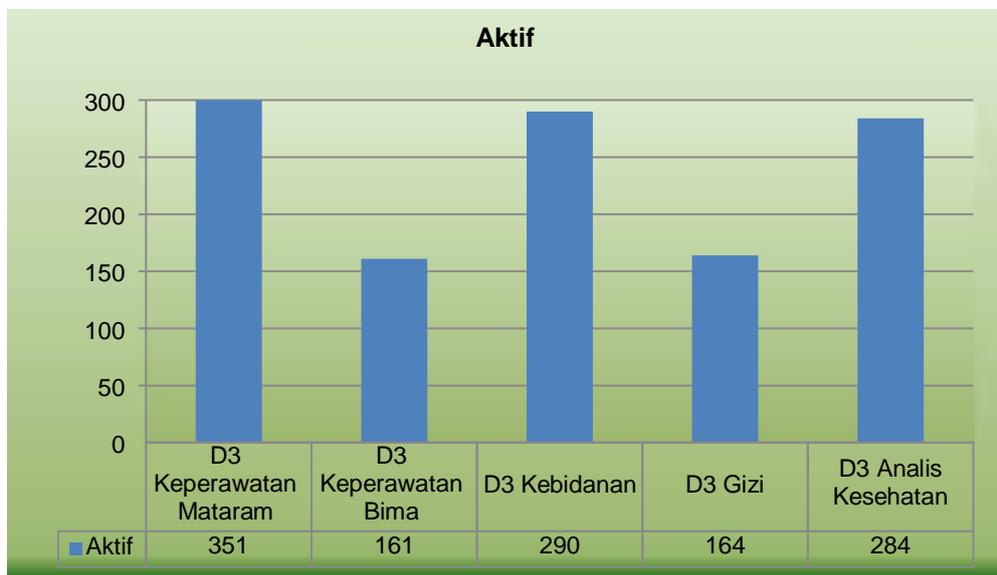
Dari Grafik 2. di atas tampak bahwa jumlah tenaga Kepegawaian Non PNS terbanyak pada Jurusan Keperawatan yaitu 30 orang atau 35,71 %. Jurusan Kebidanan sebanyak 11 orang atau 13,10% dan jurusan Gizi sebanyak 7 orang atau 8,33 %, Jurusan Analis Kesehatan sebanyak 9 orang atau 10,71 % dan Direktorat sebanyak 27 orang atau 32,14 %.

H. MAHASISWA

Data Jumlah Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020

Jumlah mahasiswa pada semester ganjil Tahun Akademik 2019/2020 secara keseluruhan berjumlah 2.352 mahasiswa, dengan rincian jumlah mahasiswa Prodi D3 sebanyak 1.250 mahasiswa (53,14%) dan jumlah mahasiswa Prodi D4 sebanyak 1.102 mahasiswa (46,85%). Terjadi penurunan jumlah mahasiswa yang disebabkan tidak adanya penerimaan mahasiswa baru pada Prodi D4 Keperawatan dan Prodi D4 Kebidanan.

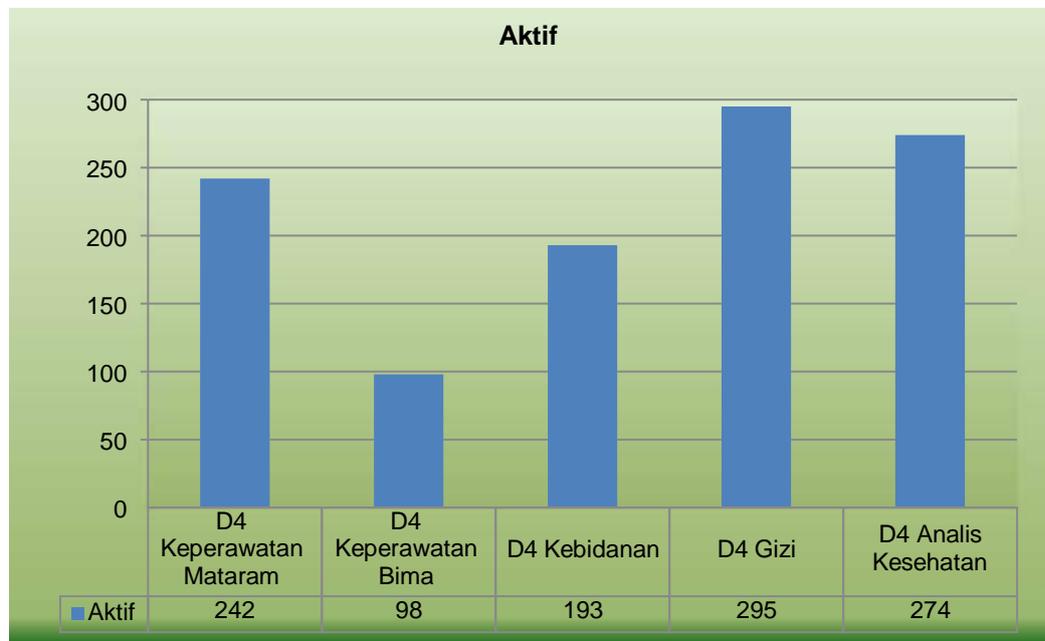
1). Program Studi Diploma Tiga



Grafik 5. Pertelaahan Mahasiswa Program Studi D3 Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 di Poltekkes Kemenkes Mataram

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah seluruh mahasiswa Prodi D3 pada semester ganjil Tahun Akademik 2019/2020 sebanyak 1.250. Jumlah mahasiswa Prodi D3 terbanyak ada Prodi D3 Keperawatan Mataram yakni sebanyak 351 mahasiswa atau 28,08 % dan paling sedikit pada Prodi D3 Keperawatan Bima yakni 161 mahasiswa atau 12,88%.

2). Program Studi Diploma Empat



Grafik 6. Pertelaahan Mahasiswa Program Studi D4 Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 di Poltekkes Kemenkes Mataram

Grafik menunjukkan bahwa jumlah seluruh mahasiswa Prodi D4 pada semester ganjil Tahun Akademik 2019/2020 sebanyak 1.102 mahasiswa. Jumlah mahasiswa Prodi D4 terbanyak ada Prodi D4 Analisis Kesehatan yakni sebanyak 274 mahasiswa atau sebesar 24,86 % dan paling sedikit pada Prodi D4 Keperawatan Bima yakni sebanyak 98 mahasiswa atau sebesar 8,89 %.

I. Program Unggulan

Untuk tahun 2019 ada program unggulan Poltekkes Kemenkes Mataram berjudul “Pembangunan Kesehatan Masyarakat Mandiri

berkelanjutan berbasis Budaya Lokal untuk Pencegahan dan Penanganan Stunting”

Lampiran 2: Hasil Wawancara di STIA LAN Jakarta

Anish_STIA LAN Jakarta.m4a

[00:00:00] I love Lia seolah-olah menyambut saya pak padahal Lombok International Airport kami salut pak ya bapak sejauh ini datang untuk segera menyikapi PPPTKN ini Di mana memang selain 7 sekolah kedinasan yang resmi kedinasan seperti IPDN kampus yang seperti kita ini memang menghadapi kebingungan luar biasa karena Resort kita ini tidak terserah kan 100% menjadi tenaga tenaga ASN di lingkungan kita ini bagussekali justru nanti kita bisa bersinergi dari temen-temen pariwisata karena kami pun sekarang ini sedang follow up ya day to day apa yang bisa segera kami lakukan meskipun 5 tahun terakhir ini atau mungkin bahkan sudah lebih memang ada rencana arsiparis itu akan Langsung dididik di Kami bersama dengan Amri tapi itu Pak tergantung pimpinan juga di Deputy Menpar Mendukung tiba-tiba ganti itu slow lagi slow motion lagi seperti itu, Nah ini rencana kami akan follow up lagi seperti itu dan memang dinamikanya cepat sekali Sehingga apa yang dari teman-teman pendidikan kedinasan Politeknik pariwisata Lombok bisa harapkan untuk kita saling belajar ya alhamdulillah teman-teman ini hadir kita memang sengaja menyelengi dengan luring Pak supaya ada pembatasan dengan pertemuan Insya Allah sekali lagi pembelajaran dari bapak ya dan ibu Izin saya menyebut nama dokter Farid

[00:02:09] Pak Jujuk ya pak dan Bu Rizda ya Saya pura-pura muda saja tidak menggunakan kacamata Alhamdulillah jika kita bisa sharing dan bisa saling mendukung pak ya Karena kalau kita tidak terserah berarti pilihannya ke Dikti ya pak ya pola Seperti apa bahkan mungkin selepas ini bisa saja diinisiasi oleh beberapa kampus saja kita bisa mengundang sebenarnya di de vokasi pada saat pertemuan kembali sayangnya de vokasi belum masuk Dari Komisi pendidikan itu 10 ya saya sudah menyampaikan itu bisa menjadi Link kita karena dia juga dosen STIA ketika saya bicara dia akan mendukung itu bahwa harusnya di de vokasi harus mendukung kita memberikan argumentasi argumentasi penguat kepada kita mungkin selepas ini kita mungkin aja kesepakatan mungkin minggu depan Kita adakan pertemuan webinar memperkuat posisi ajaklah Teman kita dari mana ya

kalau udah punya link dengan Unhan Kemudian kita juga STAN ya beberapa Kampus itu menyuarakan suara kami dan stand poin di de vokasi itu seperti apa karena harusnya mereka menjadi Bapak kita ya tanda kutip ya karena untuk protect our goals karena kita bagian dari negara ini untuk ikut mendidik

[00:03:37] Para mahasiswa untuk bisa menjadi tenaga Yang berguna Insha Allah Inshaallah silakan melanjutkan diskusi ini Pak kami mendukung sepenuhnya dan izin saya tidak bisa ikut full tapi hasil dari pertemuan ini juga menjadi catatan bagi kami catatan penting bagi kami untuk menjadi pola pembelajaran kami seterusnya yang memang kita tidak bisa lama-lama Idealnya juni-juli udah tuntas pembelajaran ini sambil mau dibawa kemana kampus kita masing-masing terima kasih sekali lagi atas kunjungannya bapak kami mohon maaf jika selama penerimaan mungkin ada kekurangan ya Bapak dari jauh-jauh gitu kan yang jelas kalau disini mungkin masih ada Pak ayam taliwang ada juga terima kasih sekali lagi wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

[00:04:34] Waalaikumussalam

[00:04:38] Baik Prof terima kasih atas sambutan dan arahannya selanjutnya kita langsung saja ya tapi mungkin sebelumnya izin bapak ibu karena teman-teman yang berkumpul di Zoom Meeting ini mungkin belum inform ya bahwa kunjungan Bapak-Bapak ini teman-teman ya yang ada di Zoom Meeting juga ada Bu Edah wakil Direktrur 1 Politeknik itu sebetulnya sebuah rangkaian penelitian rangkaian penelitian dari Politeknik Pariwisata Lombok yang fokus tentang pembibitan dan penyusunan Politeknik Lombok Pariwisata Lombok nanti mau ke mana setelah LPPTKN kurang lebih seperti itu di sini ada teman-teman dari penjaminan mutu ada temen-temen dari P2m juga bergabung, mungkin untuk mempersingkat waktu kami serahkan ke Pak Farid dan tim untuk menyampaikan presentasi silahkan Pak

[00:05:37] Terima kasih mungkin terima kasih banyak kami dari Politeknik pariwisata Lombok tentunya nya mohon izin saya harus buka dulu tujuan kami tadi sudah disampaikan Sebenarnya ini adalah isu ini sejak Februari kami sudah mulai pertemuan terus dengan 6 perguruan tinggi di bawah Kementerian pariwisata sejak Februari Februari ini kita sudah bergantian sudah ke Poltekpar

Medan ke poltekpar Makassar itu khusus untuk masalah ini internal dulu namun Kementerian kita menyerahkan sepenuhnya mungkin Mereka mereka juga di Kementerian ini ya kalau melihat dibidang masalah aturan yang kita harus ikut karena wawasan tentang kelembagaan sendiri masih lemah sehingga mereka menyerahkan ke kita buatlah kajian-kajian mungkin hasil kajian inilah baru disampaikan kan ke apakah DPR apakah presiden Apakah Diknas tapi yang jelasnya bahwa Kementerian kami sudah melakukan kan audiensi Kementerian Pak Nadiem sudah sudah lakukan secara lisan bahwa hasilnya itu memang menunggu reaksi dari bawah gitu menunggu reaksi dari apa karena sebenarnya Kita ini sudah masuk The Second Wave gelombang kedua kenapa saya katakan gelombang kedua saya sendiri kami dari Lombok tapi saya sendiri dari poltekpar Makassar saya sudah Rektor kepala jadi kami pernah mengalami tahun 1999 itu masih Pak Andika menteri kami hanya menerima hanya namanya BPLP dulu Jadi dia menerima pelatihan ada PNS ada juga umum tapi pelatihan-pelatihan pada saat itu kita buka 98 kita buka program reguler Pak Andika tahu pak menteri suruh berhenti ini tidak sesuai nah gitu pas Pak Andika ini 1 tahun berjalan sudah berakhir masa periodenya masuklah Pak Jeroajik Tahun 2001 disuruh angkat kembali harus beliau mau tanpa ada surat apa gitu hanya kebijakan mau saja akhirnya kita buka kembali jadi saya masuk dulu di poltekpar Makassar udeswara saya udeswara

[00:08:21] Berarti Bapak orang Solo

[00:08:27] Jadi saya udeswara nanti 98 baru kita berubah menjadi dosen Itulah prosesnya sehingga sekarang tiba-tiba muncul lagi nah saya tanya para founder di Kementrian ini kepala badan apa sih sejarahnya kenapa sampai kemarin kami menerimanya saja pelatihan terus tiba-tiba kita menerima umum lalu sekarang kita dimasalahkan lagi jadi dulu itu ada 1 hal ini mungkin sebelum Ibu meninggalkan kami ada satu hal kami juga sudah sampaikan Universitas pertahanan Politeknik pertanian yang membuat sampai tidak jadi RPP ini muncul Bu ada dua alasan satu Kemendiknas waktu itu belum siap mencetak sumber daya manusia yang terampil yang dikeluarkan kan oleh ptkl sehingga di unpending kedua yang paling kuat ini ada asosiasi ptkl Bu jadi sebenarnya nya justru asosiasi ptkl ini yang menggugurkan ini kata Kepala Badan kami kemarin Pak Putu laksaguna Kementerian pariwisata saya tanya apakah itu masih ada aduh Pak Farid Saya sudah tidak dengar lagi itu nah ini sebenarnya ini kita harus bentuk Bu asosiasi PTKL ini kita resmikan dan kita buat dinotariskan dan sebagainya ini sangat kuat kalau kita buat itu ini kita tidak punya

[00:10:06] Sepertinya ada pak cuma mungkin informal

[00:10:09] Itu yang diformalkan bahkan kalau bisa di notariskan ini memperkuat itu satu yang kedua nah sehingga kita tetap menerima di announce lah pada masa itu Pak Jero Ajik Tetap menerima MU Masih forum komunikasi saja Sedangkan Forum Komunikasi saja sudah bersuara apalagi kalau sudah asosiasi nah ini mohon maaf kami ini ini mungkin suara ini Kita bisa sampaikan ke ptkl yang lain kemudian nanti didengar oleh menteri langsung kita launching kita akan bentuk sesegera mungkin itu mungkin kira-kira apa namanya nya yang berikut tujuan kami datang ke sini adalah sekaligus menyampaikan kira-kira buah apa sih yang bisa kita langkah-langkah selanjutnya Kalau baru nanti ini keluar Apakah itu jadi keluar Unhan beda Bu mohon maaf saya sendiri baru tahu Setelah saya di sana setelah saya di sana baru tahu ternyata kami tidak memilih diantara dua tidak juga kedinasan tidak juga ptkl karena disuruh memilih waktu itu dan dua-duanya tidak dipilih Jalan begitu saja itu kata mereka akhirnya ini bagaimana ceritanya memang agak unik Pak iya unik mangkanya justru kalau saya bu tadi saya ngomong Bapak-bapak bilang kalau memungkinkan ini "unhan ini bisa menjadi juru selamat kita" karena kalau kita dirubah harus dia dirubah juga kan gitu ya kan kalau dia tidak dirubah berarti kita ikut Dia tidak punya PP khusus unhan kan tidak ada betul tidak Bu dari segi kebijakan Dia tidak punya PP PP hanya tiga tuntutan dari undang-undang nomor 12 tahun 2012 hanya keagamaan penyelenggaraannya penyelenggara pendidikan di kedinasan dan ptkl hanya 3 tidak ada 4 berarti kalau unhan Bertahan begitu berarti kita selamat itu kira-kira sementara ini sementara seperti itu karena tidak mungkin dibeda-bedakan ya kan logikanya seperti itu kita ikut ya unhan juga harus ikut kalau unhan tidak kita juga ikut tetap jalan aja tetapi tentunya kita sebagai orang akademisi ada hal lain yang kita harus dari segi akademisi nah sehingga ini hasil kami Bu bisa mungkin kami share ya kan dan mohon juga bantuan bapak ibu ada juga kami buat instrumen wawancaranya mohon diisi kita bagikan kita share agar ini memperkuat apa namanya kita tidak perlu membuat kajian-kajian cukup kajian ini meskipun pariwisata judulnya tapi pariwisata judulnya bisa mewakili untuk ptkl lain nah gitu kira-kira, kami sangat berharap Juga tentunya nya dukungan dari sejalan ini untuk kita bersama-sama bukan hanya sekedar pertemuan ini tapi ditindaklanjuti seperti apa yang disampaikan Prof kita buat Meeting Zoom 1 atau 2 kali Yang pertama kita keluarkan adalah bahkan kita ptkl makin in banyak ikut langsung kita canangkan untuk organisasi asosiasi ptkl itu yang paling kuat kita sudah punya wadah untuk berbicara punya wadah

[00:14:17] Mungkin sebelum diajukan pertanyaan. Terima kasih Pak Farid ini membuka wawasan kami juga memperkuat bukan hanya membuka ya tapi Insyaallah memperkuat memperkuat rasa kebersamaan kita sebagai Politeknik dan akan terkena dampak langsung dari LPTKN ini Saya sebagai Direktur berharap dan menyampaikan salam kepada direktur di politeknik pariwisata ini Bahwa kami bersedia untuk berkolaborasi dari hasil ini mungkin segera Banyak bertanya sharing informasi tapi lepas dari ini Temen-temen tolong disepakati kapan in this month Gitu kita adakan pertemuan dengan Dirjen vokasi Mempercepat mungkin dari online saja dan kita ajak teman supaya kuat paling tidak 50 + 1 lah dari kemarin kemarin juga sudah melakukan webinar dengan judul Niqab massal industri dan ini ya Poltek pertanyaan di kita seperti apa karena kita ini kan social side seperti itu baik terima kasih Pak Farid terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir Insya Allah ini akan menjadi catatan penting bagi kita atau nggak kita bekerja sama karena kebutuhan itu kebersamaan kepentingan membuat kita kuat Insya Allah teman-teman tolong di follow up kita memaksimalkan apa yang bisa kami bisa bantu Bapak silahkan Dan saya mohon izin left terima kasih

[00:16:09] Kami sebelum ibu sudah google form nya di mana google form nya maksud nya kita mau share ke mereka yang contohnya kirim aja ke saya saya kirim ke ibu

[00:16:27] Ini google form nya Bu mohon izin ini google form nya nanti kami akan share ke kita buat group aja Bu ya bisa

[00:19:09] ptk dulu ya ptk ini sangat Kuat sehingga majunya bersama-sama Bagaimana kalau kita juga sekarang itu artinya bergabung gitu ya karena kesehatan sangat banyak sekali gitu tapi sekarang yang Mungkin yang sudah agak aman itu perindustrian kalau perindustrian aman karena itu langsung mengagresif mungkin ya jadi dia Kelihatannya tidak diotak-atik Tapi kalau yang lain kan sama Saya semacam memberikan masukan artinya hari ini saya ini ini istilahnya peristiwa seperti ini alami yang kedua kali yang pertama yaitu pada tahun 2003 pada waktu undang-undang sisdiknas itu keluar itu memang sudah diancam untuk semua PTK itu dibubarkan dan bahkan sudah digabung nggak tahu dulu dia itu mau digabung kemana yang jelas kalau STIH dulu Mau digabung ke UNJ Yang di Jakarta ke UB di Bandung tapi kemudian kita bergerak

bersama Pak nah tapi kita mungkin harus mempunyai konsep memang Barangkali Karena sekarang itu semuanya nya ada tuntutan nya dalam membentuk kompetensi yang Jelas gitu ya mungkin kita juga harus Mengemas kompetensi apa yang masing-masing itu dibangun kemudian apakah itu Belum bisa dilakukan oleh perguruan tinggi negeri yang ada atau perguruan tinggi negeri swasta nah itu selalu yang akan ditanya dari dulu sampai sekarang selalu itu barangkali itu yang perlu kita siapkan kan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

[00:21:34] Ada yang mau direpon

[00:21:42] Terima kasih Prof dari apa yang disampaikan tadi memang dari kami sudah mempersiapkan beberapa hal yang terkait dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika nanti RPP PTKL itu akan di sahkan oleh Presiden Namun demikian kami kemarin membuat kajian di beberapa Daerah yang di mana disitu sebagai user langsung Dari kampus kami kami sudah menyiapkan terutama dari sisi tresses tadi Yang kedua dari sisi kebutuhan yang ada di kabupaten kota di wilayah 5 provinsi wilayah kerja Politeknik pariwisata Lombok nah di sana kalau dikatakan program kedinasan yang dimaksud oleh RPPL itu sendiri Kita kampus yang sebesar poltekpar Lombok mengajar atau Katakanlah input intinya itu adalah cuma katakan 50 mahasiswa itu saya pikir tidak relevan dengan jumlah fasilitas yang kami miliki yang kedua adalah pertimbangan dari sisi industri pariwisata kami di asosiasi Bapak Ibu sekalian sudah punya mou dalam negeri maupun luar negeri terkait dengan masalah outcome mahasiswa kami Dari sini kita bisa melihat jika sekian kali mengeluarkan alumni selalu kurang apalagi tidak diadakan pendidikan khusus reguler kelebihan dari kita Mohon maaf bisa kami sedikit apa namanya kami sama dengan saudara tua kami di Bandung NHI sama semuanya rata-rata hampir memberikan supporting kepada industri pariwisata maupun di ekonomi kreatif rata-rata mahasiswa kami sudah berada di sana sementara kalau kami di program kedinasan ini maka kami membuat satu bentuk pola yg tadi menjadi prototype Yang kami kembangkan berdasarkan masukan-masukan dari stakeholder sekaligus dari lembaga-lembaga yang sangat memerlukan tenaga kompetensi di bidang kepariwisataan itu menjadi di kita berpikir adanya poligami kelembagaan dari kami suatu lembaga itu ada 2 Ibu satu-satunya dikelola oleh kementerian satu lagi oleh Kemendikbud itu sebagai solusi untuk mengharmonisasi ketika terjadi sewaktu-waktu RPP ini sudah tidak ditawarkan lagi Namun demikian dari kunjungan kami ke Kementerian Kesehatan di Politeknik Kesehatan itu rata-rata

di asosiasinya menyatakan tadi salah satu teman kami mengatakan seperti tadi adanya suatu bentuk nilai tawar yang sangat signifikan dengan kebutuhan di sisi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Pasar kerja Ibu Endang Jadi dari sana kita bisa melihat Kemudian dari hasil survei kami di kabupaten kota NTB maupun di Kalimantan Timur kemarin pembangunan pariwisata yang ada di Kalimantan Timur Kita mau melihat program kedinasan itu kok kita tidak bisa menerima intake nya dari SMA atau SMK karena apa mereka sudah rata-rata memiliki ASN yang disana tetapi mohon maaf ada satu bentuk permasalahan dan secara lack of Interest di kabupaten kota pasca Pilkada bahwasanya opd Dinas Pariwisata rata-rata adalah ASN yang tidak dimaui sama pimpinan jadi rata-rata tidak mempunyai kompetensi kemudian Kalau kami sudah membuat suatu prediksi jika terjadi sewaktu-waktu maka kami akan membuka pendidikan profesi kami akan membuka pendidikan profesi khusus untuk pemenuhan kompetensi peningkatan peningkatan kompetensi ASN di daerah Jadi kami memproyeksikan seperti itu Bapak Ibu sekalian sehingga kalau langkah ini menjadi mungkin nanti menjadi memiliki pemikiran yang sama kami mohon istilahnya sumbangsih pemikiran kira-kira kalau di kesiapan di politeknik atau lembaga kita Kami juga perlu nyontek sedikit Bu supaya nanti kami gini Bu kami bisa memperkaya sub desain yang minimal memperkaya apa yang kita miliki di ptkl gitu kami berusaha dari beberapa Kementerian salah satunya kemarin secara kajian empiris dikelola jadi perguruan sekolah atau institusi yang dikelola oleh seperti Politeknik pembangunan pertanian itu rata-rata yang dikelola dikelola kembali oleh pihak Kemendikbud itu mohon maaf sudah tidak memiliki QA nya sudah down sekali ya Jadi tidak memiliki apa namanya potensi nilai tawarnya dari sisi kompetensinya di dunia kerja itu pertanian dan sekarang dari hasil survei kami di Nusa Tenggara Barat kemudian di Kalimantan itu rata-rata beralih ke Kemendikbud kemudian menjadi smk-nya bukan pertanian lagi lagi tapi SMK komputer pembangunan saya juga asesor SMK di sini saya melihatnya ada perubahan yang sampai hari ini mubazir tenaga tenaga kita yang dari IPB yang memang benar-benar fokus terhadap pengembangan ketahanan pangan di situ di pariwisata pun demikian sama intinya Kami ingin mencari konsep yang harmonis dari seluruh Kementerian Jangan sampai ada yang klaim ini yang paling benar ini yang paling benar tapi kita mencoba untuk sama-sama membangun anak bangsa dan kami tadi menemukan beberapa piranti tambahan energy tambahan dari unhan ternyata sangat kompleks Pola dan strategi kesiapan di unhan ini perlu menjadi kita perlu bench marking ke sana terkait dengan konsep-konsep Strategi untuk penyikapan terhadap RPP ini saya pikir itu ibu Endang Terima kasih banyak

[00:29:40] Masih ada lagi yang ingin menyampaikan Bang Budi silakan dari Sekprodi Manajemen Sumber Daya Aperatur ini mungkin salah satu yang paling bisa kami pertahankan prodinya katanya kan prodinya harus spesifik

[00:30:40] Terima kasih ih mohon izin Pak tadi penjelasannya saya langsung berpikir strategi ini yang mungkin bisa ditambahkan untuk memperkuat Politeknik di Lombok poltekpar ya Adalah salah satunya terkait dengan salah satu industri yang masuk dalam Peraturan pemerintah untuk diberikan sertifikasi kompetensi Dalam arti menghadapi Mea ya pak adalah pariwisata dan juga Ketenagakerjaan juga masuk dalam industri yang karena nanti ada pertukaran Dari negara lain itu satu mungkin bisa diperkuat bapak adalah perhatian juga dan yang kedua tentang perhatian berkali-kali disampaikan oleh Wekan Sabarito sebelumnya juga dikatakan link and match kalau link and match Itu lebih cocok oleh Politeknik Kenapa Politeknik tidak diberi ruang yang luas Karena kita punya semua hal yang diperlukan salah satunya nya Adalah sertifikasi kompetensi Artinya kita menyiapkan lulusan untuk bisa diterima di dunia kerja dua hal itu yang tentunya dimasukkan ke strategi mungkin juga di poltekpar diperkuat dengan kurikulumnya Tinggal nanti bagaimana memperkuat saya setuju dengan ibu Mala tadi karena memang sesuai dengan fungsi Harus mencari strategi yang lebih kuat lagi tetapi mungkin diperkuat tadi link and match antara Profil lulusan kita kemudian sertifikasi kompetensi mahasiswa dengan dosen yang diperkuat artinya memang Kita sudah sesuai dengan tujuan pemerintah supaya tidak akan nanti paling tidak mengurangi pengangguran kemudian apalagi teknis sekali pariwisata kan mereka Industri pariwisata tidak tahu misalnya spesifik skill tertentu misalnya resepsionis atau katakanlah yang skill tertentu lah ya saya kurang faham Kalau tidak diberikan pelatihan berkali-kali sama seperti Poltekkes mereka bahaya sekali mereka bekerja tidak sesuai dengan SOP Skill-nya belum mumpuni artinya itu memang sudah on the track poltekpar itu sudah on the track itu yang harus dikedepankan memang masalahnya KPK soal anggaran karena anggaran itu kalau misalnya yang tadi Kalau asosiasi ada building powernya Ini pemikiran saya mungkin saja anggaran yang besar itu kan termasuk Mohon maaf kalau Salah dikoreksi artinya sangat besar sekali memang semua hal itu masuk di situ mulai pegawai jadi kesannya memang besar Banyak pekerja yang harus dikerjakan sehingga kalau dibuka ke dalam curiganya jantungnya sama jadi kalau dikeluarkan komponen-komponen itu kita yang masyarakat kecil yang sakit itu yang mungkin fikiran saya akhirnya mengatakan sepertinya apakah perlu sampai ke sana tapi kalau tidak ya mungkin soal anggaran itu ya perlu diperdalam juga tapi kalau kita on the track dengan tujuan pemerintah tentunya kita mempunyai

pertanggung jawaban untuk bisa kita juga tidak besebrangan apalagi soal vokasi terima kasih

[00:34:40] Terima kasih Bang Budi mungkin ada yang mau direspon atau kita lanjut Pak

[00:34:47] Terima kasih Pak Budi atas masukannya nya dan ini luar biasa tadi kami di politeknik pariwisata lombok itu rata-rata Pak dari mahasiswa sudah tersertifikasi profesi Pak rata-rata jadi Mulai sejak lulus sudah memegang sertifikasi Pak dan disamping kami ini Master asesornya kanan kiri asesor semuanya ini Alhamdulillah Mengapa On the track dengan pihak industri terhadap apa yang kami lakukan itu rata-rata Pak dari kami meniru dari 6 PTNP semua yang dari kami seperti saudara generasi ke-3 Pak ya poltekpar Makassar itu kemudian baru generasi keempat kami pak itu sudah kami persiapkan seperti itu asosiasi profesi kepariwisataan itu sudah ada MOU dalam maupun luar negeri terkait dengan ini kalau kita melihat Pak Budi aspek anggaran saya pikir bukan satu-satunya kok aneh sekali anggaran dikaitkan dengan Sebenarnya kalau dilihat dari temuan KPK itu efisiensi katanya sekarang efisiensinya Anggaran bagaimana kita sudah melakukan seefisien mungkin bahkan sesuai dengan outcome dari tujuan seperti yang di sistem penjaminannya pun sesuai dengan BAN PT sekarang kita melihat seperti mohon maaf di Republik ini seakan-akan apa ya Ada Aura persaingan ya diantara Kementerian untuk mencari tren ya Seperti itu kalau saya sih sebenarnya kumpul aja dari antara menteri terkait hal ini Insya Allah selesai pak kita ini kan sebenarnya kalau di kementerian pariwisata kita diminta untuk membuat kajian sehingga nanti di pihak Kementrian nanti dari kajian-kajian 6 PTNP itu memberikan kontribusi terhadap bentuk apa yang sudah menjadi solusi-solusi terbaik terhadap penyelenggaraan di Poltekpar di PTNP ini Inilah yang menjadi mungkin Bu Mala dan teman-teman di sini rata-rata teman di stia lan kan sudah tahu istilahnya rata-rata on the track semuanya dari seluruh sistem yang dibentuk dibangun sekian lama Penjaminan mutu demikian sudah kita mengikuti dari pola yang sudah ada dari BAN PT sampai hari ini Pak kami baru di akreditasi program studi Insyaallah tahun ini kita Ajukan untuk institusi itu pertama Pak jadi percepatan percepatan ini kita bangun sesuai dengan kebutuhan industri jadi mulai dari mahasiswa kami bahkan kalau kita melihat dari tujuan membangun SDM pariwisata sampai dosen kami kami kuliahan ke Taiwan di coyang University bahkan Kami selalu memberikan apresiasi Yang besar saat ini Bapak Ibu sekalian temuan-temuan itu memiliki kontribusi terhadap industri temuan temuan riset kami Yang sekarang ini seperti apa namanya konsep indikasi bencana Pasca covid

itu Pak Farid kemarin yang ahlinya selalu mengungkapkan tentang berbagai macam strategi-strategi yang terkait dengan kebutuhan industri baik sebelum pandemi maupun masa pandemi mungkin itu Pak

[00:39:03] Amanat undang-undang Kita itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa kan ini harus ini saya copy paste dari unhan jadi bagus sudah argumennya bahwa harusnya tidak perlu ada dikotori karena Persoalan ini adalah persoalan bangsa yang tidak bisa dilaksanakan oleh satu Kementerian nah gitu itu persoalan intinya mendasar tidak bisa dilakukan satu Kementerian harusnya tidak perlu lagi Cuma karena ini tuntutan undang-undang Maka saya katakan kalau saya ditanya kira-kira akan ditandatangani tidak oleh presiden kalau tuntutan undang-undang pasti ditandatangani kecuali Ya kan kita bersuara melalui DPR untuk merubah undang-undang pasti PTKN kita akan muncul Tapi selama undang-undang ini tidak dirubah ini akan dikejar terus oleh KPK karena KPK itu sifatnya dia tidak akan berhenti kalau tidak tuntas dia kejar itu terus sehingga memang suara asosiasi sangat penting sekali bersuara kalau kita sudah kalikan 3 4 kali 5 orang Ini sudah masuk meskipun sedikit keranah politik Pasti DPR akan lihat juga loh ini cukup banyak juga nah kan gitu kalau ini semua tidak menyetujui catatan dari Kemenkumham kemarin waktu saya juga ikut bersama beliau bersama internal PTNP kita Kita undang dari biro hukum Kementerian Diknas Bu kita undang yang kedua dari direktur harmonisasi Kemenkumham kita undang berbicara yang jelasnya Kalau hukum itu saya sampaikan kan kalau kami tidak ada masalah mau ke Diknas tidak masalah Bagi kami ya saya pribadi Karena kita PNS cuma 2 pertanyaan saya kira-kira bisa tidak dijamin anggaran prakteknya mahasiswa ini tetap jumlahnya yang kedua adalah jaminan kualitas luarannya mahasiswa itu saja Kalau hukumnya Tidak bisa ngomong malah saya ditanya balik Kenapa Pak Farid nanya begitu Itu Apakah Pak Farid tidak yakin dengan luaran dari Kemendikbud Saya langsung angkat bicara saya bilang punya bukti saya tidak hanya bersuara begitu saja saya dipanggil diminta oleh direktur Politeknik Negeri Banyuwangi sebagai tenaga ahli untuk membuka prodi destinasi pariwisata

[00:42:30] Yang kemudian jadi tidak sembarangan membentuk prodi yang ada di kampus jadi sebetulnya kalau kita mau mengikuti polanya kalau jadi disahkan saya sih sebenarnya ingin menchallenge kalau tadi pak sampaikan saya kira menarik bahwa pasar NTB itu hanya 20 yang menerima CPNS bahwa kemudian kalau kemudian dan kita tidak menerima dan atau katakanlah yang dilakukan kita kemudian menjadikan mereka PNS mungkin dari aspek efisiensi juga tidak efisien

[00:52:12] Terima kasih Pak Hendri Bagus memang selain kita terus mencoba menjajaki atau istilahnya jalur formasi kita coba carikan kurang lebih dipetakan seperti apa setelah kita melakukan kajian ini kami juga membuat lahan seperti kata Pak Hendri kami mencoba menchallenge diri kami sendiri ya kami membuat lahan pak dan sudah kami sampaikan ke pimpinan di LAN harapannya lahan kami tersebut nanti bisa saya share sama Pak Farid ya apa yang ini sangat spesifik sangat protect sekali tapi bisa sebagai masukan sebenarnya kami sudah membuat banyak sekali lahan semenjak KPK mengeluarkan mempublish penelitiannya lalu PPTKL masih versi PPT pak dan draft nya keluar kami buat lahan kami sudah sampaikan ke pimpinan di LAN harapannya pimpinan di LAN bisa berkomunikasi dengan Menpan karena kalau kita mengambil jalur formasi untuk mengantisipasi PPTKL ini kalau memang tadi pada akhirnya diketok ya kita sudah mulai memperbaiki berbenah begitu pak ya harapan kami seperti kata Pak Hendri atau di sini Mas Ari dicat menyampaikan di Kemenparekraf ada CF Aditia kami juga punya setidaknya ada dua JFT yang di bawah pembinaan kami yaitu analis kebijakan dan widiswara tapi mungkin kita jangan hanya fokus di JFT tapi formasi-formasi lain yang memang sesuai dengan fungsi kita seperti bapak di pariwisata kalau patokannya hanya JFT sempit sekali kita sulit untuk berbenah kurikulum mungkin begitu pak mungkin ada yang mau direspon dari Pak Hendri Gus

[00:54:16] Sedikit saja Pak Hendri Gus sangat menarik sekali memang saya katakan dari awal tadi bahwa tidak mungkin mengelola pendidikan di republik ini dengan archipelago nya pulau begitu besar akan tercampur sulit di lain pihak masih banyak anak-anak yang belum terjangkau pendidikan khususnya di kawasan timur apalagi Pak Jokowi sekarang ini sudah mencanangkan khususnya daerah-daerah terluar perbatasan kami kementrian pariwisata sudah melakukan itu bahkan sudah merekrut 10 orang beasiswa dari Kabupaten Belu

Lampiran 3: Hasil Wawancara di STAN Jakarta

Aura_STAN2_rev1

[00:00:00] Setahun yang lalu pada bulan juli dalam acara kami diesnatalis seperti itu ya kami mengundang beliau dari vokasi untuk Menyampaikan sepatah gambaran terkait pendidikan vokasi, namun kami mengundang perwakilan dari ppkl juga tujuannya ya Ada semacam aspirasi dari masing-masing ppkl yang bisa disampaikan kepada beliau Pak Dirjen Vokasi waktu itu Pak Faisal dari NHI Bandung juga Menyampaikan beberapa poin yang mungkin kurang lebih sama seperti bapak sampaikan juga terkait dengan bagaimana Poltek pariwisata tindak lanjutnya setelah kami melakukan audiensi berdiskusi dengan Dirjen vokasi hal lain yang kami ingin lakukan menyusun semacam kajian singkat dan kami sampaikan Ke pimpinan kami kementerian keuangan Perlu kami sampaikan bahwa PKN stan ini ini adalah ppkl di bawah kementerian keuangan waktu itu di tahun 2020 ya itu kami tidak perlu melihat ya Memang sudah ada draft namun draft itu nampaknya dibahas ulang sehingga kami belum mendapatkan gambaran lebih jelas RPP ini seperti apa begitu Karena di draft awal seperti bapak sampaikan sempat rancu kemudian mundur kembali Kemudian di akhir 2020 nampaknya RPP ini diajukan begitu ya waktu itu seperti yang Bapak sampaikan kalau di kami ini ada Direktorat Jenderal anggaran Kebetulan dilibatkan dalam proses atau dimintai pendapat dari sisi penganggaran terkait dengan proses penyusunan RPP ini jadi kalau boleh kami sampaikan bahwa Dari tim itu sendiri Lebih banyak berkomunikasi dengan Kementerian nya selaku pemilik PPKL Tidak kepada PPKL nya begitu ya. Sehingga kami memberikan beberapa masukan Kementerian yang kemudian di follow up yang dimana kementerian keuangan menyampaikan ke Kemendikbud ya untuk hal-hal yang memang dibutuhkan atau Yang memang perlu mendapatkan perhatian Jadi kalau tadi Bapak menyampaikan ada poin-poin kajian KPK kami sudah menyoroti ada empat hal yang memang itu kami perhatikan terkait tata kelola, kelembagaan, SDM dan satuan B. Empat hal itu yang menjadi perhatian dalam hal ini yang dimana kami perlu sampaikan ke kementerian keuangan. Nah di sini hal yang kami lakukan atau yang kami regulasi ya beberapa hal yang kami cermati dan tadi juga sudah disampaikan juga oleh bapak-bapak sekalian dari poltekpar bahwa arah dari Kemendikbud itu peraturan PPKL di sini Melihat bahwa adanya tumpang tindih antara ppkl dengan PPN maupun PPS sehingga di sini kami sebutkan Mewujudkan pengelolaan keuangan negara tetap perlukan SDM dengan keterampilan khusus Spesifik jadi nampaknya itu yang kami lakukan saat ini. Jadi bagaimana kami menciptakan profil lulusan PKN STAN Bersifat spesifik dan tadi juga bapak sampaikan memang arahnya di PPKL itu mengarahkan bahwa PPKL ini Bersifat kedinasan yang kami ketahui bukan berarti dari yang sudah Tetapi Kami tetap bisa Pak yang saya pahami ya tetap kita bisa Merekrut mahasiswa seperti itu dari umum namun nanti lulusannya atau output atau lulusan yang kita hasilkan sudah ada ikatan dinas dengan unit instansi baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah Terkait hal tersebut maka Disini yang kami lakukan adalah bagaimana bisa menghasilkan SDM dengan keterampilan yang bersifat khusus dan spesifik ini yang kami tuju adalah keterampilan

yang terkait dengan keuangan negara di mana hal itu tidak dilakukan atau mungkin masih sedikit dilakukan oleh PPN atau PPS Kemudian spesifikasinya adalah kami menghasilkan lulusan yang nanti langsung diserap jadi ada semacam ikatan dinas tidak hanya dengan kementerian keuangan namun juga dengan Kementerian lain dan pemerintah daerah, nah memang yang disoroti di sini terkait dengan aspek Akademik maupun non akademik karena Kalau kami melihat dari apa rencana pengaturan tadi banyak hal yang kemudian yang sudah awalnya di atur oleh Kementerian pemilik ppkl namun nanti kemudian dilanjut oleh Kemendikbud.

[00:06:16] Di sini jadi yang kami seperti yang kami sampaikan sebelumnya jadi semangat yang kami keluarkan itu yang kami sampaikan bahwa ppkl itu terbit tapi ingin ada beberapa masuk yang disampaikan Kemendikbud ya salah satunya Bagaimana ppkl ini masih tetap memiliki keleluasaan dengan tetap memiliki kelonggaran dalam hal memanage PPKL itu Jadi kalau yang kami ketahui Kemendikbud ini sempat mengundang Kementerian selaku pemilik ppkl untuk berdiskusi atau mungkin diskusi secara terbatas Bukan dengan ppkl-nya namun dengan Kementerian sebagai pemilik ppkl.

[00:07:16] Jadi spesifiknya nya bahwa PKN STAN ini tadi sudah kami sampaikan PPKL di bawah Kementerian saya sepakat tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak di pariwisata jadi tidak kemudian sepenuhnya bisa dipersamakan karena lulusan kami nanti langsung diserap di Kementerian.

[00:07:49] Yang kami soroti di sini bahwa terkait dengan perubahan tersebut PPKL Yang sebelumnya hanya untuk memenuhi jadi kalau dikonsep PP nya itu kan hanya untuk kementeriannya namun kami mengusulkan yang kami sampaikan ke pimpinan di Kementerian bahwa tidak hanya untuk kementerian keuangan tapi bisa juga untuk Kementerian lain maupun instansi pemerintah daerah namun tetap dalam lingkup keuangan negara nah ini yang kemudian yang kami coba sampaikan gitu ya supaya nanti di ppkl itu hal tersebut sudah terakomodir Artinya Kami tetap menghasilkan lulusan yang langsung diserap oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang tidak hanya kementerian keuangan tetapi lebih luas lagi

[00:08:44] Terkait hal tersebut Eksistensi ppkl ini termasuk pengembangannya merupakan yang memang perlu kita jaga sekarang secara bersama seperti itu sehingga beberapa bagian khususnya beberapa hal yang sempat kami ketahui misalnya yang terkait dengan akreditasi akreditasi institusi, lembaga, dan sebagainya itu, kami sempat mengusulkan bahwa mungkin untuk ppkl ini Ada semacam perbedaan jadi tidak sama dengan bagaimana mengakreditasi PTN maupun PTS tapi ada semacam STAN yang

berbeda yang diberlakukan untuk PPKL karena memang ada semacam pembatasan atau perbedaan yang kami dapatkan antara PPKL PTN maupun PTS. Lanjut Mas, nah ini bagian akhir bahwa beberapa kewenangan yang ada di PPKL atau Kementerian Keuangan misalnya bagaimana pengelolaannya dan sebagainya yang kemudian diambil atau akan diambil alih oleh Kemendikbud itu cobak kami soroti dan itu yang kami berikan semacam masukan misalnya apakah beberapa hal yang terkait koordinasi bagaimana penganggaran untuk kegiatan PPKL kemudian hal-hal yang terkait dengan pengelolaan PPKL Menurut kami tidak masalah ketika nanti kita PPKL Kemendikbud tau tapi sifatnya adalah koordinasi gitu ya artinya Kementerian Keuangan selaku pemilik PKN STAN ini yang mengatur lebih lanjut namun tetap dikoordinasikan dengan Kemendikbud bukan kemudian Kemendikbud langsung yang mengatur namun PKN STAN ini yang mungkin beberapa hal seperti itu yang coba kami berikan masukan kemudian disampaikan ke Kemendikbud melalui Kementerian Keuangan Terakhir pada saat ini kami belum mendapatkan kan terkait dengan kelanjutan dari RPP itu ya terakhir kami sih yang kami ketahui bahwa RPP itu sudah masuk di Kemenkumham untuk dilakukan harmonisasi dan setelah itu nampaknya masih diberikan uang masing-masing kementerian untuk memberikan masukannya dan kami masih belum mendapatkan update terbaru terkait dengan perjalanan PT ini mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari sisi tim yang ditugasi PKN STAN untuk memonitor dan memberikan melihat terus perkembangan LPPKN ini. saya kembalikan lagi

[00:12:02] Baik terima kasih Pak Agus Bandiono, mungkin dari Polteknik Keuangan Negara STAN kalau misalkan masih ada tambahan terkait dengan penjelasan dari Pak Agus Bandiono mungkin saya persilahkan dari mungkin Pak Ahmad atau Pak Rahadi Buk hani dan Bapak Ibu dosen jika ada tambahan kami persilahkan. Mungkin kalau tidak ada kami minta tanggapan dari Bapak-bapak Ibu dari tim Politeknik Pariwisata Lombok mungkin jika ada pertanyaan misalkan ada tanggapan dari paparan Bapak Agus Bandiono dari Politeknik Keuangan Negara STAN mungkin kami persilahkan kepada Pak Jujuk atau Bu Rizda.

[00:13:11] Mungkin saya pak ya permisi Pak Agus dan teman-teman semua yang dari STAN, kami melakukan kajian ini pak dari beberapa terutama dari stakeholder dan user yang sudah kami lakukan suatu bentuk penataan terkait dengan masalah tuisi dari Politeknik Pariwisata Lombok dalam hal ini adalah tentang dimensi kedinasan yang kemudian menjadi salah satu tolak ukur dari RPP ini kami kemarin melakukan suatu bentuk audiensi dengan beberapa Kabupaten Kota sebagai user langsung nantinya terkait dengan masalah dinas pariwisata jadi kebutuhan SDM kepariwisataan dari sini kemudian kami lanjutkan ke apa namanya industri ya ke industri terkait selama ini sejak awal diterimanya mahasiswa reguler dari situ rata-rata kami mendapatkan masukan dari asosiasi jika nanti program kedinasan kembali dibuka khususnya untuk politeknik pariwisata maka kita akan kehilangan SDM yang memberikan support kepada industri-

industri pariwisata di beberapa kawasan salah satunya kita akan terhenti pak terkait masalah supporting ketenagaan khususnya di destinasi prioritas selama ini Politeknik Pariwisata Lombok ada 5 Kabupaten eh 5 Provinsi tempat kerja kita yang pertama adalah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Tengah Maluku Utara Maluku Selatan dan Nusa Tenggara Barat dari beberapa masukan mulai dari UPD sekaligus dengan user khususnya dari industri itu rata-rata jika itu memang benar-benar diberlakukan pada tahun depan maka kita tidak akan bisa menerima dari reguler dan para industri pariwisata itu tidak memiliki terkait dengan masalah ketenagaan atau SDM nya dan kami juga membuat suatu bentuk bandingan pak artinya kita dari CUA Pak Ouktaf dari penjaminan mutu ya Pak jadi ini kami melakukan perbandingan untuk sistem penjaminan di beberapa Politeknik di bawah Kemendikbud khususnya pariwisata ternyata jauh berbeda dengan apa yang kami temukan dengan apa namanya passion pariwisata yang kami miliki dengan kondisi yang ada di bawah Kemendikbud bukan kita apa namanya undisplemik dengan kondisi mereka ternyata dari asosisasi rata-rata menerima dari outcome khususnya dari Politeknik Pariwisata dari 6 PTNP dari mulai dari Bali NHI Bandung kemudian dari beberapa yang di 6 perguruan tinggi pariwisata yang di bawah Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif jadi rata-rata kami istilahnya kalau melihat beberapa kajian dari yang kami lakukan di perguruan tinggi di bawah Kemendikbud masih bersifat akademis belum vokasi kalau vokasi sebenarnya kami rata-rata istilahnya intake kami rata-rata adalah dari sekolah-sekolah yang terbaik yang dari SMK maupun Aliyah maupun yang setingkat dengan SMA yang minimal menjadi bagian untuk akan kami cetak menjadi SDM pariwisata makanya kemarin kami melakukan road show ke beberapa Provinsi di wilayah kerja kami pak terkait dengan hal tersebut barangkali sama pak ya dari Politeknik STAN ini juga mengambil dari anak-anak bangsa terbaik mulai dari nilai rapor dan sebagainya kami sama pak seperti itu nah kalau kami nanti yang khusus yang kampus yang sebesar kami ibaratnya menerima hanya 50 orang mahasiswa sesuai kebutuhan bahkan lagi sekarang ini mau disisi di dinas pariwisata Kabupaten Kota Provinsi wilayah kerja kami rata-rata mohon maaf karena politik daerah yang hidup saat ini itu di Dinas Pariwisata rata-rata memang tidak memiliki kompetensi SDM pariwisata Sarjana Hukum masuk di Dinas Pariwisata kemudian pokonya di luar keilmuan pariwisata rata-rata kalau di minta untuk masih membangun bidang pariwisata maka tidak mungkin makanya kemarin kami membuat alternatif membuat suatu bentuk usulan program untuk profesi bidang pariwisata jadi minimal kami menyelenggarakan hal itu ini juga sebagai solusi pertengahan pak kalau dari sisi masukan-masukan dari SKPJ yang kami dapat jaring di wilayah kerja kami terima kasih Pak Agus itu merupakan masukan yang baik bagi kami minimal kami mengkonduksi kembali dari apa yang sudah disampaikan Pak Agus tadi dan memang kami mengambil dari beberapa sampel di 6 PTNP yang kami miliki pak itu menjadi bagian-bagian untuk memperkaya pembentukan model kami mungkin itu pak terima kasih banyak Pak Agus atas tadi sharingnya dan mohon untuk Bapak-bapak Ibu sekalian mungkin bisa mengisi google form yang kami bagikan pak share nya supaya kami nanti bisa membuat suatu bentuk barangkali dari masukan-masukannya barangkali menjadi konstruksi yang positif untuk kami kembangkan sebagai hasil dari penelitian kita terima kasih mungkin Pak Farid

[00:19:56] Baik saya tambahkan sedikit yang pertama terima kasih Pak Agus atas masukannya ada dua hal yang coba saya simak Pak Agus mohon izin saya sendiri tidak terlibat dalam asosiasi ini usulan kami sudah melakukan 4 kunjungan ke PTKL lain dan salah satunya ini saya dorong pak yaitu membentuk asosiasi PTKL membentuk dan memperkuat secara legal asosiasi PTKL jadi bahkan kita daftar dinotariskan mungkin supaya lebih kuat sehingga kita punya apa namanya ini saya sudah umumkan juga dengan teman-teman di LAN beliau akan inisiasi untuk membentuk dalam bulan ini kita akan meeting zoom untuk memperkuat jadi bukan hanya berbentuk forum tetapi lebih kuat lagi sehingga suara 157 PTKL ini kalau dikali dengan jumlah karyawannya dengan 100 rata-rata per PTKL kemudian kali jumlah mahasiswa rata-rata 500 ini termasuk suara terbanyak ini pak ini menjadi isu center juga ke depan karena kalau sampai akhirnya ini tetap dengan RPP yang usulan dari Diknes ini 3 rekomendasi tetap tidak bergerak ya seperti apa yang disampaikan Pak Agus kami juga setuju kalau saya tidak usah terlalu ini lah tidak mendokotomikan memang amanat dari undang-undang nomor 12 tahun 2012 bahwa di Republik ini hanya 1 sebagai penyelenggara pendidikan tetapi amanat dalam juga itu ada namanya pengelola pendidikan bisa saja PTKL lain ini sebagai pengelola sebenarnya sudah kita lakukan pak kenapa karena semua program studi yang kami lakukan ini kami buka sesuai izin dari Kemendikbud akreditasi dari BAN PT karena mereka sebagai penyelenggara pendidikan kami yang mengelola atau PTKL inilah yang mengelolanya nah saya pikir barangkali tidak perlu dipermasalahkan PP nya tetap keluar tetapi 3 rekomendasi ini perlu ditambah bahwa Kementerian PTKL ini boleh menerima mahasiswa umum mungkin dipresentasikan saja berapa % yang reguler, umum eh berapa % yang reguler untuk PNS ASN dan berapa % yang non reguler yang umum sehingga ini tetap jalan tidak berubah tetap PTKL ini di bawah Kementerian masing-masing atau model yang tadi kami buat Cuma ini mohon masukan dari bapak-bapak dan teman-teman dari STAN ini ini ada model yang saya buat tadi itu menjadi tanda tanya juga bahwa 1 PTKL itu mendapatkan 2 sumber anggaran dan dikelola oleh 1 direktur mohon tanggapan dari bapak dari hasil model yang kami ajukan tadi apakah ini memungkinkan dari segi administrasi keuangan negara jadi 1 PTKL punya pimpinan tetapi mengelola 2 sumber anggaran dari anggaran PTKL itu sendiri karena menerima mahasiswa PNS dan satu ada dari Kementerian Pendidikan tetapi dikelola oleh 1 direktur ini model yang kami temukan prototype tadi itu kalau ada tanggapan mohon izin pak ya yaitu saran keuangan atau masalah keuangan maka ini tidak menyalahi aturan anggaran keuangan mengelola 2 mata anggaran 2 sumber gitu silahkan pak terima kasih

[00:24:20] Baik mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu dari Politeknik Keuangan STAN kami persilahkan

[00:24:28] Menambahkan sedikit tapi belum sampai ke bagian anggarannya Bapak dan Ibu sekalian jadi memang yang kami menyambut baik kalau memang nanti ada asosiasi atau forum yang memang akan bergerak ke sana gitu ya karena kami di PKN STAN beberapa kali inisiasi untuk pertemuan gitu ya dengan perwakilan PTKL dan nampaknya dari kami ya ketika kalau seandainya nantinya PTKL lain mencoba untuk menginisiasi dan sebagainya kami persilahkan begitu kemudian pertama beberapa kali memang inisiasi itu dari PKN STAN dan terakhir kami menyampaikan ke group tersebut bahwa saat ini memang sedang proses untuk pengesahan dari PP itu di situ kami sampaikan bahwa nampaknya Kemendikbud tidak melihat tidak mau mendengar dari PTKL nya tetapi justru lebih mendengar Kementerian selaku pemilik begitu ya sehingga kami sampaikan di situ ke forum bahwa masing-masing PTKL bisa berkomunikasi atau menyampaikan adanya PP ini ke masing-masing Kementerian sebagai pemilik dari PTKL itu supaya ikut memperjuangkan kelanjutan atau eksistensi dari masing-masing PTKL ketika ada forum itu akan lebih menjadi baik inisiasinya artinya jadi ada perjuangan tidak hanya dari PTKL tetapi juga dari pemilik institusi atau lembaga yang memiliki PTKL tersebut sedikit kami tambahkan di PKN STAN ini adanya untuk sistem penganggaran itu hanya satu sumber pak Kementerian Keuangan yang memang karena PPN dan kami tidak menerima dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud itu kami tidak menerima dari sana tapi nanti bisa diupdate mungkin Pak Ahmad kemudian yang terkait dengan kelembagaan gitu ya kemudian yang terkait dengan kelembagaan terkait prodi dalam ini kami juga ada beberapa prodi yang kami ajukan dan izinnnya keluar nah ini areanya Pak Khaltab nanti Pak Khaltab bisa memberikan sharingnya terkait dengan pengaturan prodi dan sebagainya memang prodi yang dibentuk kami tetap melihat rambu-rambu yang nanti diberlakukan nanti bagaimana prodi yang dibentuk ini memiliki ciri khas memiliki kekhususan kemudian bagaimana lulusannya dan sebagainya itu tempat kami perhatikan nanti mungkin Pak Khaltab bisa memberikan karena lebih paham gitu ya terkait dengan prodi, akreditasi mungkin sedikit tambahan dari saya.

[00:27:42]Mungkin dari Pak Khaltab ada tambahan pak?

[00:28:19]Baik ya terima kasih Pak Kajur selaku PIC tim untuk RPP PTKL PKN versi STAN Mas Dodi Bapak Ibu dari Poltek pariwisata ya alhamdulillah perkenalkan saya Mizwar dari PKN STAN ya kebetulan tugasnya di penjaminan mutu izin memberikan masukan terkait dari bapak sampaikan terutama yang model kampus transformasi Jadi pertama Bapak Ya memang ini menjadi konsen kita bersama bahwa ptkl itu harus mempunyai ciri khas, cirri khas ini yang harus tetap kita perjuangkan kita pertahankan ya supaya eksistensi tetap ya. Saya memaknai ciri khas ini 3 Pertama keilmuannya spesifik jadi prodinya itu spesifik kemudian kalau bisa tidak diselenggarakan oleh perguruan tinggi baik PTN maupun PTS gitu ya jadi spesifik termasuk Pak izin Kami kemarin mendaftarkan 2 Prodi baru Pak jadi 2 Prodi baru yang nomenklatur Dikti Itu belum ada jadi pertama manajemen keuangan negara yang dinomentlatur Ada manajemen keuangan

sektor public tapi kami beda karena keilmuan basis keilmuan yang dipelajari betul-betul terkait dengan pengelolaan keuangan negara gitu ya itu satu yang baru ya dan Alhamdulillah sudah mendapatkan izin dari Depdikbud Yang satu lagi manajemen aset publik kalau di nomenklatur ada tetapi namanya manajemen aset saja nah gitu ya jadi kita nggak bisa beda 100% tapi basis keilmuannya kita ya ya Kita bedakan memang visi misi besar dari Kementerian Keuangan berbeda kalau Prodi ini ini diajarkan di perguruan tinggi umum baik negeri maupun swasta itu satu ya Jadi pertama itu keilmuannya harus spesifik prodinya harus spesifik yang kedua catatan saya ini saya kira juga sama Ini terkait poltek pariwisata dosennya ya dosennya kan harus banyak praktisi jadi artinya nya mix antara dosen internal dengan dosen yang diampu dari industri kalau kita menyebutnya industri kalau di kita ya dari Kementerian Jadi supaya nanti ilmu yang dipelajari itu betul-betul membawa gitu ya di dunia praktek di dunia Kementerian Di kelas gitu ya itu yang kedua yang ketiga nah ini yang penting menurut saya jadi PTKL ya kementerian atau lembaga nya harus punya visi misi besar Kalau di kami Bapak karena kementerian keuangan visi misi besarnya adalah agar pengelolaan keuangan ya tidak hanya dari Kementerian Keuangan tetapi di satker yang lain Kementerian lembaga kalau perlu pusat maupun daerah gitu ya. Jadi visi-misi besarnya itu pengelolaan keuangan negara dalam arti yang seluas-luasnya setidaknya di Kementerian Keuangan Karena yang butuh SDM pengelolaan keuangan negara itu tidak hanya di kementerian keuangan tetapi di Kementerian lembaga lain BUMN kalau perlu Pemda itu juga menjadi area yang perlu ditekankan oleh Kementerian kita nah mungkin kalau pariwisata Mungkin visi misi besarnya nya Misalnya menciptakan industri pariwisata yang apa lah ya yang sesuai dengan jiwa bangsa gitu misalnya misalnya gitu ya agak ditonjolkan sehingga ini lho peran besar dari Poltek gitu ya seperti itu Pak Ya kami juga saya yakin Timnya Pak Agus juga memperjuangkan ini bahwa ini ciri khas dari STAN seperti itu gitu ya Nah dari ciri khas itu nanti tentu saja tadi yang Bapak sampaikan tadi dituangkan dalam modeling kampus transformasi gitu ya jadi luar biasa ini juga nanti ini Pak ya gambarnya tadi cukup menarik ya mungkin bisa nanti kami minta ya izin kami adopsi dulu pak ya mungkin dengan beberapa modifikasi ya pertama tadi dari aspek penganggaran kalau di STAN statusnya BLO ya jadi sumber pendanaan itu tidak APBN Tetapi kan kita bisa mengcreate layanan bisnis ya entah itu melalui pendidikan umum juga bisa ya dari mahasiswa berbayar ya Meskipun misalnya yang kita buka kelas khusus Pemda misalnya yak an tapi berbayar Atau kita bisa diklat atau menciptakan layanan pelatihan atau bimbingan teknis jadi karena kami statusnya BLO ada sedikit fleksibilitas untuk dari aspek penganggaran tadi kita bisa menarik dan menarik dana masyarakat sesuai dengan tarif yang dibutuhkan oleh Kementerian sesuai dengan bimbingan mekanisme keuangan negara itu dari aspek penganggaran yang kedua Tadi Bapak yang gambar proses tadi di saya berpikiran IT nya Belum masuk Pak gih nanti kan ada akademik ada SDM, sarkas, anggaran ya kalau saya boleh usul sistem informasi teknologi informasi jadi pasti ke depan akan menjadi apa ya perguruan tinggi kedepan pasti mengandalkan aspek teknologi informasi industri nya juga Industri sudah industri sudah five point O kita juga arahnya kesana ya dampak pandemi juga begitu mau tidak mau sistem pendidikannya mungkin bisa diusul bisa ditambahkan dari aspek teknologi informasi ya kemudian yang akademik mungkin bisa di breakdown menjadi tridarma Jadi tidak hanya aspek pendidikan kan tapi

juga penelitian ya pengabdian kepada masyarakat kalau penelitian di bidang kepariwisataan seperti ini lo jurnal-jurnal nya itu khusus lo jadi itu juga saya kira menambah poin bagi kita ya untuk menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan jiwa prodi kita Kemudian sertifikasi Bapak sudah menyampaikan tapi belum ditulis Pak ya Menurut saya juga keunggulan bagi kita sertifikasi ini penting ya Baik sertifikasi dosen sertifikasi guru terutama lulusan ya tadi Bapak ada lembaga kami saja akreditasi tidak cuman nasional tetapi internasional juga ada nanti juga nilai tambah mungkin Bisa disesuaikan terkait dengan akreditasi maupun yang sertifikasi, kemudian benefit kita yang paling ujung ya Pak ya saya baca itu SDM unggul di bidang pariwisata itu Kalau tidak salah tadi di bagian paling ujung izin saya tambahkan kalau bisa yang benefit benefit berarti kan manfaat dalam jangka panjang jadi ada output come ada effect ada benefit jadi benefit ini udah luar biasa ini Artinya benefit itu saya izin usul diarahkan kepada Visi misi besar dari Poltek ini ya kalau di kami kan tadi pengelolaan keuangan negara yang bersih dan accountable Tidak hanya di Menteri Keuangan tetapi di KL lain BUMN maupun Pemda Mungkin di pariwisata ini beda benefitnya secara jangka panjang tidak hanya menciptakan SDM unggul dibidang pariwisata tetapi juga menciptakan pariwisata yang kata-kata biasanya apa pariwisata yang sesuai dengan jiwa bangsa itu misalnya nanti di ini Ya intinya benefit lebih ditonjolkan dari sisi visi-misi besar dari Politeknik pariwisata maupun kementerian pariwisata itu ya itu kira-kira masukan kami mohon maaf mungkin masih agak dasar gitu ya tapi itulah yang saya pahami dari mengapa kita PTKL ini masih tetap eksis gitu ya terima kasih Pak Pak Bapak Ibu dari Poltek pariwisata

[00:38:37]Terima kasih Pak Althab mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Politeknik atau ya silahkan Pak Ahmad

[00:38:53]Terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun Mas Dodi Kemudian teman-teman dari Politeknik pariwisata Lombok saya hormati dan juga teman-teman dari PKN STAN ya izin memperkenalkan diri saya Ahmad dari dari Politeknik pariwisata Lombok dan Kebetulan saya saat ini sebagai kepala pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat cuman komentar saya tidak terkait dengan penelitian terkait dengan pengelolaan keuangan yang tadi Bapak sempat tanyakan ya ya nah bagaimana sih pengelolaan keuangan seandainya satu instansi itu dibiayai oleh dua instansi nah kalau kita bicara di pengelolaan keuangan kalau dibiayai dua instansi melalui APBN maka otomatis tidak bisa Pak ya karena memang kita memang kita ada bagian anggaran masing-masing jadi nanti di masing-masing anggaran juga kalau kita misalnya masuk di Dinas Pariwisata otomatis dananya melalui Dinas Pariwisata Hanya saja Bapak dan Ibu kalau kita Kementerian Sorry kementerian pariwisata jadi bapak dan ibu kalau kita sebagai BLO seperti tadi disampaikan Bapak Tarmizi Maka Bapak dan Ibu bisa bekerjasama dengan instansi lain untuk memperoleh pendanaan hanya saja mungkin saja hibah atau bentuknya yang lain atau penerimaan BNPB Karena sudah memberikan jasa

misalnya pelatihan atau bukan jasa pelatihan tapi jasa pendidikan misalnya Pemda atau instansi tertentu ada mahasiswanya yang dititip oleh kita sehingga kita bisa memungut biaya memungut biayanya otomatis harus ada standar biaya layanan atau standar layanannya gitu yang nanti otomatis standarnya ini ditentukan oleh Kementerian Keuangan seperti BLU

[00:41:48] Sehingga kalau misalnya dari Politeknik pariwisata ini pembiayaannya akan dari 2 Kementerian gitu ya Otomatis sebenarnya tidak bisa karena memang harus nyantol di salah satu Kementerian di mana gitu memang ini salah satu yang disederhanakan di dalam reformasi keuangan pak kalau dulu kita satu apa namanya satu sangga punya dua anggaran ada dikma ada didaktik yang sekarang disederhanakan menjadi dikma itu juga bagian dari reformasi keuangan kita Biar pendanaan relatif lebih jelas jadi secara umum kalau tadi bapak satu dari Dikti satu dari Kementerian pariwisata maka otomatis tidak bisa karena nanti bapak masuk ke bagian anggaran yang mana mestinya kalau bapak ada di bawah Kementerian pariwisata maka menjadi bagian anggaran di Kementerian Pariwisata Nah tinggal saja kalau misalnya Bapak mau artinya punya kegiatan kerjasama yang bisa base on project atau base on output gitu nanti bisa saja apakah bapak itu sebagai BLU atau sebagai satker pengguna BNPP itu juga bisa gitu ya Tinggal mana yang menurut Bapak lebih enak hanya saja kalau Satker penggunaan bnpp relatif masih agak ribet sedikit kalau bapak ingin memberikan layanan kemudian layanan pelayanan itu bisa di create dengan sedemikian rupa dan menjadi layanan yang lebih bagus mestinya yang paling cocok adalah menjadi BLU maka kita akan menggunakan PKBLU ya Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum gitu Jadi Bapak langsung menggunakan pendapatannya untuk kegiatan itu tidak wajib atau tidak perlu disetor ke kas negara tapi kalau masih sebagai satker pengguna BNPP maka Penerimaan dari instansi lain masuk ke kas negara dulu gitu ya jadi menurut saya sebagai BLU mungkin akan lebih baik Sama seperti yang dilakukan oleh PKN stan hanya saja PKN stan saat ini ini belum banyak yang digali dari BLU walaupun kita mungkin pernah kerja sama dengan PPKB dengan PPKB bayar gitu kan ya hitungan per orang Dengan pemda dengan pemda bayar seperti itu Namun kita belum mengoptimalkan secara ini BLU karena mahasiswa dari Kementerian Keuangan masih cukup banyak sehingga kita masih kesibukan dengan ngurusin yang order dari Kementerian Keuangan mungkin itu aja Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

sebenarnya kami masih ragu sekali tentang pengelolaan keuangan tadi dan arahan dari bapak sangat berharga sekali bagi kami namun ada hal yang saya mungkin tanyakan kembali ke Pak Ahmad eh ke Pak Agus cocoknya ya Adakah sekarang ini dan kedepan Apakah PKN stan ini ada menerima program reguler dan nonreguler reguler itu maksudnya memang betul-betul PNS dan calon PNS dan nantinya akan menerima umum seperti tadi saya dengan ada BLU Apakah ini sudah berjalan berapa lama atau baru mau akan ke depan dan kira-kira kalau menerima mahasiswa umum atau reguler Apakah ini apa namanya biayanya ini sesuai dengan standar keuangan negara atau gimana mohon izin Pak

[00:44:21]Wa'alaikumussalam mungkin ada tanggapan Dari Poltek Lombok silakan kan

[00:44:26]Terima kasih banyak Ini atas masukannya ya pak Pak Pak Ahmad jadi ini

[00:45:34]Baik mohon izin silakan Pak Agus

[00:45:37]Saya menjawab nanti Pak Althab lebih tau masalah BLU kemudian Pak Althab juga jadi kalau justru kami menyebut reguler ini untuk mahasiswa gitu pak jadi yang selama ini berjalan adalah mahasiswa itu memang dari umum ya lulusan SMA kemudian kita rekrut namun ketika lulus itu mereka langsung masuk ke instansi pemerintah entah itu Kementerian Keuangan maupun Kementerian lain sepertinya itu justru kami menyebutnya reguler gitu Pak hal yang lain kami ada juga yang sifatnya tugas belajar seperti itu jadi mahasiswa kami yang sudah bekerja misalnya di jenjang Diploma 3 kemudian kembali lagi ke kampus untuk menempuh jenjang lebih tinggi Diploma 4 nanti ketika lulus akan kembali lagi ke unitnya itu 2 program yang memang berkelanjutan berjalan sampai dengan saat ini yang tadi disampaikan oleh Pak Althab gitu ya BLU dengan pembiayaan itu untuk saat ini nampaknya belum berjalan lagi dulu memang pernah pak karena kebetulan bekerja sama dengan pemda kemudian ada biaya yang ditarik adapun yang tadi yang saya sampaikan itu pak yang reguler maupun tugas belajar itu sifatnya adalah tidak dipungut biaya pendidikan jadi kami menganggarkan dari APBN dari anggaran kami sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan di Kementerian Keuangan Pak silahkan bapak-bapak

[00:47:44]Gimana tadi pak Agus Kebetulan saya lagi ada agak kurang kurang memperhatikan gimana-gimana tadi

[00:47:54]Kalau program reguler dan tugas belajar itu Pak tadi Pak Anto sempat menyinggung Ada nanti program kerjasama atau BLU yang mendidik mahasiswa ini yang yang saya tahu kan an saat ini belum jalan tapi dulu pernah jalan Pak Itu mungkin yang menjadi pertanyaan Pak modelnya itu seperti apa kan saat ini Sedang off ya Apakah nanti ke depan and1 akan berjalan lagi dengan pola BLU yang direncanakan program pendidikannya Pak

[00:48:26]Terima kasih Pak Agus jadi memang kita dulu pernah menyelenggarakan apa namanya pendidikan untuk teman-teman di pemda salah satunya ada pemerintah Manado kemudian ada Tual ada macam-macam gitu ya Kemudian ada beberapa Program dengan BPKB gitu ya dengan BPK gitu prinsipnya sebetulnya seperti ini artinya kalau kita misalnya mau Jalankan itu kita harus punya yang namanya tarif layanan gitu Pak Ya jadi harus ada tarif layanan jadi 1 mahasiswa itu membayar berapa Kalau kemarin kita memang ada kelas khusus kelas khusus itu artinya 1 kelas di dalam BPKB semua Satu kelas dari tuan semua Tapi yang pajak dan PBB kemarin adalah tidak kelas khusus jadi dari isinya dari Pemda mana-mana gitu ya pak jadi ada Mungkin satu Pemda ada 2 orang 3 orang seperti itu prinsipnya bahwa kita punya apa namanya punya tarif Nanti bisa kita jalankan nah beberapa sebetulnya Pak yang sebetulnya yang sempat kita diskusikan adalah kita kemarin dengan Musi Banyuasin itu Membuat pola pembibitan pola pembibitan karena pola pembibitan itu Nanti kerjasamanya ini adalah mendidik calon mendidik calon Kalau yang tadi Pak dengan BPKB dengan pemda itu adalah mereka sudah menjadi pegawai kalau yang mahasiswa dari SMA yang belum jadi pegawai ini kemarin kita baru mencoba dengan pola pembibitan nya Pak jadi dari pemerintah daerah membutuhkan misalnya pesan saya saya pesan lulusan 3 orang gitu ya cuman dari pemerintah daerah itu berharap bahwa 3 orang itu nanti berasal dari daerahnya masing-masing kenapa alasannya adalah kalau misalnya ini berasal dari daerah lain Katakanlah di Musi Banyuasin adalah temen-temen dari Jogja maka mungkin sudah dibiayai Sekian banyak oleh Musi Banyuasin begitu bekerja di di Muba 10 tahun atau apa dia minta kembali lagi ke Jogja seperti itu jadi sistemnya pembibitan jadi dari daerah masing-masing saringannya Pak Kemarin yang sudah kita bahas adalah Ah Bah wa Sharingan tetap mengikuti dengan normal gitu Tetapi dia direkomendasikan oleh daerah tersebut Kalau ternyata dari daerah tersebut tidak ada yang lulus otomatis tidak apa namanya tidak ada yang dikirim ke sana hanya saja kemarin yang belum kita putus Apakah nanti kalau daerah itu minta Ada apa namanya grade kelulusan tersendiri atau tidak kan gitu karena kalau kita mengandalkan kan ke ketentuan yang umum bisa jadi itu tadi ada beberapa daerah yang mungkin kalau dengan cara seperti itu kebutuhannya ada tetapi tidak ada yang lulus Nah itu Pak pola pembibitan yang menurut saya cukup bagus kalau dengan SMA gitu yang lulusan SMK sehingga begitu lulus dari kita itu langsung ke pemerintah yang meminta dan di sana formasinya sudah disiapkan Gitu Pak karena jangan sampai lulusan kita begitu ditaruh di pemerintah daerah juga formasinya tidak disiapkan kan itu walaupun Itu bukan tanggung jawab kita pak karena sudah ada MOU tapi kita tetap akan punya apa namanya sangkut paut begitu ya tetap masih menjadi menjadi di ganjalan di kita kalau tidak segera diangkat mungkin itu pak terima kasih

[00:52:45]Mungkin ada.

[00:52:48]Sedikit lagi kembali dengan Pak Agus atau Pak Ahmad Jadi khusus yang program reguler ini itu nanti langsung Mereka di dalam proses mereka Langsung direkrut

menjadi ASN nah pertanyaan saya bagaimana PKN stan ini melakukan kerjasama dengan Pan RB Dalam rangka mengangkat mahasiswa yang ada di proses belajar ini Jika bisa menjadi ASN regulasinya termasuk pasti Ini arahnya ke Pan RB atau BKN Terima kasih Pak

[00:53:35]Terima kasih Pak ya ini masih terkait dengan yang pembibitan Pak ya karena na Pemda dengan BPKB dan lain sebagainya itu tugas belajar mereka yang sudah jadi pegawai jadi tidak ada masalah memang yang baru kita Gagas itu yang pembibitan itu memang jadi nanti tripartit pak Jadi dari kita kemudian dari instansi pemerintah dan juga dari Pan RB terutama terkait dengan formasi jadi memang yang mengusulkan formasi adalah nanti instansi-instansi atau pemerintah daerah yang meminta lulusan kita jadi mereka harus menyiapkan formasi terlebih dahulu karena untuk menjamin bahwa Nanti pada saat lulus nanti itu akan diangkat dan formasi itu tidak mungkin kita yang mengusulkan karena dia akan bekerja di pemerintah daerah jadi si instansi pengguna itu yang akan mengusulkan setelah Memperoleh informasi Pan RB baru dia bisa meminta kepada kita bahwa dia sudah diberikan formasi sekian sekian sekian gitu Pak ya sehingga nanti kita bisa mulai menyiapkan pendidikannya Mungkin kira-kira seperti itu pak terima kasih

[00:54:59]Tambahan pak ya Baik terima kasih Pak pak Altaf mungkin ya Jadi gini Pak Altah kami di penjaminan mutu Pak Altaf Mungkin sama polanya Jadi kami sudah kemarin pertama Pak tahun ini Kami mengusulkan dua program studi untuk diploma 4 Jadi yang pertama adalah MICE dan program studi destinasi pariwisata dan untuk magister Terapan itu pun Kami sedang mengusulkan tahun ini Namun demikian Pak Altaf kami makanya baru saya melihat saran Pak Altah Yang luar biasa ini karena ada program pengusulan Prodi baru yang tidak ada di dalam Dikti saya kemarin basemaking di Batam Politeknik pariwisata Jadi di sana Pak banyak beberapa program studi yang tidak ada di dalam nomenklatur Dikti contoh salah satu program studi seni kuliner di situ harusnya di nomenklatur di sana Diploma 4 itu tidak ada Pak makanya Kemarin saya sempat lihat dari sana Bisa ya sekarang ada lembaga lagi yang mengatakan seperti Pak Althaf tadi mengatakan Bisa saja dan itu sudah keluar izinnya kami sangat ini pak kami sudah masuk di sinclar ma itu memang beberapa persyaratan kalau jadi dosen memang kami sudah Insya Allah kami terpenuhi karena Sepulang dari temen-temen yang magister terapan yang dari coyang University itu bisa menjadi apa namanya SDM kami untuk dosen dan rata-rata memang dari dosen kami itu dari praktisi pak rata-rata juga dari industri RPL pak ya itu kami sudah Terapkan di sana terkait dengan masalah sertifikasi hampir semua yang lulusan kami pak itu sudah tersertifikasi profesi pak gitu Jadi begitu lulus mereka sudah tersertifikasi profesi mereka bekerja dan rata-rata sudah diterima di apa namanya di industri dan memang kelemahan kita rata-rata pak yang dulunya itu belum tersertifikasi Sertifikasi semua pak jadi lulusan pertama poltekpar Lombok yang berdiri tahun 2016 Pak kemarin sudah rata-rata sudah tersertifikasi dan terima kasih Pak

penyegarannya pak Altaf ini sudah akan jelas semuanya sebagai penciri Kebetulan kami pencurinya adalah di Central Of Excellent halal tourism Pak kemudian juga kami di magister terapan Ruler ecotourism sebagai basic dari pengembangan Kami adalah apa namanya desa wisata sebagai penyangganya dan ini terkait dengan masalah kawasan penyangga Untuk destinasi prioritas yaitu terkait Mandalika Oleh karena itu masukkan sharing seperti ini Pak kami sangat terimakasih dari Pak Altaf tadi dan insya Allah kami akan perbaiki dari ini semuanya mudah-mudahan nanti kita selalu sering Pak Altaf karena nanti ada beberapa prodi-prodi baru yang nanti Kami akan kembangkan yang menjadi Need assessment yang untuk pasar yang sudah kami siapkan tapi untuk prodi-prodi nya memang Kami selalu berupaya Pak setiap tahun Untuk kajian-kajian kita seperti tahun ini kita melakukan penelitian institusi itu untuk menangkap perubahan-perubahan pasar terkait dengan pengembangan kurikulum maupun dari sisi pengembangan program studi terkait dengan pasar pariwisata Terima kasih Pak atas masukannya mohon izin Nanti Pak Altaf kita akan saling kontak juga demikian Pak Ahmad Feri Haryanto Karena kami ada p3M Pak sebenarnya Ini salah satu bagian dari p3m Pak karena kalau kami melakukan penelitian Pak Ahmad kita sudah punya apa namanya kontrak penelitian pak salah satunya harus posting di jurnal internasional ke bagian yang kedua outcome nya ada buku dan ini Insya Allah akan menjadi buku akan ada terbit di jurnal internasional kita sedang upayakan Pak kami sedang menggali dari beberapa kampus ptkl Pak Insya Allah nanti ini menjadi bagian atau kalau kita melakukan suatu bentuk Sharing kerjasama Itu lebih baik lagi pak supaya nanti kami dari sesama ptkl itu ada suatu bentuk sharing program dari riset sehingga nanti minimal ada pengembangan-pengembangan yang terintegrasi dengan hal ini pak Kalau dari sisi tadi Pak untuk it SIM sistem informasi manajemen Memang kami di dalam beberapa muatan untuk kurikulum kami salah satunya melakukan pendekatan ke arah ini pak Sudah pergoki pak ya konsep gitagoki untuk menyiapkan Udah tersiapkan Pak Rata-rata Kami menggunakan konsep interpreneur itu sudah sebelumnya dan rata-rata sudah sudah masuk di dalam riset pengembangan beberapa sistem pembelajaran kami kemudian Sehingga nanti di situ ada pergoki terima kasih Pak Altaf nanti kami akan berlanjut tapi tidak di forum ini dan Pak Ahmad dari Haryanto dan teman-teman nanti siapa tahu nanti ada kerja sama kita pak yang bisa kita saling take and give apa yang kita perlukan dalam proses ini kan masukkan yang luar biasa Pak Ahmad Haryanto tentang masalah keuangan Pak kami ini buta akan itu Alhamdulillah sudah dibuka konsep BLU dan PNJP Terkait dengan hal ini tapi kami sudah menyiapkan konsep itu Pak Insya Allah ini sebagai bentuk pencerahan terkait dengan pengembangan prototype dan penyempurnaan untuk Prototype tadi Terima kasih Pak Ahmad Hariyanto Pak Altaf Pak Agus dan Pak Dodi ini yang dari awal sibuk banget pak dan teman-teman semuanya yang hadir pada saat ini Insya Allah kapan ke Lombok Kami tunggu Pak kunjungan balasannya Pak ya saya kembalikan ke Pak Dodi

[01:02:51]Terima kasih Pak Jujuk dari Politeknik pariwisata Lombok Mungkin jika tidak ada tanggapan atau pertanyaan lagi mungkin saya serahkan atau saya coba tanyakan terakhir Apakah Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau tambahan atau tanggapan

[01:03:11]Sedikit mungkin sorry Pak Amat silakan

[01:03:19]Sedikit pak Ya Pak terima kasih banyak nih atas tawaran kerjasama penelitiannya Pak Kami sangat senang mudah-mudahan nanti kita bisa Melakukan penelitian kolaborasi terkait dengan keuangan pariwisata atau yang lain lah Pak Apalagi nih target di tempat bapak luar biasa nih sudah wajib masuk ke jurnal Internasional Wah ini udah sangat luar biasa matur nuwun pak insya Allah nanti kita coba koordinasi Kan lebih jauh Pak Ali mudah-mudahan kita bisa ke Lombok nih Pak Ali matur nuwun Pak

[01:04:01]Mungkin Pak Altaf sama Pak Heryanto Jadi gini untuk terkait dengan masalah ini Pak Memang Kami sedang melakukan pengembangan-pengembangan Pak untuk sistim IT Pak untuk kebocoran anggaran Pak terutama di kawasan destinasi Pak Untuk pengelolaan anggaran destinasi kan itu masuk di PAD kami sudah Mengembangkan sistem barcode mungkin nanti saya minta sarannya Pak sehingga minimal tidak ada kebocoran anggaran dari sisi kan namanya pariwisata itu itu dalam "ada premanisme local pak di situ Jadi kalau ada sistem yang mengatur di dalam anggaran barangkali nanti akan kebocoran anggaran nya atau PAD nya pak barangkali bisa teratasi selama ini banyak kawasan wisata tetapi tidak memiliki anggaran yang kuat dalam hal ini insyaAllah nanti kita kerja sama izin mohon maaf di sini ada MOU pak draft MOU yang nantinya bisa kita pelajari bersama draft MOU ini nanti pak meliputi tridharma perguruan tinggi yang nantinya bisa kita saling pelajari silahkan nanti dari tim nya STAN silahkan nanti untuk melihat dari istilahnya dari beberapa pasal per pasal barangkali perlu dirapatkan kembali pak atau perlu dikonstruksi lagi pak saran dari nanti kapan kita melakukan satu bentuk Zoom Meeting pak dalam rangka penandatanganan MOU nya atau bapak mungkin MOU nya langsung tanda tangan di Lombok barangkali lebih senang kembali lebih senang lagi pak jadi nanti kami akan kami siapkan draftnya nanti kalau elektroniknya kami akan kirim melalui Pak Dodi ya mungkin PIC nya nanti itu bisa saling mendukung pak terkait dengan pengembangan kami di masing-masing kampus kita mungkin itu mungkin Pak Farid ada tambahan

[01:06:25]Sedikit saja mengingatkan kembali Pak Agus kalau bisa asosiasi PTKL ini pak mungkin bisa dikembangkan kembali memang terus terang nanti saya hubungi Pak Faisal untuk segera mungkin kita buat karena kami sudah dari pertanian kemudian Stia LAN semua pada dasarnya mereka setuju membentuk ini bahkan secara legal pak jadi bukan

hanya sekedar forum tapi secara legal kita notariskan sehingga ini memperkuat kita ptkl kedepan supaya tetap eksis dan tidak digoyangkan lagi walaupun digoyangkan paling tidak suara terbanyak ini 157 kali 100 dosen dan staff kali 1000 mahasiswa ptkl kali 3 keluarga di rumahnya bersuara untuk 2024 pak terima kasih

[01:07:29]Mungkin tanggapan mungkin penutup kali ya dari Politeknik Keuangan Negara STAN mungkin dari Pak Agus atau Pak Altah atau Pak Ahmad kami persilahkan

[01:07:53]Baik terima kasih Pak Farid kami menyambut Baik Pak nanti kalau boleh dari pariwisata bisa menginisiasi kembali Pak ya kami juga komunikasi juga tapi supaya tidak hanya selama ini kan PKN STAN yang menginisiasi untuk kegiatan sekali gitu pak dari pariwisata menginisiasi untuk mengadakan pertemuan pak ya supaya nanti bisa bangkit kembali gitu ya mungkin sudah lama tidak ada pertemuan terkait dengan forum ini, kami ucapkan terima kasih dari Bapak-bapak dan Ibu sekalian dari Politeknik Pariwisata Lombok yang berkenan hadir menyempatkan diri menyempatkan hadir di kampus kami di Politeknik Keuangan Negara STAN mohon izin karena saya tadi buka gitu kan untuk menutup sekali lagi terima kasih atas ketersediaannya untuk berada di kampus kami untuk sharing dengan kami tentunya kami juga selaku ptkl masih banyak hal yang perlu kami perbaiki yang kami sampaikan adalah beberapa hal yang sudah kami lakukan tadi juga sudah disampaikan gitu ya ini menyambung kembali atau membuka diri gitu pak kalau nanti Poltekpar akan bekerja sama khususnya di bidang penelitian itu kan areanya Pak Ahmad atau mungkin diskusi kembali terkait dengan kelembagaan nanti dari Pak Altah juga udah siap kami siap untuk bekerja sama dan menyambut segala hal yang memang jika diperlukan gitu ya kerja sama kedepan dengan Poltekpar Lombok terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian baik dari Poltekpar maupun dari Politeknik Keuangan Negara STAN perwakilan dari masing-masing jurusan jurusan akuntansi, jurusan bea cukai yang ikut hadir di pertemuan kita pada siang hari ini kemudian dari PKU alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah menyelesaikan berdiskusi dan mendapatkan masukan baik itu dari PKN STAN maupun sebaliknya dari Poltekpar ada hsl-hal yang kami dapatkan gitu ya alhamdulillahirobbil'alamin untuk kegiatan pada siang hari ini saya cukupkan sekian Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

[01:10:27]Mungkin sebelum ditutup mohon izin sebelum kita end meeting ini dari Bapak-bapak dari Poltek Pariwisata Lombok ada cendera mata pak untuk di Politeknik Keuangan Negara STAN cuman saya wakikan mungkin Pak ya mohon izin ya Bapak-bapak Bapak Ibu semua mungkin sambil saya kamera tadi ada tim Humas Pak Adi.

Politeknik Pertanian Bogor

[00:00:00] Nah setelah itu, kebetulan Pak Ardi Khol itu habis masa jabatannya diganti Pak Jero Wacik. Pas masuk Jero Wacik, kita di bawah Kepala Badan namanya Deputi salah satu tim Kepala Badan itu langsung melapor ke Pak Jero Wacik. Pak ini masalah seperti ini ini, kita tidak bisa menerima umum karena ini PNS diurus menteri lama kenapa pertimbangannya nah Bersatulah ini PTKL (Perguruan Tinggi Kementerian Lain). betul saya sendiri tidak tahu nanti Pak Putu yang sampaikan ke saya karena beliau Kepala Badan. Dia bilang kita bikin, kita sepakat untuk tetap membuka disitulah menteri Jero Wacik langsung mewisuda pertama di Bandung tahun 2001 dia kembalikan silakan tidak perlu buka PNS saja atau Diklat buka umum, nah buka umum sajalah. Bandung mulai Makassar mulai menyusul kan begitu. Nah singkat cerita aa sempat kita berhenti setahun Pak tidak menerima mahasiswa karena larangan dari Pak Jero Wacik waktu itu. Jadi pas 1 tahun berikutnya Pak aa siapa Pak Andika yang melarang Pak Jero Wacik kita menerima sampailah sekarang nah gitu dibukalah apa namanya aa Lombok dibukalah Palembang langsung Politeknik. Diizinkan juga oleh Dikti diizinkan juga kan gitu. Nah aa Bandung juga mengakreditasi institusi Prodi Makassar, Medan tetap juga diizinkan oleh Dikti gitu oleh Ban-PT pikiran kami tidak ada masalah ini. Nah pada saat 2000 akhir, itu aa KPK turun untuk mengaudit Kemendiknas Restek sekarang mengaudit bahwa temuannya itu kita ini aa dinyatakan bahwa aa ada mis administration. Yang kedua adalah pemborosan, inefisiensi dan sebagainya gitu loh. Itu temuannya dari KPK sehingga menyampaikan kepada Diknas harus buat RPP sesuai tuntutan dari undang-undang nomor 12 tahun 2012 karena di undang-undang perguruan tinggi itu ada 3 RPP yang harus keluar. Satu RPP tentang penyelenggaraan pendidikan keagamaan itu sudah keluar makanya Kementerian pas tidak diurus oleh Kementerian Dikbud. Yang kedua adalah aa apa namanya penyelenggaraan pendidikan kedinasan. Kedinasan itu aa apa namanya seperti Akabri, IPDN itu kelompoknya juga itu sudah ada RPP-nya keluar itu nomor 14 tahun 2010 begitu. nah Selain itu ini dipersoalkan tinggal kita ini dianggap 20% anggaran republik ini 20% anggaran pendidikan kenapa hanya digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya 15% eh 12% Terus 8% nya kemana? nah lapor lah Kementerian Pendidikan bahwa dipakai sama PTKL digunakan oleh PTKL nah gitu. Wah tidak boleh salah itu begitu, salah tidak boleh mereka kan hanya membuka itu sudah tuntutan undang-undang kembalikan segera buat RPP-nya. Maka awal Desember, Buatlah RPP ini oleh Kementerian Pendidikan. Nah kita ketemunya itu draftnya itu bulan akhir Januari 2021, bulan Februari kami membuat pertemuan terus setiap bulan kita pertemuan satu bulan Mungkin dua kali ke Medan, Makassar, Lombok, Palembang. Memang serba salah juga dilema di dalam RPP itu ada tiga tuntutan oleh Kementrian Diknas. Satu dialihkan pendidikan ini ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan lembaganya, yang kedua adalah bergabung dengan perguruan tinggi negeri setempat prodinya, yang ketiga passing out tutup sama sekali kita hanya kembali ke titah nya. Nah begitu istilahnya. 3 pilihan ini itu setelah kita kaji dari waktu ke waktu minta para pakar apa ya memang kalau

mengikuti aturan harus gitu tetapi kan ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan dulu hal-hal lain apa itu masalah aset, masalah SDM, masalah akademik, masalah quality assurance, masalah penjaminan mutu, dan sebagainya. kalau macam kita kan sebutan dari Politeknik pariwisata ya standar Politeknik pariwisata gimana sih Nah gitu bahwa dia program studinya itu Program Studi Divisi Kamar dia akan keluar nanti langsung bekerja di *front office* kan begitu, di hotel *resepsionis* ada jurusan restoran akan bekerja sebagai *waiter* kan gitu ada jurusan aa Seni Kuliner bekerja sebagai sebagai cook kan jelas itu pak, nah waktu kami ketemu zoom meeting eh bukan Zoom meeting offline dengan karo hukum Diknas waktu itu kami tanya, aa kami sih tidak ada masalah kebetulan ibu kami tidak ada masalah mau pindah ke Diknas kami tidak ada masalah karena apalagi kami pegawai negeri iya kan, di manapun tetap eksis Kita cuman pertanyaan kami bisa tidak Dikbud ini menjamin anggaran yang dikeluarkan sekarang berjalan persis sama dan kualitasnya tetap sama dua aja permintaan kita. Nggak bisa jawab dia dua aja kualitasnya dan anggarannya harus sama mereka tidak bisa jawab. Kenapa bertanya malah ditanya kembali saya Kenapa bertanya begitu Pak Farid saya bilang saya punya bukti saya tidak asal ngomong ini SK Saya dari Politeknik Negeri Banyuwangi saya di SK kan oleh direktornya meminta saya sebagai tenaga ahli untuk membuka Program Studi Destinasi Pariwisata di Banyuwangi saya melakukan itu sudah 3 2 bulan berjalan. Saya sampaikan ini sk-nya saya diminta langsung kan berarti tenaga ahlinya di situ tidak ada itu satu yang kedua saya tanya di Politeknik Banyuwangi ternyata sudah ada Program Studi Manajemen Bisnis Perjalanan kalau kami aa manajemen bisnis perjalanan itu pasti perjalanannya ke luarannya ke travel jadi guide, jadi ticketing kan itu ada juga kami punya. Tetapi setelah saya bedah itu kurikulum apa yang terjadi di situ ada mata kuliah tentang restoran, ada mata kuliah tentang seni kuliner nah ini mau mengarah ke mana dia tidak nyambung saya perlihatkan semua. Ini di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mohon maaf sekali karena Ibu nanya ke saya makanya saya jawab karena saya punya bukti saya tidak asal ngomong .nah apakah begini nanti ke depan sekolah kami kalau akan begini Mohon maaf saja ini harus perlu dipertimbangkan gitu sehingga inisiasi lah kami di Perguruan Tinggi memang ada anggaran penelitian institusi namanya setiap tahun ada khusus Pak. jadi setiap tahun kami mengangkat tentang isu-isu yang center masalah pariwisata. Nah tahun ini kami angkat tentang itu. tentang transformasi organisasi kelembagaan Perguruan Tinggi Pariwisata yang kira-kira hasilnya ini yang kira-kira hasilnya ini bisa dipakai oleh PTKL lain gitu. Diluar pariwisata juga bisa digunakan. itulah yang akan kami bawa ke sini sebagai oleh-oleh sekaligus Minta input dari teman-teman untuk mendukung ini pak. Nah itu kami sudah punya bahan nanti kami akan paparkan kita lihat bersama minta masukkan dari Bapak Ibu sehingga kalau ini lolos dan ini disetujui maka ini adalah jalan tengahnya jadi tidak dari 3 tadi Pak harus menjadi alternatif empat. Alternatif empat apa karena kalau alternatif satu perhatikan ke Diknas penuh 2 jaminan itu tidak bisa dijamin. Alternatif dua ke PTN negeri yang ada di setempat sama ajakan berarti tidak akan menjamin yang ketiga passing out tapi kita hanya menerima PNS kembali dulu. Nah tiga-tiga nya tidak masuk Pak sehingga kami membuat penelitian ini mau menemukan satu model. Modelnya adalah supaya ini tidak kisruh ya kan bagaimana masalah aset, bagaimana masalah akademik inikan tidak gampang juga ini persoalannya Ini udah model yang kita temukan ini kira-kira seperti ini

pak. Lembaga ini tetap eksis tetap eksis semua pengajarnya dosennya tetap tetapi di dalam itu memang ada ada dualisme nah gitu Jadi ada dua sumber anggaran. sumber anggaran dari Kementerian kita PTKL umpama pertanian atau pariwisata itu 25% murni bukan dari aa anggaran pendidikan 20% itu khusus mencetak PNS atau pelatihan-pelatihan, 75% menerima mahasiswa umum anggarannya dari Diknas. memang yang repotnya adalah direktornya gitu loh ya kan karena harus untuk mengelola dua mata anggaran ini kan tetapi jalan satu yang kita harus lakukan daripada yang begitu banyak masalah yang harus diselesaikan. Kalau bukan cara ini maka memang yang menanggung itu adalah direktornya kan gitu yang harus pecah kepalanya bagaimana membagi anggaran ini sumber anggaran Diknas dan ini Dosennya tinggal memilih mau ke di Diknas tetap di sini, mau ke PTKL tetap di sini juga, tapi ini tetap jalan aset tidak berubah karyawan tidak berubah ini sementara Pak yang kira-kira temuan kami yang akan kami sosialisasikan ke selama 3 hari ada 5 PTKL untuk bagaimana caranya memberikan masukan untuk model ini setelah itu kami akan membuat aa apa namanya kami akan daftar ke Haki lalu kami akan ke kirim ke Diknas kirim ke Kementerian dan Sesneg sebatas itulah kemampuan kami sebagai akademis sampai di situ mau nanti jalan itu terserah Haki yang penting itu usulan kami daripada alternatif 1 2 dan 3 ini akan sulit diterima. Sulit untuk asetnya macam-macam yang kita harus lakukan itu dan itu tidak mungkin tahun ini ditandatangani lalu tahun ini langsung berubah gamungkin, musti Mesti nunggu 2 tahun lagi ke depan 3 tahun nanti perkiraan saya kalau ditandatangani tahun ini PP nya oleh Presiden berarti bisa aa apa namanya perubahan ini mungkin 2 tahun kedepan. Tapi bisa saja bisa saja ada yang PTKL yang keras kepala tidak mau pusing jangan tapi kan akan berbenturan nanti Pak pada saat kita akreditasi di akreditasi nanti dia akan menyurat nanti Diknas ini ke BAN-PT. Perguruan tinggi ini tidak bisa diakreditasi nah kan bermasalah juga jadinya ini kira-kira sementara Pak yang kami bisa temukan ada Google form juga kami sudah buat ya untuk dibantu kami untuk diisi.

[00: 13.17] saya sudah mengisi

[00: 13.18] Nah terima kasih banyak Bu Jadi mungkin ada beberapa termasuk bentuk program studinya Manajemen Mungkin banyak

[00:13:29] Mungkin saya tambah sedikit Pak Farid jadi kemarin waktu di zoom meeting bersama dengan semua PTKL di Kementerian itu juga gitu Pak mungkin sama yang di tadi ngobrol-ngobrol dengan Bu Endang tadi yang terkait dengan masalah beberapa berkas pengelolaannya dari Politeknik Pembangunan Syariah Pak salah satunya STMA apa yang ada di Malang dulu terkenal Pak, sangat terkenal menjadi barometer di dalam proses pembangunan pertanian itu, di Lombok pun demikian Pak ada sekolah-sekolah yang langsung di bawah aa apa namanya Kementerian Pertanian salah satunya nya SPMA khusus untuk pertanian pak. Sampai hari ini Pak yang di Lombok NTB lah ya itu sudah

bergabung dengan Dikbud tidak terkontrol Pak pertaniannya tinggal 5% itu sebagai pencari dalam satu sekolah yang dulu dirintis, didirikan semua guru-gurunya diambilkan dari IPB itu rata-rata itu, semua dari sana sekarang hanya 5% Pak tidak ada lagi pembangunan yang sustainability program untuk di pertanian di Malang bahkan menyedihkan lahan hilang jadi perumahan elit di Malang kan Bu ya, ya Singosari tukar guling bu jadi sudah tidak lagi istilahnya terkenal kaya dulu modelnya di beberapa tempat kemarin dari hasil di Perindustrian juga begitu banyak sekolah-sekolah yang dibina kami di PTKL itu rata-rata lebur ke dikbud tidak bisa berkembang lagi. Nah jadi istilahnya untuk perkembangan sesuai dengan misi besar dari pertanian misi besar dari perindustrian misi besar dari kelautan itu hilang. Ini yang aa kalau pariwisata Pak ini banyak bukti beda Pak ya antara dikelola oleh Politeknik Pariwisata yang Katakanlah mohon maaf teman dekat kita di sini Pak PolBang Pak ya itu kan mengelola pariwisata juga itu sama Pak dari out-comenya kami mendapatkan beberapa masukan rata-rata dari pihak industri beda dengan yang ada di NHI Kemudian yang di kami rata-rata ada juga STP Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram yang dikelola oleh swasta itu sama Bu jadi tidak bisa istilahnya memenuhi market sinyal tidak ada.

[00:16:34] Kita juga punya pengalaman yang sama Pak, aa SMK pertanian itu kan diserahkan ke tapi ke daerah ya tapi kemudian ada yang ke Dikbud ya memang ada yang begitu ada yang mati ada yang kemudian berubah menjadi SMK lain bukan lagi pertanian memang begitu pengalamannya sama cuma ini enggak enak juga kalau disampaikan ke Dikbud anda tidak pintar mengelola uang.

[00:17:06] kalau saya saya sampaikan Bu Karena saya berbicara sebagai orang akademisi bukan orang birokrat saya ngomong di depannya karo hukum saya bilang ini buktinya saya bukan hanya ngomong ini buktinya. Mohon maaf saya bilang diknas ini punya perguruan tinggi vokasi tapi belum mampu mengelola standar vokasi tidak papa boleh tapi maksud saya dia harus mampu belajar banyak dulu lah. Jangan hanya sekedar mau mengambil dengan Pak Wikan ini hanya sekolah vokasi kok di PTKL lebih maju lebih vokasi dari tempat saya ini mendingan saya rangkul aja semua ini kan bukan begitu bahasanya meskipun undang-undang menuntut begitu tapi harus kan fifty-fifty seperti yang saya bilang itu pak. Jadi kampus ini sebagai kampus bisa menerima dua-duanya. Nah gitu, jadi tidak ada uang dirugikan sumber dana juga bukan dari Kementerian PTKL tapi Kementerian Diknas tapi yang 70% menerima mahasiswa umum yang 25% ini pelatihan diklat apa dari PNS ndak masalah. daripada kalau dirangkul semua begitu akhirnya kualitasnya jatuh seperti contoh-contoh tadi kan sayang apalagi kalau macam kita Mohon maaf Pak kita ini kelas Internasional standar kita sudah dari UNWTO jadi akreditasinya 2 akreditasi ban PT akreditasi UNWTO badan pariwisata dunia ya ada memang kriterianya dan kami semua dapat itu. Nah terus bagaimana kalau begitu standarnya menggunakan minimal tingkat ASEAN sertifikasinya sertifikasi ASEAN bisa ngejar tidak itu persoalannya bagi kami sih tidak masalah.

[00:19:03] Kalau menurut yang di apa namanya di sini Pak bagaimana kira-kira strateginya bapak apa sudah adaancang-ancang atau bagaimana.

[00:19:14] Sebelum ke situ mungkin ini menarik ada tiga hal yang mungkin kami petik ya kami bisa peroleh dan sekaligus kami sampaikan kepada Pak Jujuk dan Pak Farid. Pertama, ternyata di kita ini belum mungkin sudah ada tapi belum secara konsisten ada penelitian institusi ini Bu ya. Nampaknya Ini pengalaman menarik, terima kasih. Nah ini mungkin pengalaman yang menarik. kemudian yang kedua terkait penelitian institusi ini pak ya insya Allah nanti kami akan bantu nanti Ibu Endang Jika ada data-data yang diperlukan nanti Insyaallah bisa difasilitasi bantuannya kemudian yang ketiga mungkin nanti kami mohon di sharing hasil akhirnya bu ya jadi untuk masukan bagi kami hasil kepedulian senasib ya Jadi hasil final poin of penelitiannya termasuk rekomendasinya kami mungkin minta di-sharing keseluruhan mungkin ya Bu setelah selesai. Nah itu, itu mungkin yang perlu kami sampaikan kemudian kami berharap kemudian yang terkait dengan pertanyaan Pak Jujuk terkait apa yang sudah kami aa lakukan di tingkat aa Kementerian Pertanian sebenarnya sudah memfasilitasi Bu ya ada upaya-upaya, strategi-strategi, ada pertemuan-pertemuan untuk membahas termasuk juga sudah membuat draft proposal bu ya yang nampaknya sudah sih ada draft proposal di tingkat pustik itu untuk aa salah satu strateginya salah satunya nanti bagaimana kita menjadi mungkin memang arahnya ke sekolah kedinasan murni kalau yang saya lihat salah satu strategi yang apa disusun di kami ya nanti dari 6 PolBang badan satu PPI ini strateginya ada 1 rektoratnya, kemudian PolBangkan lainnya menjadi jurusan tapi itu salah satu saja strategi nanti tentu ada strategi-strategi aa lainnya. ini yang menarik justru *out of the box*, menarik Bu ya.

[00:22:29] Artinya kan setidaknya konsepnya nanti nah untuk implementasinya bisa kita dipikirkan dibuat aturan apa itu sebenarnya bisa seperti itu jadi itu strategi-strategi karena memang pengalaman yang tadi disampaikan kami juga pernah tidak menerima mahasiswa Bu ya begitu. 2 tahun kami tidak menerima mahasiswa Bu ya. Ada pengalaman-pengalaman seperti itu juga bahkan Kami juga akan bertransformasi menjadi balai, balai Diklat seperti itu itu juga sudah kami alami. Hanya Memang saat ini yang dihadapi adalah PP peraturan jadi memang strateginya harus lebih kuat di justifikasinya harus lebih kuat di tingkat Kementerian sudah di tingkat internal juga sudah. diantaranya juga strategi lainnya juga apa membuka magister terapan memperluas ini ya itu mungkin nanti lebih jelas detail karena yang mengikuti Bu Endang nanti bisa diskusi lebih lanjut. Saya mohon maaf karena ada rapat ibu Endang Bu Sari Terima kasih Pak Juju dan Pak Farid Lebih detail dan lebih lengkap Bu Endang dan ibu Sari Lebih Detail dan mudah-mudahan ke depan bisa ada kolaborasi.

[00:24:03] Ada satu hal lagi mungkin boleh izin kami bisa mungkin kami diperkenalkan juga dengan sekolah pertanian Politeknik pertanian lain

[00:24:15] Baik

[00:24:16] beginimungkin kita tidak akan kunjungi tapi mungkin dengan berdasarkan kehadiran kami disini akan makin banyak dukungan, mungkin makin bagus kan gitu mungkin izin Bapak menyampaikan ke teman-teman yang lain mungkin ada suatu waktu akan ada Zoom meeting tinggal kami mengundang bahwa ini hadir supaya ini kedepannya

[00:24:39] Saya pikir itu tidak aa apa ya sangat bisa sangat bisa saya pikir kami kan di bawah pusat bukan di bawah badan PPSDP yaa Pusat pendidikan pertanian akan sangat memfasilitasi kita jadi kan ya itu tadi nasib kita masih Insya Allah nanti sama-sama didukung InsyaAllah Pak bisa Pak yang terpenting komunikasinya nanti itu mungkin Bu Sari nanti tempatnya di mana mungkin.

[00:25:16] Kami akan serahkan sedikit souvenir Pak

[00:25:23] Nanti aja nanti ada juga draft MOU.

[In_Poltek Pertanian Bogor 3.m4a](#)

[00:00:00] Pertemuan dengan tim Politeknik pembangunan pertanian

Sebelum itu saya sampaikan bahwa

[00:03:11] baik Terima kasih bapak ibu terimakasih atas waktunya bapak dan ibu yang saya hormati ternyata dari semua tadi saya memahami pertama ini tantangan bagi kami sehingga Kami juga harus maksimal bersiap-siap seperti itu tadi Bapak menyampaikan kan ada berapa opsi yang memang akan oleh kpk akan dikunci , ada beberapa opsi kan pak ? opsi yang terakhir adalah psikolog nah pertanyaan PTNP kegiatan Diskusi apakah penelitian ini dalam rangka mencari poin ke 4 Opsi kita diantara 3 opsi, 3 opsi yang paling dicari sudah digaris bawah itu yang mau tidak mau kalau kita tidak mau mencari yang luas kita tidak dapat, nah apakah ini salah satu opsi dari ketiga opsi ke 4 itu yang pertama

[00:04:14] yang kedua ini mohon maaf pak barangkali mungkin saya sendiri kurang terlalu paham di kementerian pariwisata pak kalok di kpk kan ada penyuluhan atau pertanian kemudian dibawahnya ada pusat pendidikan pertanian begitu...apakah di kementerian menyurvei apakah dari kualitas SDMnya dari siswa pendidikannya karena nanti akan dilibatkan sama artinya kita kan punya ada penghalang kemudian kita hidup disana mungkin di pariwisata kita bisa pusatkan ditambahkan pusat pendidikan misalnya. dan kita mungkin di pariwisata ada usaha seperti pendidikan pertanian. Kemudian berikutnya yang ketiga tadi sudah dijelaskan skema yang kami harus transformasi ya pak dan kemudian saya yakin bahwa studi literatur sebelumnya yang pada 2 program 25% anggaran dari kementerian yang disebut humas 75% dari kemendikbud nah kira-kira mungkin apakah yang mungkin hasil kajian selanjutnya reprints Dan saya kira mungkin bapak sudah tahu kalau penelitian kan sudah ada kompensasi kan begitu sebenarnya tidak dalam ,,, dan mungkin semuanya bisa saja terjadi yang kira-kira mohon yang sudah dapat seperti apa.

[00:06:14] Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih saya ya yang pertama dan kedua saya yang jawab yang ketiga Nanti Pak Juju yang jawab yang pertama inilah tujuan kami datang ke sini menawarkan opsi yang ke-4 apakah itu menjadi penunda kalau kita bersatu 157 ptkl apalagi membentuk asosiasi Insya Allah bisa, kenapa ? apa ini ini kalau saya bicara sedikit tentang politik ini ini akan sebuah poli jadi sebuah politik ini mohon maaf kalau bisa tapi kalau hanya poltekpar Lombok yang bikin tidak ada ada atau Politeknik pertanian sendiri yang bikin apa itu kan gitu Tapi kalau 157 jadi satu organisasi kalau menawarkan hal ini atau apakah hal lain hitunglah Berapa jumlah mahasiswanya kita angkat jadi isu politik habis Pak bisa-bisa undang-undang itu diubah selesai pak belum anak istri orang yang terimbas dan sebagainya mungkin saja tidak jadi Pak undang-undang ini nah selesai kita kira-kira seperti itu skenarionya. yang kedua di lembaga kami memang ada Perubahan struktur untuk sekarang kalau dulu lu waktu masih Pak Arif Yahya di bawah Deputy kelembagaan di bawah kelembagaan Deputy tetapi setelah berubah dari Pak Arif Yahya ke Pak wishnutama apalagi yang sekarang juga baru kita dibawah sesmen langsung ada namanya kampus baru jadi dibawah sesmen ada kampus baru kepala pusat pendidikan dia yang mengelola semua ASN yang ada di kementerian pariwisata termasuk lembaga pendidikan ini memang ada perubahan baru-baru ini sebelumnya juga di Deputy kelembagaan tapi sekarang kita langsung ke sesmen jadi kampus baru terima kasih silakan Pak Jujuk

[00:08:50] Terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan masalah program tadi yang Dikatakan ini Pak ya 25% 75% itu berdasarkan dari hasil survei kami pak di 6 PTNP perguruan tinggi negeri pariwisata itu perhitungan kasar berdasarkan jika anggaran dari seluruh anggaran ya Pak ya yang di berdasarkan hasil temuan KPK itu jika dialokasikan anggaran kedinasan itu dihitung berdasarkan jumlah input lokasi wilayah dari 6 PTNP Pak Kalau kami wilayahnya di 5 provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan

timur kemudian provinsi Maluku Maluku Utara serta NTB Pak jadi perhitungan kasar kami berdasarkan hal itu kemudian dari jumlah apa namanya daya dukung kalau dukung misalkan itu menggunakan program kedinasan Itu hitungannya seperti ini kami sudah Sudah punya rinciannya berdasarkan perhitungan program profesi itu kami sudah punya perhitungannya kemarin sehingga nanti gini Pak kami kemarin Politeknik pariwisata Lombok ini memang Politeknik yang masih baru Pak masih baru Namun dari beberapa anggaran besaran anggaran yang kami miliki kalau dihitung dari jumlah calon dari kabupaten kota yang akan mengirim itu hitungan Kami adalah 25% kalau dari sisi permintaan berdasarkan hasil survei berdasarkan body knowledge Yang kami sudah petakan kemarin dengan profesor Asril kami melakukan survei tentang Kebutuhan sumber daya kepariwisataan itu 75% artinya itu jika anggaran nya itu nanti diambil alih kembali oleh pihak Kemendikbud estek itu perhitungan kami pak sebab anggaran nya itu kalau tadi Pak Farid mengatakan kampus besar kami mohon maaf yang kalau dari kitchen stadiumnya Pak itu bisa menampung sekian orang yang satu kali tatap muka yang di studikan oleh KPK yang ada di STP Bandung serta Politeknik Palembang itu angka rill yang kami buat sebagai asumsi anggaran berdasarkan tata kelola oleh karena itu kemarin kami sempat menyatakan kalau anggarannya itu sepenuhnya diambil Kami punya perhitungan kasar seperti ini sebab kalau dihitung Pak subsidi kami dari hitungan per tahun per mahasiswa itu kurang lebih 45 juta SPP nya adalah rp2.050.000 per semester jadi semua biaya untuk praktikum dan sebagainya Itu semuanya adalah dibebankan kepada kampus jadi kita sendiri sudah ada anggaran sudah ada dihitung berdasarkan kami bukan blu pak kami kemarin sebenarnya sudah merencanakan dua alternatif Pak mau BLU atau gimana kami juga punya hotel yang bisa kami Katakanlah dikelola untuk kebutuhan kami namun dengan kami masih baru kami hanya memperhitungkan 2 PTNP kemarin yang menjadi sasaran BLU mungkin akan menjadi tawaran pada beberapa alternatif kemaren yaitu STP NHI sama Politeknik pariwisata Bali itu pak jadi itu kemarin berdasarkan perhitungan yang ada di tata kelola Terima kasih Pak

[00:13:26] Sedikit saya tambahkan penelitian sebelumnya ada Pak jumlah yang dibuat oleh bagian humas KPK nanti kami sharing tahun 2021 awal itu sebagai acuan yang kedua Teori ini kami angkat bahwa Kalau Diknas mengambil alih berarti Dia Universitas dengan government lepas dari industrinya kenapa Saya katakan lepas dari industrinya karena quality nya Kenapa saya mengatakan bahwa sebaiknya dia tetap ada disini meskipun ingat Pak ya Dana 20% itu tidak dikelola lagi oleh Kementerian Pertanian jadi kementerian Pertanian dan kementerian pariwisata hanya mengelola saja untuk ASN untuk pelatihan-pelatihan jadi bukan Jadi bukan dari 20% kita tidak menyalahi aturan kan gitu yang mengelola Umum ini adalah Diknas Betul apa kata aturan kedua menjawab Tadi masalah quality control nah quality control disana Kementerian Pertanian Dengan Kementerian Diknas 1 payung maka masih bisa kita kontrol itu kira-kira alasan dengan triple ini industri tidak bisa masuk kalau hanya Kementerian Diknas yang tangani Kenapa karena kualitas yang kedua silahkan

[00:15:11-31:44] kami coba untuk menyampaikan secara ...jadi penelitian 1903 kemudian tahun 50an pada tahun 87 kita yang kemudian 2002 jadi stp apa kita daridulu kemudian stp selama ini semua nah mulai sebelumnya beliau bahwa hanya anak-anak desa yang berpotensi untuk di pertanian yang kedua data sensus pertanian menunjukkan bahwaatas dasar itulah politeknik pertanian merekrut mahasiswa dari desa khususnya lulyan dari smk pertanian untuk apa dalam rangka generasi pertanian kita kan membangun petani lebih progresif petani yang menjadi berbeda. Nah dengan itulah kami berdiskusi dengan Maka mahasiswa kami itu diberi beasiswa dengan demikian lulusan kamiRPP yang kita kagiatan amunisinya seperti itu untuk disegerakan boleh-boleh saja ...yang kedua... tapi itu sudah juga jangan lupa jumlah petani selamatkan dulu ...jadi itu maka kami sepakat dengan semangat ... jadi kami sudah ... menerima APS yang kedua kami menerima uang PKS itu kami sudah solid-solid dengan srekan salah satu rekan PTKL pertanian kita sembunyikan dari sisi fungsional saja sekarang semua posisi jabatan fungsional hanya ada salah satu yang lainnya kan fungsional semua. Sekarang menjadi tingkat kelompok yang pertama usaha pertanian yang kedua.. yang ketiga pengawas pertanian dan keempat itu khususnya pelaku dalam pengawasan fungsional karena itu kepentingan sehingga tahun sebelu,nya masing-masing ada 1 karena disitu ...yang sekarang sama saja bohong memang untuk menyiapkan pertanianini menjadi takut petani terkait knepa petani menjadi... karena itumasalah ketahanan pangan dan papan. Kalau gak salah ada 157 ptkl... bagaimana sebelumnya kita ada justifikasi dan memang logis bisa di.. seperti itu ancaman kuliah ya kita bisa apa namanya mempunyai tujuan yang sam menghasilkan petani berdasarkan .. karena kurikulum buakn menjadi penulis karne buktinya yang nyata pun sebagusnya pemahaman seperti itu makan kmai kan tetap dengan dua pembuatan dengan dasar legerasi utama di , sedangkan yang ffungsional pertanian kami kerjasam dengan badan usaha kemendikbud di rektoret jenderal farmasi mereka mau mendidik guru0giri smk yang prodktif kami yang mendidik kami yang mengajar ini slaah satu kerjasam dengan kemendikbud dalam rangka mendidik politeknik diseleuruh indonesia smk-smk artiy ptkl yang menjadikan ptkl khsusunya di pemerintah justifikasi .

Silahkan ada yang ingin disampaikan

Assalmualaikum terimakasih kesempatannya yang pertama terimakasih kepada bapak saya juga msih bingung terhadap peneliian habis 1Milyar lebih dan pkm nya 1 Milyar pertahun saya masih belum sadar. Ada 3. 1 pembuatan formasi jadi kami dari sisi sependapat juga sekaligus dari sisi kelembagaan karena tadi saya denga ada 2 tahu posisi antara dari seumbernya. Bagaimanapun organisasi ya kan pak mungkin dari segi aturan dan sebagainya apakah mungki ada penggabungan ini dari pengembangan politeknik karena ada ...satu rumah saja satu rumah satu anggaran wujud ini nantinya kan kelembagaan itu dari jauh dan sebagainya dan itu anggaran dan juga tadi bapak mengabari ada 2 sisi anggaran yang disatukan kmai punya satu lagi dari sisi aturan tentang kelembagan itu itu yang saya khawatirkan disini yang mungkin sudah dikaji sebelumnya dan memunculkan menjadi satu sisi anggaran kemudian dari sisi aturn

keorganisasian kelembagaan ..apakah mungkin suatu model ini akan kita ambil kalau ada hanya satu sisi yang .. kemudian yang kedua perjuangan sudah menyampaikan tentunya kalau bersatu 157 mask gelawan 1 pak ini tadi bapak menyebutkan peningkatan politik karena undang-undang 12 ini sesuatu bukan mustahil tapi agak sulit mangkanya saya paham ini pendapatnya dari sisi 2 sisi antara tadi 2 sumber karena akal untuk sistem itu undang undang 12 itu harus dirubah tapi pembuatan dpr dan pemerintah lainnya nah ini yang saya takutin disitu di kamus proklamasi ini tidak jadi kodel yang bapak ini belum muncul kayak point pertama kemudian yang kami tetp optimis karena saya juga belum meneliti keunggula yang sudah kita kelola dengan masing-masing kementerian dan saya juga tidak suka kita berbeeda beda kalau yang boleh mana yang boleh kalau yang tidak boleh tidak boleh seperti tadi ada tahap angka penahan perusahaan sepertibyya kan sama ada kalau ipdn untuk mengellola kemeterian dia. Tapi kalok kementerian pertanian untuk dia pertanian kan sudh kelihatan sampai sininya soal sekarang temuan kpk tinggal dicari bagaimana sistem perbaiki penguat kpk itu menurut saya jadi apa bagaimana memperbaiki temuan kpk itu supaya tidak terjadi temuan arahnya kemana karena tadi sudah merubah sistem sedang dibangn oleh sekarang mereka itu afgang sulit jadi dianjurkan lebih juga mengkaji tentang bagaimana supaya temuan kpk itu tidak jadi nah itulah studi itu kalau bisa dibandingkan saya berani masih karena kita bukan pengalaman saya sampikan dari 1903 jaman saya masih dimana itu sudah lahir dan keunggulanya sudah isa diadu dengan kementerian yang lain mangknay kedalam hal ini berdarah-darah bahsanya ini jadi kta ujicoba penelitian lulusannya pak bandingkan antara kemdikbud dengan kita itu harus menjadi bahan rujukan karena untuk dari semua sisi lah dari sisi saya jadi itu yang saya inginkanlah ya pak lebih ke di itulah yang tujukanlah awal pertemuan. Tolong ini menjadi fokus kita semoga tidak jadi. Kemudia dari sisi kajian tadi kelembagaan Karena waktu yang singkat tadi harus karea siapasih yang bisa kita andalkan pak gada pak semua sudah tidak bisa diselamatkan kalau sudah diketuk palu itu yang secara politis dulunya, kemudian mohon maaf pak ini hanya sekedar pendapat saya, terimakasih lebih jelas juga yang sekarang tentang korupsi ini, terimakasih ...

[00:31:45] Jadi gini anggaran yang kita gunakan di PTKL ini yang saya dapatkan dari teman-teman bagian Keuangan polteknikpar Lombok ya itu memang dari anggaran 20% itu. Jadi yang 20% ini adalah anggaran APBN ini yang harusnya dikelola oleh Kementerian di Diknas ternyata Dia hanya mengelola 12%, 8% nya itu dikelola oleh PTKL menurut Aturan itu salah, sehingga harus tutup dikembalikan ke Kementerian Kementerian, Sehingga jalan keluarnya memang seperti itu kalau menurut aturan ya ikuti strike aturan sehingga uang dikatakan tetap kembali kita tidak melanggar aturan tapi Politeknik itu tetap jalan aset sudah dilimpahkan pegawai tidak dimutasi tidak PHK kalau mau singkat saja seperti yang disampaikan tadi bahwa yaudah kita kembali aja seperti tahun sebelum 2000 bahwa kita hanya mencetak tenaga penyuluh Kalau kami Pendidikan 1 tahun tiga teknis PNS umumnya pelatihan-pelatihan kan, Tapi kalau itu dilakukan oleh PTKL maka ada masalah besar di dalamnya Ada 4 variabel yang akan dirubah saat pengalihan aset SDM, Yang tadi SDM Seperti saya sudah Rektor kepala menuju profesor balik lagi Jadi

adhiswara Ya kan yang tadinya kalau dosen 5 tahun sedangkan adhiswara hanya satu tahun itu bu ya. Kemudian masalah tadi apakah jelas kualitas internasional seperti yang Bapak bilang bisa dijamin kalau Diknas ini sama seperti ini kompetensinya yang ketiga SDM sarkas anggaran Nah itu persoalan anggaran memang anggaran ini kalau hanya kita kembali seperti itu Pak berarti kita tidak lagi dapatkan dari Kementerian yang 20% sehingga sumber anggaran dari kementerian, di lain pihak kalau kita buka model seperti ini maka belum berani bisa jalan quality control nya tetap jalan, karena kita hanya uang dana 90% karena kita hanya mencetak pelatihan-pelatihan tidak papa karena yang dilarang di ptkl itu kita menggunakan anggaran yang 20% itu yang tidak boleh kita gunakan yang boleh gunakan itu hanya Diknas itu menurut dia sehingga dia katakan pemborosan. Kalau pemborosan itu dimanfaatkan tidak efisien dan tidak efektif padahal ini pengeluarannya sudah efisien untuk industri Cuma itulah kpk tujuannya untuk menyamakan anggaran negara bukan hanya di korupsi tetapi yang salah penggunaan, itulah yang harus diluruskan kalau kita begitu sulit kita mengingat.

[00:36:16] Mohon izin Pak Hidayat ya saran-sarannya luar biasa dan ini nanti akan menjadi perbaikan untuk menyempurnakan dari prototype ini yang kedua nanti bapak ibu saran melalui instrumen yang tadi saya masukkan di link nya itu nanti kami akan mohon maaf Pak ya jangan sampai nanti dibilang hanya perguruan tinggi kepariwisataan intinya bukan hanya kepariwisataan semua PTKL supaya kami di dalamnya nanti Pak mungkin mohon izin saya buka Pak ya itu salah satunya mohon izin Pak supaya nanti kami bisa memetakan tentang beberapa hal yang akan menjadi ini arahan dari masukan bapak ibu menjadi masukan yang berharga menurut kami Pak karena nanti di sini ada fokus masalah satu apa saja semuanya Pak nanti mohon saran menjadi hal yang kami akan konstruksi berdasarkan saran Bapak Ibu kemudian nanti kami akan bandingkan juga dengan PTKL lain yang memiliki nasib yang sama seperti yang tadi diucapkan sama Pak Hidayat tadi bagi saya memang kami masih dangkal jadi kita masih akan mendapatkan minta masukan dari beberapa teman-teman dari PTKL agar untuk yang pertama ini pak yang kita ingin agar roadmap institusinya untuk pendidikan vokasi jadi nanti kedepannya minimal ada suatu bentuk yang kami kemarin adakan audiensi dengan para pendahulu kami Pak yang sudah tahun 2000an berapa kemarin itu yang terkait dengan masalah atau yang terkait dengan semua PTKL itu yang terjadi sehingga kami tidak belajar dari apa yang sudah dipaparkan mangkanya ini minta saran dari beliau terkait dengan hal ini kemudian kami langsung sounding ke beberapa PTKL minimal masukan-masukan itu menjadi hal yang utuh Pak jadi saran-saran yang terbaik kami harapkan benar Pak di sini supaya minimal kami nanti dari seluruh PTKL memiliki keinginan yang sama terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji oleh apa hasil kajian yang di oleh KPK Pak yang kemudian di floor kan dengan RPP mudah-mudahan Pak RPP nya tidak jadi tanda tangan dan gejolak Politik ini kan kalau ini terjadi kemungkinan besar prediksi kami Pak dari beberapa PTKL yang sudah memberikan informasinya kalau tadi Bapak mengatakan begitu berarti bapak mungkin orang kedua yang mengatakan begitu Pak Pak hidayat ini orang kedua yang mengatakan satu melawan sekian PTKL yang menjadi perguruan tinggi ini memang dilema pak kita sudah outcome nya sampai dengan impact nya sudah benar-benar real di pasar kerja maupun mengabdikan di pemerintahan itu sudah benar-benar

terbukti namun ini masih dilakukan karena waktu anggaran dan sebagainya karena efisiensi dan sebagainya yang penting kita mencari jawab dengan riset Pak masukan-masukan dari PTKL sehingga ada suatu bentuk utuh untuk masukan pada pemerintah. Mungkin itu terimakasih

Baik nanti akan di share di grup dosen ada beberapa hal data isinya yang harus disampaikan.

Kemudian beberapa hal yang saya sampaikan yang pertama dari tema 75 75 itu dibuat setengah Tapi ketika himbauan 50% 30% itu digunakan untuk pelatihan, pelatihan itu bukan untuk pendidikan tingkat tinggi biasanya seperti itu pelatihan itu opsi pada tingkat akhir kita tidak berhak nah ini yang perlu mendapatkan kemungkinan juga atau mungkin yang 20% itu khusus untuk asn saja. asn atau pendidikan, kemudian hal yang kedua ini sepertinya kesan saya salah,..... saya pernah dengar sekali Pak pada beberapa event itu tidak ... heran sekali saya toh saya juga ingin mendapatkan bukti seperti itu heran sekali melihat sekolah pariwisata, nah tiba-tiba dari beberapa persen ini mengingatsudah harus diselesaikan para menteri inikan beda ,, meskipun saya tau betul saya paham betul bahwa memang bukan kursi pendidikan ini ... tapi kan ini sudah habis seperti ini. Berapa orang penumpang yang ada dalam perahu itu sudah cukup banyak jadi pak menteri kita ini semua dilibatkan di level 1. Untuk itu kami mohon bahas kemarin mau tanya ini masalah penting ini lebaran dulu bikin pusing.kami mengarpakan yang sudah untuk menteri ini ada yang terlibat dan outcome yang berikutnya semoga tidak ada penelitian ini saja berikutnya. Mungkin pak farid pak juju bisa menginisiasi terbentuk ny asosiasi seperti ini bisa membandingkan diri menjadi sapu lidi. Dan mudahan kita masih punya waktu untuk berjuan nah kalaok satu tahun lagi Sementara menteri menteri kita belum tau masalah

[00:40:05-00:48:24]

Menit 44 44.50.... Tapi dari sisi belum nyampai sana

44.50 tapi dari sisi lain belum nyampai sana output kemmana outcome kemana ... tapi kalau dtutup degan gaji pegawai. Kalau pegawai 11 juta Tapi kan pada sisi yang lain harus ada justifikasi itu kementerian pariwisata apa yang bisa membedakan anantara kpk dengan kita. Bisa menegamini itu yang penting..... atau ada rekomendasi memang lembaga ini dari sisi lain bukan dari sisi anggaran tidak bis ditaklukan oleh kementerian ...bersama-sama menjadi hak utuh untuk kita gak bisa menunggu waktu ini....mungkin sudah saya masukkan justifikasi hasil kajian tapi ada sesuatu yang lebih yang bisa menjadikan ... khususnya di kementerian pariwisata sebagai...jadi menteri yang terkait maunya apa.

[00:48:25] Jadi memang saya mendapatkan informasi terakhir dari teman-teman keuangan kita ini sudah mulai rapat-rapat dan isu itu sudah diangkat dengan DJR kalau Kementerian PTKL ini mengambil inisiatif bahwa pilihan ke 3 bahwa hanya menerima PNS hanya pelatihan-pelatihan maka anggaran terpusat di kampus baru bukan di politeknik nya tapi kita tidak mengeluarkan dana tapi mengurangi pendidikannya tapi

pusat anggarannya semua ada di kampus baru kalau itu jadi Kedinasan kemudian satu hal lagi Pak bahwa memang hal ini tidak mudah tetep kementerian yang sekarang bnatu dua kementerian yang sudah, kalau kementerian kami datang ke poltekes di mataram dia katakan bahwa menterinya sudah pindah ke Kemendikbud termasuk Asosiasi nya juga, Asosiasi kesehatan... kalau kementerian kami sudah juga kementerian pariwisata mengharapkan kementerian pendidikan masih dalam ..dan memang yang ... bukan beroperasi jafdikn tidak paham pada saat seperti ini dia tidak menjawab iya tidak juga tapi yang jelasnya sesment kami bahwa itu sudah tidak/.. akhirnya kami diperintahkan oleh assesment semua perguruan tinggi

[00:50:37] Kalau dia mau berbicara dia menunggu hasil dari kita tapi kalau inisiasi mereka sendiri saya tidak tau kalau kementerian lain, paling tidak kan seharusnya kajian ini dibuat oleh kementerian harusnya kan supaya bisa kedua inisiasi kementerian harus membuat organisasi ini organisasi PTKL itu kementerian bukan kita, kita mengajak beberapa kan tidak mungkin kalau kementerian sama kementerian berbicara saya pikir gak masalah. Kalau rating bagus ya sesuaikan kami belum makan ni.

[00:51:28] Terima Kasih untuk moderator, terimakasih pak farid dan pak juju. Terimakasih atas beberapa penjelasan yang telah disampaikan.untuk pertanyaan yang pertama bagikan dulu sebelum pengeluaran uang spp akan kami ringkankansetelah psbb dan ppkm ini merupakan tsunami yang kedua, tsunami yang peryam itu 2009 ketika kami tidak dibenarkan utnuk menerima mahasiswa

[00:52:21] Start 2 tahun kaliatannya kalau ini kita tidak berbuat sesuatu ini sunami yang kedua ada lagi sunami-sunami yang kecil sebenarnya di instansi kementerian pertanian tapi kecil terkait dengan itu saya sebenarnya kalau kita cermati evaluasi KPK itu seperti tadi sebenarnya hanya efisiensi finansial, tapi tidak holistik misalkan dibandingkan impact nya gimana jadi harus itu juga jangan hanya uang nya tetapi bagaimana sejauh ini kementerian pariwisata atau sekolah tinggi pariwisata yang menghasilkan pekerja-pekerja yang bermanfaat untuk negeri ini begitu juga di kementerian pertanian tahun 1984 dan 2004 itu kita mengalami peristiwa itu swasembada berassecuil apapun ada peranannya orang-orang di kementerian tapi hasil dari pendidikan lembaga pendidikan di kementerian pertanian ada penyuluh di sana ada sdm-sdm yang lain tapi saya ingin mengatakan harus jujur sebenarnya oleh karena itu ada slot bagi teman-teman kita yang 157 untuk secara ini juga mengemukakan fakta-fakta bahwa dari segi ekonomi mungkin hasil penelitiannya benar mungkin ya tetapi di segi lain mungkin nilainya tidak kalah dari segi financial tadi saya beri contoh pak kalau penyuluh itu diukur dengan PAD ya tidak akan nyambung pak lembaga pendidikan itu dikur dengan PAD tidak akan beda dengan Dinas pertambangan Dinas Energi ini betul menghasilkan PNS oleh karena itu harus juga KPK melihat sisi lain kalau dia menilai PTKL ini bermasalah nah kemudian yang kedua saya ingin

mengomentari bapak membangun apa draft model pak berdasarkan input proses ya input proses, output, outcome, impact ini walaupun ini masih tatanan rencana tapi mungkin ada hipotesis yang akan dibangun konstrat nya kira-kira gimana apakah hasil penelitian ini nanti mengarahkan 3 pilihan opsi 1,2 sampai tiga ataukah ada 4, 5 nya begitu Pak ini harus disebarakan ke teman-teman yang 157 dari sekian Universitas atau PTKL ini sekian orang atau sekian PT cenderung misalkan itu data yang menarik untuk yang di atas sebelum RPP ini atau Agustus untuk mencalter lahRPP ini, jadi mestinya ada bangunan nya gitu Pak kerangka pikir paradain atau konstratnya begitu kira-kira ini loh kalau ini, ini akan terjadi seperti ini ada beberapa mungkin bangunan ini akan terjadi seperti ini kita lebih cerita ini kan yang draft model tadi ini tatanan awal ceplok kerja kita tapi ketika proses itukan mengandung ada 5W 1H nya Pak ya kan di mana siapa bagaimana dan seterusnya proses itu dilakukan itu harus jelas juga mungkin ada di rancangan penelitian Bapak ada, tetapi setelah itu kita bangun konstrat nya untuk sebelum dimuatkan mungkin sudah ada juga Pak ya di koesioner hak arahnya penelitian itu mungkin sudah diturunkann di variabel-variabel yang di peneliti ini sehingga jelas nanti wah hasilnya kalau ini seperti ini kalau ini akan seperti ini saya pikir seperti itu Pak terima kasih Assalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh

[00:57:03] baik masih ada yang lain kalo tidak.....baik kalau sudah tidak ada lagi masukan teman barangkali kita bisa sudahi pertemuan ini saya ucapkan terimakasih kepada teman teman dari poltekpar lombok yang sudah berbagi ini kepada kami dan juga nnti hasil penelitian dan harapanya mudah-mudahan asosiasi bisa dan kita punya waktu untuk berjuang. Malah kalok ada yang bisa mentok ke dpr supaya lebih so hot ya .sekali lagi saya ucapkan terimakasih. Kami mohon maaf semoga hubungan kita lebih baik .kita akhiri asslamualaikum wr.wb.

UNHAN 1

[00:00:00] Mulai dari S2 dulu S2 kemudian S3 baru S1 kemudian D3. Mengapa S2 dulu karena S1 nya dari akademik, dari Akademi Militer, laut, udara. S1 nya dari situ Pak satunya dari situ kemudian S2 nya di Universitas Pertahanan. Sebelum ke Universitas Pertahanan sudah ada yang tadi STTAL (Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut) di Surabaya itu hanya S1 S2 nah gitu yang S1 itu tentang keinsinyuran levelnya itu kan gini Pak sebelum ini kan bedanya gini Pak kalau sekolah kedinasan itu tidak di bawah Kementerian Pertahanan langsung tapi di bawah Mabes TNI. Mabes TNI memang di bawahnya Kementerian Pertahanan gitu loh nah kemudian kita ada beberapa sekolah kedinasan tapi yang sifatnya profesi, profesi berarti mendukung kedinasan kemudian berkembang kita mengadopsi NPS ya Naval Postgraduate School Amerika dia punya S2 Selain itu dia punya yang namanya nya NDU (Nasional Defense University) Nah itu. Rata-rata di dunia itu setiap aa negara itu mesti punya NDU nah kita IDU (Indonesian Defense University) Republik Indonesia Defense University sebelum itu semua sambil, Hanya seperti itu Jadi sebelum itu semua akhirnya membuat lah STTAL (Sekolah Tinggi Tinggi Angkatan Laut) di bawahnya Mabes TNI ada S1 ada S2. Nah karena ada perkembangan bahwa AL dulu itu kan setara S1 di luar negeri diakui. Kalau mau S2 ke luar negeri, cukup ijazahnya dari Akademi Militer, Laut atau Akademi Udara, atau Akademi Kepolisian waktu itu ya terus berkembang penyetaraan S1 nya akhirnya akademiknya akhirnya menjadi sarjana terapan jadi angkatan laut lulus Akademi Angkatan Laut lulus dulu tidak bergelar ya pak ya akhirnya caranya bergelar sekolah lah S1 di STTAL tapi sekolah luar negeri langsung, D4 langsung karena terapan karena itu di apa namanya vokasi terapan. Nah akhirnya nya berkembang dia dapat sarjana terapan makanya tidak butuh lagi S1 jadi langsung S2 di STTAL. Cuma STTAL itu kan sekolah teknik teknologi ya sama kaya elektro dan industri teknik elektro informatika ternyata ini tidak memenuhi tidak memenuhi disiplin ilmu banyak ilmu yang lain yang harus dikembangkan di tingkat S2. Akhirnya nya keluarlah UNHAN ini sekolah universitas Sekolah Tinggi juga setingkat universitas cuma dia di bawah Mabes TNI kemudian UNHAN mendirikan waktu itu zamannya Pak SBY tahun 2011 ya mulai UNHAN itu 2011 sekarang ini kira-kira 12 tahun, 12 tahun nah dari situlah munculnya UNHAN hanya S2 waktu itu aa dua fakultas.

[00:06:48] Ini nunggu waktu sambil gali ternyata beliaunya ini penelitian terkait dengan vokasi dari pariwisata Lombok tapi yang menangani masalah vokasi Berarti universitasnya di apa, Politekniknya di Lombok penelitian tentang itu karena isu yang lagi booming ini dari KPK tentang PP PTKL (Perguruan Tinggi Kementerian Lain) gitu. Dipikirkannya KPK ini ada duplikasi yang mau dilihat itu tata kelola nya seperti apa menyikapi itu makanya melakukan penelitian tentang itu bagaimana menyikapi Ketika

nanti itu diberlakukan nah cuman arahnya ke sini sebetulnya ini kita kan bukan vokasi tapi vokasi nya nanti di Belo kebetulan beliau ini dari tim jamtu hubungan jaminan mutu makanya bapak, Beliau ini juga sekretaris LP3.

[00:08:50] Izin kami aa dahului pak, jadi saya ya tujuannya sudah jelas Bapak sudah sampaiin Kalau saya sendiri Pak Farid Said sebagai wakil direktur Politeknik pariwisata Lombok sekaligus diminta oleh Pak direktur sebagai ketua tim penelitian ini nah gitu untuk menyikapi PTKL. Karena ini aa apa namanya sangat trend lah kami bikin kegiatan setiap tahun kami ada namanya nya penelitian institusi ada anggaran tersendiri mengangkat isu-isu tahunan. Jadi setiap tahun kami angkat setiap isu yang lagi trend isunya khususnya di bidang pariwisata tentunya itu ada anggaran khusus yang kami miliki sehingga tahun ini kalau di Lombok kan kita dikenal dengan pariwisata halal, tahun lalu kami angkat tentang pariwisata halal Nah tahun ini karena isu PTKL kami angkat isu PTKL mengangkat tata kelola yang tadi Bapak maksud saya sendiri sebagai ketua tim Pak Juju Doktor Juju kebetulan di bagian penjaminan mutu kemudian ibu Risda salah satu dosen muda nah supaya regenerasi lah Pak Kemendikbud supaya tahu bagaimana tetekbengeknya. Ini betul-betul muda ini *tertawa, gitu Pak jadi tujuan kami ini jadi 4 hari ini kami melakukan survei langsung wawancara ke beberapa perguruan tinggi PTKL kemarin kami dari Politeknik Pertanian kemudian hari ini UNHAN sore nanti ini di STIA lan Jakarta besok di PKN STAN dan Poltek Penerbangan Curug. kami mau menghimpun aa apa namanya beberapa informasi atas apa sih antisipasinya teman-teman semua kurang lebih 157 ptkl itu adalah hasil data dari KPK salah satunya dibawah kementerian pariwisata itu hanya ada 6 Pak. Ada namanya Politeknik Pariwisata Medan, Makassar, Bandung itu masih STP Politeknik Pariwisata Bandung atau biasa disebut dengan NHI itu yang paling tua kemudian Bali juga kurang lebih empat setengah tahun sudah jadi Politeknik juga sekarang dulunya STP jadi yang di bawah Kementerian hanya ada 6. Jadi kami sudah melakukan pertemuan pertemuan melalui kampus baru Kementerian itu sejak Januari eh Februari membahas masalah ini bahkan kita sudah membahas karo hukumnya Kemendikbud stek untuk membicarakan masalah ini bahwa ada beberapa PTKL kan informasinya bahwa hasil temuan mereka itu mengatakan yaa kalau tidak digabung dengan perguruan tinggi dialihkan ke Diknas dengan perihal memang ada kesepesifikan itu persoalannya setelah kami tanya kespesifikan Diknas saja tidak bisa membuat kriteria mana spesifiknya itu gitu loh, Nah di sana lah kira-kira celah-celahnya yang bisa kita lakukan dalam penelitian ini apa sih supaya ini aturannya berjalan ya kan tetapi PTKL nya juga tetap jalan dan nyaman tidak ada lagi kedepannya perubahan ada perubahan aset SDM-nya tidak ada lagi yang di PHK dan sebagainya kan ruet jadinya negara kalau begini nah begitu. Cari yang nyaman-nyamannya lah tapi aturan tetap berjalan nah gitu itulah kira-kira tujuan kami Pak. Mungkin sudah dapat info dan beberapa info tadi terima kasih banyak bagaimana aa antisipasi kalau kami bilang tadi tips dari UNHAN lah supaya kita bisa Karena kemarin Pak waktu Zoom meeting itu saya dengar Bapak kayaknya Pak Nyoman ya.

[00:13:45] Sedikit saja Pak, memang sejak UNHAN sendiri kemarin baru berani mengatakan kan ini kampus, Kami kemarin tahun kemarin baru membuka S1 Pak dan itu, Tapi saya bicaranya agak mohon maaf ya ada yang ini mohon off the record aja ini ilmiah, kami membuka S1 4 fakultas 10 dan atau 11 Prodi pada saat itu berjalan smooth Pak. Ketika kami sudah mendapatkan izin penyelenggaraan izin penyelenggaraan untuk 11 Prodi tersebut nah akhirnya berkembang menjadi ada perubahan otk SOTK sehingga ada banyak kepentingan bukan hanya KEMHAN atau UNHAN dalam hal ini Kemendikbud dan ternyata ada kepentingannya Menpan. Kita diaduk-aduk nggak keruan lah istilahnya bahwa izin penyelenggaraan itu bukan izin apa namanya operasi padahal pak dari sejak 17 Prodi sebelumnya yang didirikan S2 sampai dengan S3 bahasanya tidak sama ada izin penyelenggaraan, ada izin operasional, ada izin mandat ada izin apalagi banyak sekali bahasa itu kami tidak tahu seperti itu akhirnya di tengah perjalanan ada kepentingan Kementerian tentu kita lama di Kementerian jadi tahu setiap menteri ingin membuat sesuatu yang monumental di dalam masa kerjanya masa jabatannya atau masa pengabdianya satu hal yang dibuat oleh pak menteri Ristek itu Bagaimana membuat satu kesatuan dari aturan-aturan yang sudah ada itu dijadikan satu salah satunya adalah muncul progress PTKL kami mendapat Surat Perintah Menteri Menteri Pertahanan dapat surat perintah ditawarkan dua opsi kedinasan atau di bawah Kementerian Dikbud tapi melalui beberapa kali pembahasan rapat akhirnya menteri membalas surat tersebut bahwa tidak memilih satu atau dua artinya berjalan seperti ini artinya APBN di dalam Kementerian sampai saat ini semuanya ini ngambang OTK itu belum sampai ada dengan hari ini mungkin saya tidak mengatakan kalau tingkat Dirjen ke bawah itu kan sebenarnya adalah mewakili menteri sebagaimana fungsinya itu kan anunya bunyinya Dirjen itu adalah mewakili menteri pribadi sebagaimana fungsinya itu yang selalu saya pegang dulu kalau di Kementerian tidak bisa berbuat apa-apa dengan adanya PTKL ini itulah yang terjadi tetapi di tengah perjalanan juga bapak menteri saya kan memang ya Pak mendapat perintah dari Pak presiden bahwa apa yang bisa diperbuat oleh Kemhan untuk menjawab tugas dari Pak Presiden yang perlu dipersiapkan atau memperkuat wilayah-wilayah perbatasan bahwa Bapak menteri menyampaikan kita membuat pendidikan yang mengarah ke vokasi di satu perbatasan Atambua dengan Timor Leste padahal titik perbatasan ini ada 10 Pak nah itu pasti akan dibuat semuanya. Kemarin sudah kami upload untuk memintakan izin operasional untuk vokasi tetapi berbarengan dengan itu pelaksanaannya akan dibuka Pendidikan pada tanggal 17 Agustus inilah Pak yang terjadi di antar Kementerian. masing-masing sudah bertahan kan nah ini hasil di sini. Tapi saya sebagai anak buahnya Menhan saya ya 100% ,500% ,1000% saya ngotot tapi ini harus dilaksanakan nah ini urusan yang ke belakang ini saya tidak mengerti izin itu akan muncul atau tidak yang penting kita sudah laksanakan sesuai prosedur itu saja. prosedurnya lewat silem Karma kita upload Silem Karma itu saja perkara tidak diizinkan terserah tetapi itulah pak kalau bapak kesini dalam rangka penelitian tentang Universitas kedinasan kami sama sekali bukan kedinasan karena surat Pak menteri itu sudah menolak 2 opsi tersebut mau kedinasan ya sudah berjalan seperti ini secara teknis pendidikan fungsi pendidikan ada di Kemendikbud fungsi pembinaan personilnya dan organisasinya ada di bawah Kemhan di mana sampai saat ini APBN nya dari mata anggaran yang ada di Kemhan, Kalau seperti Bapak sampaikan tadi STAN itu memang kedinasan dan Zam ini

dosen di STAN Pak tidak tetap kita rencana juga berkunjung juga ke sana nanti demikian pak mungkin kira-kira yang bisa saya berikan penjelasan berkembang silakan kan.

[00:21:13] Mohon izin Pak terkait dengan ini pak Kemarin kami cari bentuk Pak dari beberapa RPPL nya Pak Zoom meeting Pak ya dengan Kementerian semuanya pada saat itu kita mencari bentuk sampai hari ini kami pertama melakukan kajian di beberapa destinasi tentang daya serap dari lulusan kami dan yang kedua adalah tentang aa posisi Dinas Pariwisata di masing-masing kabupaten kota dan provinsi itu kami lakukan survei kebetulan wilayah kami itu di 5 provinsi. Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Maluku, Maluku Utara, dan NTB Pak. jadi di sana Kami survei serta posisi jika dilakukan program kedinasan di sana memang satu sisi kami langsung ke menpan disitu memang kalau kampus besar kami misalnya yang di kami di Lombok itu 20 hektar Pak gedungnya alhamdulillah sudah memenuhi standar dari ban-pt kita sudah Internasional. kalau hanya menerima per Kabupaten 5 Pak maksimal dengan daya serap PNS nya itu sendiri katakanlah 50 dengan kampus seluas ini kan mubazir Pak saya kira itu. Kemudian kami membuat suatu bentuk prototype yang sifatnya jadi harmonisasi dari pola yang ada yang di minta sama Kemendikbud dengan KPK-nya kami membuat masukan-masukan dari teman-teman dari PTKL supaya kami bisa membuat mengubah bentuk kami kira-kira dari hasil riset itu survei kami memberikan satu bentuk aa lebih smooth lagi pak tidak ada lagi yang namanya ini kedinasan ini reguler kalau ini mohon maaf Pak distop dengan program reguler kami yang terdampak adalah 1 dari sisi industri, industri kami Pak rata-rata di perbatasan mohon maaf ya Pak di tempat tempat destinasi di pelosok Indonesia itu rata-rata masih memerlukan di asosiasi pun rata-rata sangat kehilangan Jika itu distop untuk program reguler nya kalau hanya mengelola kedinasan saat ini mohon maaf Pak Kita Harus berpikir tentang politik di tingkat lokal yang sudah kita didik jangankan IPDN saja yang sudah memiliki itu oleh politik lokal nah sekarang kalau kita buat program kedinasan untuk gerakan masif terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten kota di Indonesia kalau masih ada konsep yang mengacak-acak dengan konsep mutasi dasar yang kuat harus politik saja yang kita lihat maka akan mubazir negara ini membiayai kedinasan makanya kami kemarin survei di 5 provinsi Pak itu menjadi bagian untuk membentuk sebuah formulasi dalam artian beberapa kalau kita Nilai plus dan nilai minus nya jika itu dibuka hanya program kedinasan dan plusnya jika dibuka regulernya Pak minusnya juga ada Pak tetapi di sini memang kemitraan kami rata-rata pak di PTKL untuk yang di Politeknik Pariwisata di 6 PTNP ini rata-rata memang sektor industri perhotelan, kemudian travel, jasa kuliner kalau itu sampai hari ini begitu lulusan Kami selesai pak itu sudah ada pemesanan. Sudah ada semuanya jadi rata-rata mereka daya serapnya sangat tinggi di sektor pariwisata rata-rata sudah bisa diterima baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah inilah yang sangat detail untuk menghidupkan ketahanan ekonomi dari sisi pariwisata kalau memang kita gerakan masif untuk di kawasan yang terluar terdalam bisa menumbuhkan sektor ekonomi makanya kami berguru sama apa namanya UNHAN ini untuk mendapatkan beberapa konsep persiapan dari pernyataan Pak Nyoman di zoom Meeting itu Pak harus segera ke UNHAN untuk

mendapatkan masukan tentang aa pola yang kami buat Pak sehingga nanti dari beberapa hal yang mungkin persiapan dari UNHAN itu kami bisa mengadaptasikan dengan konsep kami sehingga nanti itu akan menjadi lebih smooth lagi pak jangan sampai ada aa apa namanya gesekan antar Kementerian Pak ini kita khawatir kan mungkin itu Pak Pak Farid.

[00:27:02] Saya ketua SPM nya Pak, jadi saya baru membuat satu bentuk ini Pak aa regulasi sistem antara industri dengan aa sistem penyandang tugas. Jadi untuk eksternalnya itu kan industri memberikan masukan memberikan feedback gitu pak dari apa saja yang perlu kami kembangkan itu kami sudah ada sinergitas di sana Pak.

[00:27:30] Jadi kami sempat waktu dengan Biro Hukum dengan Karo hukumnya apa namanya Kemendikbudnya Stek Pak Kami kan ini orang PNS Pak mau ke mana saja boleh kan gitu mau ke Kementerian Pariwisata, Kementrian Dikti tapi ada dua hal yang kami pertanyakan tapi dia tidak bisa jawab. Satu, vokasi kami itu sudah dijamin Internasional BAN PT pasti nah gitu kan semua sudah akreditasi tetapi kami juga dijamin oleh UNWTO akreditasi kami itu adalah dari apa namanya World Tourism Organization. semua yang keenam-enamnya itu. Nah itu BAN PT sudah pasti kenapa mereka bisa mengklaim ini bawa ini memang kualitasnya internasional karena program studi yang kami setiap program studi itu mencetak apa yang dibutuhkan Departemen yang ada di industri Departemen F&B kami mencetak mahasiswa F&B gitu, nah apakah ini bisa menjamin yang 2 ini Kalau kami gabung ke Diknas gitu karena kenyataannya mohon maaf saja kami searching program studi yang ada dibawah Kementerian Diknas yang Negeri ya bukan swasta Kalau swasta bukan able to able yang negeri itu tidak ada program studi seni kuliner tidak ada program studi restoran tidak ada program studi divisi kamar nah sehingga ke spesifikasi inilah yang kami bisa pertahankan bahwa sulit bagi Kementerian Diknas untuk mengolahnya kedepan dari segi penjaminan mutu gitu itu mungkin kasarnya gitu seperti mungkin di militer juga kami sempat waktu kita zoom loh kok UNHAN membuat Kedokteran padahal Kementerian Dikbud sudah punya kalau sudah punya di Kementerian Dikbud tidak usah lagi membuka Kementerian KL kan gitu tapi jawaban dari sini kami memang punya kedokteran tapi kedokteran militer dia boleh pegang jarum suntik dan Boleh Pegang senjata bisa tidak Kementerian dikbud lakukan itu nah ini menarik.

[00:29:55] Jadi ini tidak di rekam mohon matikan sebentar Pak.

Irsyad_UNHAN 2.m4a

[00:00:00] Intiknya siapa cop nya seperti apa intinya nya Memang menjadi tanggung jawab Universitas tersebut atau sekolah kedinasan tersebut tetapi jangan lupa permasalahannya bukan apa yang dididik dengan apa yang mereka Bekali persoalannya yang terjadi saya contohkan ya mohon maaf yang jago ngelas di bawah air itu kira-kira siapa Kalau tidak ada Angkatan Laut ternyata tidak bisa karena tidak dilengkapi yang namanya sertifikasi profesi setuju pak ya maka semua Universitas harusnya membangun yang namanya lembaga sertifikasi profesi baik itu pusat ataupun Mandiri maka disitu ada namanya ijazah pendamping setuju pak ya Tata Boga yang di didik di angkatan laut dia tidak bisa go internasional karena ijazahnya tidak diakui maka harus membuat lembaga sertifikasi profesi baik itu pusat maupun Mandiri sehingga dia dikasih ijazah dan dikasih sertifikat profesi setara internasional sehingga itu menjadi tolak ukur gitu nah terkait dengan Ini masalahnya bagaimana kita membangun bangsa ini bersama kalau masalah duplikasi silakan diaudit jangan menutup bahwa seolah-olah Dikti itu Mendikbud itu bisa menjamin persoalan Padahal kalau kita lihat Abad 21 ancumannya multidimensi dari ancaman politik ideologi ekonomi budaya teknologi hukum kesejahteraan Apakah bisa terbukti tidak bisa Maka menurut saya tidak masalah hanya kita bicara duduk bersama menurut saya, saya dipanggil DPR kebetulan kebetulan Pak Menko itu nanya kepada saya Pak kenapa izin operasional S1 tidak dikeluarkan Siapa yang bilang tidak dikeluarkan tapi persoalan yang disampaikan masalah OTK menjadi konsekuensi dimana-mana pengembangan organisasi pasti berujung kepada jabatan kalau berujung sama jabatan pasti hubungannya kemenangan persoalannya Bukan itu tapi persoalan bangsa ini ketika dihadapkan oleh era digitalisasi Dihadapkan dengan era komunikasi yang terbuka hoax cyber sekarang Bagaimana orang bisa mencegah kalau tidak melalui pendidikan nah kalau ini didudukkan bersama bahwa semua komponen bangsa ini terlibat maka tidak ada yang salah dengan ini tidak ada yang salah yang kedua Apakah tugas kita ini hanya mendidik tugas yang kedua adalah melatih kalau reguler tadi Bapak mengatakan bahwa itu kalau berjenjang sesuai pendidikannya bagaimana kalau melalui KKN, melalui hidup dunia usaha dan industri levelling nya ada nggak pak Loh kenapa jadi bermasalah artinya unhan ini bisa mendidik bukan dari SD SMP tapi dari dunia industri dan usaha menteri KKP Ibu Susi SD tapi keahliannya Doctor level 8 artinya Bagaimana tidak ada masalah sekarang di pulau terluar ada yang mengenyam pendidikan beda maka kita rekrut Ayo pelatihan Tugas vokasi atau bukan Pak tugas vokasi nah ini yang harusnya kita duduk bersama Ini kalau saya sebagai kepala pusat penelitian terkait dengan ini maka saya berbicaranya seperti itu tinggal kita dudukkan persoalannya tujuan kita membentuk itu apa tujuan untuk membentuk itu apa apalagi berbicara sekarang ketahanan pangan Pak 2030 sampai 2050 bukan lagi ancaman militer tetapi ancumannya dear militer salah satunya adalah ketahanan pangan krisis energi kemudian bencana alam kependudukan demografi informasi semua itu gimana berbicaranya hoax yang bisa mengganggu Stabilitas keamanan nasional menyebabkan itu nah ini harus begitu jangan nunggu Dikti memang Dikti mau di Perum sana ya tidak mau nah sekarang pertanyaannya Kenapa pemerintah Presiden memerintahkan kemenhan untuk masalah pertanian saya tanya loh tidak ada Harusnya menteri siapa pertanian masalah ketahanan pangan Karena menghadapi

ancaman urban pak Urban bukan berarti dari desa ke kota tapi dari agribisnis ke industri Arius mangkannya penting sekarang harus import Bagaimana kita bisa menyiapkan ketahanan pangan sehingga dnt nya pun harus dibentuk menjadi pleton pertanian supaya logistik logistik wilayah terjamin sekarang bagaimana Jadi kalau saya secara profesional saya mohon maaf tapi secara dosen maka saya mengambil itu penduduk menyampaikan visi misi tujuan kita membuka itu apa itu dulu kalau bapak cerita itu saya ambil didukung oleh pemerintah Nah sekarang yang disiapkan infrastruktur di Papua tapi pendidikan nya tidak Bagaimana jangan membicarakan intip dulu Tapi nanti intip itu akan berkembang kita cari yang memang yang reguler sama yang dicari dari dunia usaha dan industri tadi Maka disitu ada pemerataan kita siapkan lembaga LSP lembaga sertifikasi angkatan laut sekarang punya lembaga sertifikasi profesi Mandiri terjun payung itu tidak ada yang hebat kecuali TNI tapi kita distandarkan dengan penerjun sipil coba harus disertifikasi juga penerjun sipil kan begitu ini itu dari saya Pak ya itu dari saya kira-kira begitu kita harus memang membuat ayo gandengan melangkah bersama Garuda di Dadaku belum lagi bapak bicara komponen cadangan saya tanya Siapa yang berhak menjadi komponen cadangan masyarakat bangsa ini bagaimana penerangan bela negara ada dimana di fungsi pendidikan Nah inilah yang harus kita gali memang harus kita gali itu Pak jadi mudah-mudahan dengan ya saya kalau cerita sering menggebu-gebu Saya takut nanti tapi itulah kenyataannya

[00:08:14] Saya pikir kita sama pak saya juga kebetulan orang LSP saya kebetulan ketua LSP pak

[00:08:22] Mungkin dari teman-teman yang lain

[00:08:35] Universitas pertanian itu dunia ini Pak tidak ada di bawah Kemendikbud Bahkan kemham masing-masing sistem pendidikan awalnya mendapatkan anggaran juga

[00:09:18] Pengelolaannya bukan dari anggaran 20% itu pak ya Bukan dari Kemenhan dari anggarannya kemenhan ya seperti itu kita punya standar yang kita inginkan namun kan tidak bisa dipenuhi dari Universitas atau alumni dari Universitas lain nah menteri itu sudah dididik langsung supaya siap pakai Pak seperti dokter Kami punya 110 rumah sakit pak tapi tenaga medisnya dokter baru terpenuhi 20% dari 110 rumah sakit yang kita punya Nah kenapa orang-orang sudah kita tarik lagi Lulusan dokter itu menjadi tentara karena dia bisa Kemana saja sekarang Beda kalau aturan lama mereka mau masuk tentara untuk menghindari PTT lebih baik jadi tentara daripada ikut PTT itu lebih sengsara Nah kalau sekarang satu hal lagi pak yang tadi disampaikan bahwa setiap warga negara, Saya mau tanya Pak jujur karena anak kita generasi muda yang ada di pelosok-pelosok tapi tidak punya duit bisa sekolah tidak, karena kita membuka, membuka pendaftaran sebelum perguruan tinggi lain buka sebelum Akademi TNI itu buka kita sudah buka duluan

Karena tujuan Pak Prabowo tujuannya menhan untuk mencari anak-anak terbaik di seluruh negeri

[00:12:29] Masalah respon dari pihak Kemendikbud ya pak ya itu mereka antara lain kedinasan atau regulernya reguler dalam artian mereka bayar SPP kalau kedinasan itu kecenderungannya beasiswa memang mungkin satu sisi logika berpikirnya Keuangan negara nanti peruntukkan untuk negara juga saya pernah kebetulan ikut di Kementerian menpan lulusan unhan itu dibiayai oleh negara mereka kemana kecuali anggota TNI kembali kesatuan tapi yang umum ini uang negara kok dibiarkan begitu mereka itu tidak dimanfaatkan fungsinya Kemenpan itu seperti itu jadi menurut saya itu hampir sama cara berpikirnya Kementerian pendidikan mungkin ini dari versi saya Pak Mestinya apa yang kita lakukan dari kementerian-kementerian lain ini justru membantu mereka Kementerian Pendidikan contoh ada penawaran penawaran seperti itu lebih cenderung Menurut saya ini seperti kesannya mempersulit harusnya dia memfasilitasi aja karena menurut saya terkait dengan dengan pendidikan kedinasan itu kan arahnya berpikir birokrasi orang nanti lulusannya pegawai negeri kalau yang apa namanya yang bukan kedinasan ini kecenderungan kita entrepreneur sebetulnya nya itu yang menjadi persoalan itu jadi jangan dulu dominasi peran pemerintah Wah dia bisa membuat UN operasi sendiri dan itu antara lain bisa lewat vokasi itu tadi vokasi itu dibekali dengan praktik dia menguasai bidang ilmunya penambahan kompetensi lewat sertifikasi saya kira itu semakin memperkuat Saya kira memang itu menjadi persoalan sekarang ini kalau seandainya Kementerian berusaha untuk memfasilitasi didorong gitu meskipun dari sisi yang lain saya kalau Kementrian itu dia bisa secara khusus memberikan nilai tambah contoh menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan akreditasi ya Akreditasi kan berkaitan dengan penjaminan mutu ya pak itu memang menjadi porsi saya dengan Tentunya semua mendukung penjaminan mutu ya saya penelitian yang menginspeksi Semua penjaminan mutu terintegrasi di sana minimal suara beliau ini ini begitu bersemangat itu jaminan mutu Yang mendukung, jadi pada umumnya itu konteksnya dilihat dari anggaran tapi tidak melihat Begini saya tidak tahu konteks cara berpikirnya kalau saya ya Anggaran itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kok dibiarin yang salah yang dibiarin mestinya kolaborasi unhan mencetak ilmu pertahanan Deplu butuh tidak ya sudah Silahkan ambil kan begitu Kementerian Pendidikan butuh tidak Kementerian yang lain itu tidak analisis tentang ancaman ilmu pertahanan bisa seperti itu kalau begitu diambil Jangan melihat begini ini anggarannya pemerintah iya Tapi kalau untuk mengenyam pendidikan di masyarakat masalahnya dimana masalahnya dimana soal nanti dia ini bekerja atau tidak jangan itu dulu tapi dipantau ada tracer study dong tracer study itu dilihat ini bagaimana perkembangan anak ini bisa saja dia menjadi volunteer di masa di masyarakat Walaupun dia tidak bekerja tapi dia volunter di masyarakat loh ini jarang dilihat dibandingkan dengan segala luasnya wilayah kita ini dihadapkan berbagai macam ancaman persoalan ini yang harus dinilai Jangan hanya ini tak kasih kecuali ini tak kasih orang luar negeri baru salah ini saya kasih anak saya sendiri saya Salahnya dimana Bapak ini kan begitu

Jadi saya menambahkan dari beliau tadi jadi sangat disayangkan wong saya aja biayai anak tetangga boleh kok apalagi biayai anak sendiri Ini gimana

[00:18:09] Kita itu mau didik minimal 1 lah dari perwakilan negara-negara kecil di sekitar kita maksudnya untuk membina Hubungan internasional walaupun itu kecil Pak Timor Leste Walaupun itu kecil tapi kalau PBB satu suara bagaimana kalau itu bisa membantu Indonesia Persoalan Papua misalkan tidak lagi mendukung Papua tapi mendukung Indonesia itu yang tidak pernah dipikir sama orang

[00:18:58] Kemarin kami sempat Katakanlah Seperti pak Nengah tadi bilang memang orang-orang dari ban-pt kan sudah mengenal Pak tujuan kita kemana Jadi impeknya apa sudah dibaca sebenarnya sama pihak penjamin external ban-pt jadi itu sudah dibaca semuanya Kemudian kalau kita melihat dari istilahnya merefleksikan dari vokasi yang di tingkat Kemendikbud Pak untuk khusus untuk vokasinya pariwisata Pak ya Rata-rata campur aduk tidak karuan Pak Mau menjurus ke mana Mau dikerjakan apa bingung Pak rata-rata Pak Mohon maaf di Unram ya Pak Katakanlah di Unhas berapa apa 1 tahun Pak ya langsung bubar jadi tidak tahu pak jadi industri tidak mau menerima karena Sisi vokasi nya tidak terlihat tidak nampak Kalau kami pak begitu lulus sudah diambil Pak bahkan dari pihak pemerintahan kemarin yang mohon maaf yang tingkat guru pak ya yang ada di SMK Pariwisata langsung dipesan karena penjaminan mutu nya Pak Pak minta tolong dong Ada tidak alumninya yang poltekpar Lombok untuk usaha perjalanan wisata ada Pak kami tidak punya guru Pak ada guru cuma pelengkap saja Pak pelengkap saja Pak begitu langsung kami kirim kan langsung anak-anaknya bisa mendominasi dari sisi vokasinya kemudian dihubungkan dengan travel untuk SMK Pak ya seperti itu intinya dari STP STP yang dibentuk sama pihak dikbud di bawah Kemendikbud itu belum bisa mengarah kesana Pak

[00:20:56] Ya kalau sekolahan Bapak tidak bisa seperti itu tidak bisa menghasilkan itu maka saya anggap Bahwa itu adalah kekurangan Tapi kalau bapak memiliki output anak didik yang lebih Saya rasa itu menjadi sebuah keberhasilan cuman kan harus kita identifikasi begini Pak tadi Bapak mengatakan ini masih bingung sekarang harus belajar dari situasi pandemic covid nineteen semua jadi berubah industri tidak lagi bangun kantor industri tidak lagi bangun perusahaan tetapi myself This industri Maka literasi digital maka ini harus dilatih kan bagaimana saya usaha menciptakan usaha peluang bukan dari industri tetapi dari diri kita sendiri misalnya online mengapa harus biaya banyak kenapa saya harus ngontrak at home berarti saya bisa melakukan industri dari rumah maka kita harus kembangkan terus digitalisasi ini nah ini yang harus kita kembangkan inilah tugas kita bersama kita butuh bersama jadi jangan berharap bahwa industri akan menerima semua pekerjaan tetapi bagaimana menciptakan kemandirian justru kekuatan ekonomi covid ini ditopang bukan oleh industrinya ternyata Betul Pak ditopang oleh UMKM usaha

kecil yang justru embel-embelan jalan itu justru yang yang menghidupkan Nasional kita perekonomian kita nah ini terbukti Pak ini bagaimana menciptakan Pertamina menjadi Pertamina itu usaha jadi maka ini sekarang saya ini tidak perlu usaha taksi harus punya mobil dengan menyiapkan aplikasi dia biaya sendiri dia memberikan saya keuntungan dari aspek aplikasi nah semua Pak Sekarang saya tanya pariwisata tidak harus kerja di kantor dia jadi youtuber terus terus konten-konten nya tentang pariwisata That is money Nah ini diolah ini harus diolah makanya Pak jadi pendidikan itu jangan murni ya harus dikembangkan harus dikembangkan ini tugas kita ya toh saya tidak bangga unhan itu terus bisa kemana-mana bisa diterima memang semestinya tapi saya akan lebih bangga kalau unhan ini terjun di dunia pinggiran di situ ada unhan baru Saya bangga harus saya pastikan begitu Pak Nah ini yang harus kita kembangkan bersama Bapak dari perspektif pariwisata Saya dari perspektif pertahanan ada irisannya Bapak menjadi intelijen maritim dari yang sektor maritim Dari yang sektor maritim pariwisata darat menjadi intelijen daratan untuk meng-counter Fox agar disintegrasi negara Disintegrasi negara ini Tidak akan nah kira-kira gitu Pak Loh itu penting Pak Makanya saya bilang Waduh ini rusak kalau perspektifnya meluas gini dipandang dari minuman sedotan terlalu kecil kita

[00:25:03] Disini kita punya nama kita kan kampus bela negara Nah itulah mungkin yang menjadi hal unik hal yang mungkin menjadi icon kita di samping kita memberikan pengetahuan kita juga membangun karakter dengan bela negara di sini lima dasar nilai bela negara itu Pak Ciptakan air rela berkorban Sadar berbangsa dan bernegara memberikan kemampuan awal baik psikis maupun fisik harus ditanamkan sehingga kemana-mana mereka dengan bisa kreatif berinovasi berlandaskan karakter tadi itu bela negara tadi itu itu memang kita tanamkan Mulai sejak awal masuk selama dalam proses belajar mengajar sampai mereka bisa memang untuk bela negara ini kan kalau kita lihat undang-undang itu kan tekad Sikap perilaku jadi kita disitu kita memberikan suasana bahwa kalau wajib militer itu benar Setiap warga negara berhak bela negara itu kita tanamkan Nah itu dari situlah diharapkan muncul yang tadi itu karena cinta tanah air dia sadar berbangsa negara dan dia punya kemampuan yang diberikan oleh kita dalam dunia pendidikan itu tambahan sedikit karena saya kampus bela negara

[00:28:25] Hal begini Pak Contoh kasus Kenapa TKA China Mari kita lihat kita buka Ternyata saya sebagai perusahaan Saya pasti ingin punya namanya karyawan terjamin terjamin tapi dia melihat jaminan itu Dari mana ternyata itu dari sertifikasi gitu Pak Nah padahal teknisi kita ini ahli cuman tidak ada sertifikasi Jadi bagaimana saya bisa menjamin maka untuk itu tugas kita Jangan melihat lagi bahwa ini adalah dari reguler Pak Ayo kasih sertifikasi Ayo kita pelatihan gitu loh baru kita sertifikasi itu persoalan negara ini tidak berbicara itu artinya bukan tidak berbicara tidak menyentuh ke situ ujung-ujungnya itu sertifikasi banyak yang tidak bisa tertampung di luar negeri ataupun perusahaan luar negeri di kita karena sertifikasi begitu Ijazah sama tidak Pak ternyata tidak mangkannya ada ijazah pendamping sertifikasi profesi tadi itu ini kalau dia dapat 2

dua Saya sekolah komputer tapi saya tidak punya sertifikasi komputer maka dikasihlah sertifikasi komputer pelatihan sehingga itu bagaimana bekerjasama dengan internasional seperti IPU Keinsinyuran kemudian bekerja ASEAN kemudian jadi ASEAN ENG nah itu menjadi penting, saya jagoan F1 tapi tidak punya SIM Masalah Tidak pak ya masalah lisensi walaupun saya jagoan dibutuhkan itu baru itu Pak itu kira-kira jawabannya itu Jadi kenapa orang asing itu banyak datang itu karena mereka sudah memiliki sertifikasi kita belum yang Didik Didik aja belum tentu dapat sertifikasi

[00:30:56] Kalau di kementerian pariwisata Alhamdulillah kalau mahasiswanya di bawah kementerian pariwisata selain Dia memegang ijazah itu setiap tahun bahkan Bukan tiap akhir program tiap tahun dia di sertifikasi jadi mulai level 3 tahun pertama level 4 dengan LSP

[00:31:22] LSP tidak resmi langsung Pak, Boleh membentuk LSP tapi tetap di bawah payung bnsop Soalnya di balik bnsop sama bnsop 2 itu Dibalik aja cuma kalau mau bikin LSP Mandiri Kita harusnya nyiapkan asesor dididik dulu baru sertifikasinya berlaku ini yang harus dilakukan unhan ini saya berharap langsung segera membentuk LSP mandiri Mandiri harus karena ada teknologi dan segala macam ini penting

[00:32:11] Kalau di Kementerian kami 6 perguruan tinggi itu semua sudah punya LSP Mandiri

[00:33:08] Cerita saja saya dulu salah satu direktur saya dulu selalu mengerti mengerti visi yang namanya kemenhub dan pariwisata Saya orang yang selalu mendengungkan banyak untuk tidak dibuka bandara internasional Nah sekarang ternyata ada banyak efek sampingnya Dulu kemenhub itu membuka perizinan perizinan alasannya untuk pariwisata destinasi Tetapi efek lainnya dari itu pembukaan bandara internasional jelek sekali Saya pernah menempatkan 2 orang anggota saya di Manado dua bulan penuh dia menghitung Berapa jumlah orang datang dari Beijing ke Manado cast flow nya sepersepuluh Apa yang dibawa orang-orang kembali ke sana itu bukan kan hanya 10 penumpang tadi Bapak tahu kan di Beijing itu tidak mungkin bisa ditanam kelapa tapi dari sisi lain kalau itu menjadi jaringan suatu saat tidak ada kelapa Apa itu opera Beijing gitu Satu hal lagi dengan adanya destinasi langsung kepada objek pariwisata ada catatan saya tahun 2019 ada 117 lapangan udara 38 udah Internasional dari 38 kerugian secara ekonomi itu berapa karena apa penerbangan dulu tidak, Apa sekarang tahu kan beritanya Garuda saja sudah memiliki hutang 700 triliun mau tutup Seandainya hal itu dulu dulu dulu dibangun pada saat penelitian. Saya itu Katakan Eco sektoral yang maju duluan yang tidak berpegang

kepada kepentingannya dari Kementerian hanya salah satu contoh Pak yang orang Cina 2 bulan anggota saya Pak terdapat penelitian berapa 600 hari baru satu Beijing Manado

[00:37:34] Kalau kita namanya pembentukan sikap dasar profesi Jadi bukan ospek langsung dari Kodim Pak dan satu minggu itu kita ajak Kodim khusus memang di lapangan mungkin ke depan pak tujuannya kami juga ke sini selain dari tadi banyak sudah sudah banyak informasi yang kami dapat kemungkinan ada hal-hal yang bisa kita kerjasama sehingga kami langsung membawa draft jadi tinggal dipelajari, Kami kerjanya gitu Pak langsung dipelajari tapi tidak hari ini dipelajari kita ada softcopy-nya kita bisa ini kapan-kapan apakah melalui offline atau kami yang kesini penandatanganan MOU ini atau nanti bapak yang ke sana sekaligus menjadi dosen tamu di depan mahasiswa tentang bela negara kan gitu itulah yang bisa kita lakukan kedepan dengan Politeknik pariwisata Lombok karena bagaimanapun juga mereka juga anak-anak bangsa kan harus tahu tentang bela negara

[00:40:24] Yang untuk bela negara menteri itu Sudah menandatangani MOU dengan Kemendikbud estek dikbud juga dulu disaksikan berapa ratus Rektor se-indonesia, Mangkanya sekarang ada Minggu bela negara untuk menggantikan ospek itu ini yang sudah berjalan kebanyakan di Bandung Bapak mungkin begini Pak tidak setiap saat bela negara itu memanggil kami dari sini tapi bapak bisa mengundang Dari Kita Untuk men training of trainer ya TOT para dosennya nanti dengan kurikulum yang ada di sini Kita sesuaikan untuk dosennya di Struktur gitu jiwa korsa itu ke sini aja dosennya ke sini jadi memang kami ada tiap tahun ada jiwa korsa pegawai

POLITEKNIK PARIWISATA NEGERI **LOMBOK**

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian :

**“ TRANSFORMASI ORGANISASI PENGELOLAAN PENDIDIKAN
TINGGI KEPARIWISATAAN ”**

Petunjuk:

- Pedoman wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data primer dalam mendukung analisis penelitian Institusi Poltekpar Lombok
- Mohon bantuan bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan dibawah ini karena Jawaban bapak/Ibu sangat bermanfaat dalam membantu kami membuat prototipe Transformasi kelembagaan pendidikan tinggi pariwisata dan ekonomi kreatif serta PT/KL lainnya
- Aptresiasi yang tak terhingga kami ucapkan atas waktu dan kontribusi bapak/ibu

Nama Informan :

Jabatan :

Perguruan Tinggi :

Alamat :

Email/Telp :

NO	FOK.MASALAH	PERTANYAAN	JAWABAN
	Mengkonstruksi <i>Road map</i> Pendidikan vokasi Perguruan Tinggi Negeri	1. Apakah institusi memiliki Roadmap atau renstra institusi ? Mohon tuliskan 3 arah pengembangannya	
		2. Apakah institusi sudah memiliki dasar kebijakan tentang pendidikan Vokasi dan penerimaan mahasiswa Non ASN (<i>Reguler</i>) ? Kalau ada sejak kapan ?	

1		3. Apa hasil traser study dari luaran mahasiswa institusi tempat bapak/ibu bekerja lima tahun terakhir ?	
		4. Apa saja hasil Tridarma Perguruan Tinggi yang sudah dihasilkan institusi Bapak/Ibu 5 tahun terakhir ?	
		5. Bagaimana dengan kurikulum institusi selama ini yang digunakan untuk pembelajaran jalur vokasi ?	
		6. Sejauh mana penyelenggara pendidikan (KEMENDIKBUD RISTEK) mengintervensi standar proses belajar mengajar di instansi (<i>Quality Assurance</i>)	
2	Menyusun Strategi antisipasi yang efisien pasca terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan PT oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah NonKementerian.	1. Apa tanggapan institusi terhadap RPP PTKL?	
		2. Apakah institusi sudah memiliki alternatif pilihan dari 3 pilihan rekomendasi RPP PTKL ? kalau ada pilihan yang mana ?	
		3. Apakah Institusi punya alternatif selain tiga rekomendasi dari RPP PTKL ? kalau ada apa bentuk model yang sudah disiapkan ?	
		4. Apakah pantas jika institusi hanya menyelenggarakan Pendidikan Bagi ASN	

		5. Apakah ada rencana institusi menggalang PTKL untuk mempertimbangkan terbitnya RPP PTKL ?	
		6. Apabila transformasi ini terjadi dan Program pendidikan Reguler akan diselenggarakan oleh KEMENDIKBUD RISTEK dapat menjamin besaran anggaran pendidikan dan jaminan kulaitas kompetensi (<i>Quality Assurance</i>) mahasiswanya masih tetap sama ? Mohon tanggapan bapak/Ibu	
3	Mendesain model kebijakan kolaborasi Tata kelola kelembagaan dalam membentuk SDM yang unggul berkelanjutan	1. Apakah institusi setuju dengan transformasi Pendidikan Tinggi menjadi Program Pendidikan bagi ASN diselenggarakan dan dikelola dengan model kolaborasi kelembagaan antar instansi pemerintah, mohon penjelasan ?	
		2. Kemungkinan yang akan terjadi kedepan dalam program pendidikan bagi ASN, untuk mencapai SDM Unggul baik sektor Pemerintah maupun Industri, apa yang perlu dilakukan ?	
		3. Apa tanggapan institusi apabila kolaborasi penyelenggraan dan pengelolaan pendidikan dilakukan bersama antar instansi dengan dua sumber anggaran	
		4. Apa langkah langkah	

		institusi dalam mengkonstruksi model yang akan diambil agar perguruan tinggi tetap eksis.	
		5. Apakah institusi sudah memiliki skema program pendidikan bagi ASN ? kalau sudah ada Skema Apa Saja ?	
		6. Apabila transformasi pengalihan penyelenggaraan pendidikan reguler terjadi maka apa yang harus dilakukan institusi terhadap bidang akademik, SDM, Sarpras dan Anggaran	

Rekomendasi Khusus :

- 1.
- 2.
- 3.

..... Mei 2021

Informan

.....